

**PENGARUH KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN  
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN  
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:  
Dian Dharmaningtyas  
12812141043

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2016**

**PERSETUJUAN**

**PENGARUH KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN  
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN  
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
DIAN DHARMANINGTYAS  
12812141043

Telah disetujui dan disahkan  
Pada tanggal 11 April 2016

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi  
Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui,  
Dosen Pembimbing

Drs. Ngadirin Setiawan, SE., M.S.  
NIP. 19561014 198111 1 00

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul :

**PENGARUH KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN  
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN  
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)**

Disusun oleh:

DIAN DHARMANINGTYAS  
12812141043

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tugas Akhir Prodi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
Pada tanggal 26 April 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

### DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
Mahendra Adhi Nugroho, M.Sc	Ketua Penguji		18 Mei 2016
Drs. Ngadirin Setiawan, M.S	Sekretaris Penguji		19 Mei 2016
RR. Indah Mustikawati, S.E, Akt, M.Si	Penguji Utama		16 Mei 2016

Yogyakarta, 23 Mei 2016  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,



Dr. Sugharsono, M.Si

NIP. 19550328 198303 1 002

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

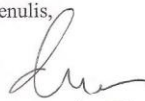
Nama : Dian Dharmaningtyas  
NIM : 12812141043  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Tugas Akhir : PENGARUH KEWAJARAN PENYAJIAN  
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP  
AKUNTABILITAS KEUANGAN  
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat  
Daerah Kabupaten Temanggung)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.  
Sejauh pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau  
diterbitkan kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah  
yang telah lazim.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, April 2016

Penulis,



Dian Dharmaningtyas

NIM 12812141043



## **MOTTO**

“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut  
oleh manusia adalah menundukkan diri sendiri”

(Kartini)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Budi Santoso dan Ibu Umiyati, yang selalu mendukung, memotivasi, memberi semangat, dan berdoa untuk penulis. Terima kasih untuk semuanya.
2. Almamaterku tercinta Universitas Negeri Yogyakarta. Jayalah selalu.

**PENGARUH KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN  
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN  
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)**

Oleh:

Dian Dharmaningtyas  
12812141043

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek (1) Kesesuaian dengan SAP, (2) Kecukupan Pengungkapan, (3) Kepatuhan terhadap Undang-undang dan (4) Efektivitas sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan, serta (5) Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama terhadap akuntabilitas Keuangan.

Penelitian ini termasuk penelitian survei. Populasi dalam penelitian ini adalah 204 pegawai bagian keuangan SKPD Kabupaten Temanggung dengan sampel penelitian sebanyak 168 pegawai. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan dengan persamaan regresi  $Y = 44,619 + 0,359X_1$ ,  $t$  hitung = 3,947 dan signifikansi = 0,000 serta  $R^2 = 0,091$ , (2) Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan dengan persamaan regresi  $Y = 58,575 + 0,101X_2$ ,  $t$  hitung = 1,864, dan signifikansi = 0,032, serta  $R^2 = 0,022$  (3) Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan dengan  $t$  hitung = 1,806 dan signifikansi = 0,037, (4) Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan dengan  $t$  hitung = 7,555 dan signifikansi = 0,000, (5) Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan dengan persamaan regresi  $Y = 21,258 + 0,169 X_1 + 0,050 X_2 + 0,065 X_3 + 0,728 X_4$ ,  $F$  hitung = 15,139, dan signifikansi = 0,001 serta  $R^2 = 0,285$ .

Kata kunci: Kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesesuaian dengan SAP. Kecukupan Pengungkapan. Kepatuhan terhadap Undang-undang. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Akuntabilitas Keuangan.

**THE INFLUENCE OF THE FAIRNESS OF FINANCIAL STATEMENT  
PRESENTATION ON FINANCIAL ACCOUNTABILITY  
(Empirical Studies at SKPD of Temanggung Regency)**

By:

Dian Dharmaningtyas  
12812141043

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the influence of the fairness in financial statement presentation in (1) suitability of SAP (2) adequate of disclosure (3) obedience of the constitution (4) the effectiveness of intern control system aspects on financial accountability (5) the influence of the fairness in financial statement presentation in suitability of SAP, adequate of disclosure, obedience of the constitution, and the effectiveness of intern control system aspects together on financial accountability.*

*This study included a survey research. The population in this study is 208 financial department's staffs of SKPD Temanggung and took sample of 168 respondents. The sampling technique used purposive sampling. Data collection techniques used a questionnaire. Analysis prerequisite test included normality test, linearity test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. The data analysis technique used a simple and multiple linear regression analysis.*

*The results showed that: (1) the influence of the fairness in financial statement presentation in suitability of SAP aspect has positive and significant effect on financial accountability, indicated by the regression equation  $Y = 44,619 + 0,359X_1$ ,  $t$  value = 3.947 and level of significance = 0.000 and also  $R^2 = 0.091$ , (2) the influence of the fairness in financial statement presentation in adequate of disclosure aspects has positive and significant effect on financial accountability, indicated by the regression equation  $Y = 58,575 + 0,101X_2$ ,  $t$  value = 1.864 and level of significance = 0.032 and also  $R^2 = 0.022$ , (3) the influence of the fairness in financial statement presentation in obedience of the constitution aspect has positive and significant effect on financial accountability, indicated by  $t$  value = 1.806 and level of significance = 0.037 (4) the influence of the fairness in financial statement presentation in the effectiveness of intern control system aspect has positive and significant effect on financial accountability, indicated by  $t$  value = 7,555 and level of significance = 0.000 (5) the influence of the fairness in financial statement presentation in suitability of SAP, adequate of disclosure, obedience of the constitution, and the effectiveness of intern control system aspects together have positive and significant effect on financial accountability, indicated by the regression equation  $Y = 21,258 + 0,169 X_1 + 0,050 X_2 + 0,065 X_3 + 0,728 X_4$   $F$  value = 15,139, and level of significance = 0.001 and also  $R^2 = 0.285$ .*

*Keywords: The influence of the fairness of financial statement presentation. Suitability of SAP. Adequate of disclosure. Obedience of the constitution. The effectiveness of intern control system financial accountability. Financial accountability.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)”. Tugas Akhir Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Dalam menyusun Tugas Akhir Skripsi ini, penulis tentunya banyak menemukan kendala dan hambatan. Akan tetapi berkat bimbingan, dukungan dan pengarahan dari berbagai pihak akhirnya Tugas Akhir Skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Drs. Ngadirin Setiawan, SE., M.S., selaku dosen pembimbing yang sudah sabar membimbing penulis dan telah memberikan ilmu, saran serta masukan bagi penulis.
2. RR. Indah Mustikawati, SE., Akt, M.Si., dosen narasumber yang telah memberikan koreksi dan pendapatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.
3. Mimin Nur Aisyah., M.Sc., Ak., dosen pembimbing akademik, terima kasih telah menjadi ibunda terbaik selama masa perkuliahan.
4. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

5. Kakak dan Adik-adikku tersayang Adellia Rizky Adhitama, Triadi Pandu Nugroho, dan Wening Laksita Nugraheni yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap penulis.
6. Wibisono terima kasih telah menjadi tempat cerita, yang telah memberikan semangat sehingga tugas akhir ini dapat selesai.
7. Oyon dan Fierda terimakasih telah menjadi sahabat terbaik selama ini
8. Farida, Anita, Heni, Arum, Yull, Ridwan, dan seluruh teman-teman Akuntansi A 2012 yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, terimakasih telah mau berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan.
9. Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2012 dan 2013 yang telah menjadi responden penelitian.
10. Semua pihak yang membantu penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan skripsi ini sangat diharapkan. Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Yogyakarta, April 2016

Penulis



Dian Dharmaningtyas

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah .....	13
D. Rumusan Masalah .....	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS .....</b>	<b>17</b>
A. Kajian Teori.....	17
1. Akuntabilitas Keuangan .....	17
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).....	22
3. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan .....	38
B. Penelitian yang Relevan.....	53
C. Kerangka Berpikir.....	56
D. Paradigma Penelitian.....	60
E. Hipotesis Penelitian.....	61
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>62</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	62
B. Desain Penelitian.....	62
C. Variabel Penelitian .....	63
D. Definisi Operasional Variabel.....	64
E. Populasi dan Sampel Penelitian.....	67
F. Teknik Pengumpulan Data.....	69
G. Instrumen Penelitian.....	70
H. Hasil Uji Coba Instrumen.....	72
I. Metode Analisis Data.....	75

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>83</b>
A. Deskripsi Data Penelitian.....	83
1. Profil SKPD Kabupaten Temanggung .....	83
2. Karakteristik Responden .....	85
B. Deskripsi Statistik Variabel.....	87
C. Uji Prasyarat Analisis Data.....	98
1. Uji Normalitas Data.....	99
2. Uji Linearitas Data .....	92
3. Uji Asumsi Klasik.....	101
D. Uji Hipotesis.....	102
1. Uji Hipotesis Pertama.....	102
2. Uji Hipotesis Kedua .....	105
3. Uji Hipotesis Ketiga.....	107
4. Uji Hipotesis Keempat.....	110
5. Uji Hipotesis Kelima.....	112
E. Pembahasan.....	116
1. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP terhadap Akuntabilitas Keuangan .....	116
2. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan terhadap Akuntabilitas Keuangan...	119
3. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Undang-undang terhadap Akuntabilitas Keuangan.....	121
4. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan.....	122
5. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Keuangan.....	124
F. Keterbatasan Penelitian.....	126
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>128</b>
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>137</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbedaan Komponen Laporan Keuangan.....	29
2. Sampel Penelitian.....	68
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	71
4. Skor Skala <i>Likert</i> Modifikasi .....	72
5. Hasil Uji Validitas Instrumen.....	73
6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	75
7. Kategori Indikator Variabel.....	76
8. Karakteristik Data Penyebaran Kuesioner.....	85
9. Demografi Responden.....	85
10. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	87
11. Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas Keuangan.....	88
12. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Y.....	89
13. Distribusi Frekuensi Variabel Kesesuaian dengan SAP.....	90
14. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel $X_1$ .....	91
15. Distribusi Frekuensi Variabel Kecukupan Pengungkapan.....	92
16. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel $X_2$ .....	93
17. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan terhadap UU.....	95
18. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel $X_3$ .....	96
19. Distribusi Frekuensi Variabel Efektivitas Sistem Pengendalian Intern .....	97
20. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel $X_4$ .....	98
21. Hasil Uji Normalitas Data.....	99
22. Rangkuman Hasil Uji Linearitas.....	100
23. Hasil Uji Multikolinearitas.....	101
24. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	102
25. Rangkuman Hasil Regresi Hipotesis Pertama.....	103
26. Rangkuman Hasil Regresi Hipotesis Kedua .....	105
27. Rangkuman Hasil Regresi Hipotesis Ketiga.....	107
28. Rangkuman Hasil Regresi Hipotesis Keempat .....	110
29. Rangkuman Hasil Regresi Hipotesis Kelima.....	113



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian.....	60
2. Histogram Variabel Akuntabilitas Keuangan.....	89
3. Histogram Variabel Kesesuaian dengan SAP.....	91
4. Histogram Variabel Kecukupan Pengungkapan.....	93
5. Histogram Variabel Kepatuhan terhadap Undang-undang.....	95
6. Histogram Variabel Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.....	97

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. LKPD Kabupaten Temanggung TA 2014.....	138
2. LHP BPK atas LKPD Kabupaten Temanggung TA 2014.....	159
3. Kuesioner Uji Coba Penelitian.....	162
4. Data Uji Coba Instrumen.....	170
5. Data Hasil Uji Coba Instrumen.....	172
6. Hasil Uji Coba Instrumen.....	179
7. Kuesioner Penelitian .....	195
8. Data Penelitian.....	203
9. Uji Prasyarat Analisis.....	242
10. Data Deskriptif Statistik.....	244
11. Hasil Regresi .....	247
12. Tabel Statistika.....	250
13. Surat Ijin Penelitian.....	254

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistik, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Dalam menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung Tahun Anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan

kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat.

Besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. *World Bank* dalam Mardiasmo (2009: 18) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Kepemerintahan yang baik ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Sukhemi (2010) mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan dapat lebih *accountable* dan berkualitas. Sejalan dengan Mira Tania (2010) menyatakan bahwa laporan tahunan (laporan keuangan), meskipun

belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas. Ada dua tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan tahunan sektor publik yaitu *accountability* (akuntabilitas) dan *decision usefulness* (pengambilan keputusan).

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajiakan laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik, sedangkan untuk pemerintah daerah laporan keuangan tersebut digunakan sebagai alat penilai kinerja (Mardiasmo, 2009: 37).

Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan daerah, terjadi reformasi mendasar sejak berlakunya pembaruan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengharuskan kepala daerah untuk menyusun tujuh jenis laporan keuangan yang baru yaitu: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Komponen LKPD meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ukuran kualitas akuntabilitas keuangan pada pemerintah daerah dapat dilihat dari opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah. Hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012 di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 11 pemda yang sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sebanyak 25 Pemda

memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini atas LKPD Tahun Anggaran 2013, 4 pemda yang sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 6 pemda memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) dan sebanyak 26 Pemda memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada Tahun Anggaran 2014 relatif menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, hasil opini BPK atas penyajian LKPD di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan 6 pemda memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 6 pemda memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) dan 24 pemda memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Menurut Auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah, Ismiyati (2014) belum diperolehnya opini WTP dari BPK RI, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) Kelemahan sistem pengendalian intern; (2) Barang milik negara/daerah belum tertata dengan tertib; (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) Penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); dan (5) Kompetensi SDM pengelola keuangan masih kurang memadai.

Hasil opini BPK RI atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2012 dan 2013, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD masing-masing tahun tersebut. BPK menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten

Temanggung menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, realisasi anggaran, serta arus kas untuh tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAP 2005.

Hasil opini BPK RI atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Opini WTP pada dasarnya merupakan opini terbaik atas hasil penilaian LKPD dari BPK RI. Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu BPK harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. BPK menyatakan penyajian Aset yang tercantum di Neraca tanggal 31 Desember 2014, Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Lainnya telah dilakukan sensus namun masih perlu menindaklanjuti untuk menentukan kejelasan aset senilai Rp 9,65 miliar dan aset tetap pada daerah irigasi. Selain itu, sejak tahun 1995 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menggunakan aset milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI), atas penggunaan lahan tersebut PT. KAI mengenakan sewa yang jumlahnya belum disepakati oleh kedua belah pihak. Paragraf yang menjadi catatan tersebut apabila diperhatikan dapat berpotensi mempengaruhi opini BPK RI pada penyajian LKPD Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas penyajian LKPD Kabupaten Temanggung TA 2014, terdapat kurang saji atas Hutang kepada PT.



KAI. Aset milik PT. KAI sebanyak 14 bidang tanah dan bangunan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, biaya sewanya belum dibayar dari tahun 2002 sampai dengan 2014. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual Pernyataan No. 09 yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Permasalahan tersebut diketahui disebabkan oleh belum adanya kesepakatan nilai sewa antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan PT. KAI.

Kurang saji Hutang sewa atas penggunaan Aset milik PT. KAI merupakan indikasi terdapat kekurangan pada pengungkapan laporan keuangan. Penyebab permasalahan kurang saji Hutang sewa tersebut tidak diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengungkapan informasi yang disyaratkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah pengungkapan cukup. Informasi yang diungkapkan sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan terutama informasi yang menurut lembaga terkait wajib disajikan.

Temuan BPK atas penyajian LKPD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 mengindikasikan adanya kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan. BPK mengemukakan adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan antara lain pengelolaan dan pencatatan Aset Tetap dan Aset Lainnya kurang memadai, dan

Hutang kepada PT. KAI belum disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014. Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain terdapat kelebihan pembayaran atas sebelas pekerjaan pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp.940.827.564,49 dan jaminan pelaksanaan tidak dicairkan sebesar Rp.164.998.050,00.

Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2014 menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah merencanakan bahwa SAP berbasis akrual selambat lambatnya harus dilaksanakan pada tahun 2015. Selama rentang waktu tersebut diharapkan seluruh elemen pemerintahan berbenah untuk menyiapkan hal tersebut mulai dari mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, sistem informasi, dan pemerintah harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk melaksanakan SAP berbasis akrual (Irwan Ritonga, 2012).

Dalam rentang waktu singkat yaitu 4 tahun sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memahami konsep Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. Pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu aparatur pemda khususnya Pegawai bagian Keuangan, terkait konsep Akuntansi berbasis Akrual akan mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Aparatur pemda khususnya Pegawai bagian Keuangan tidak cukup hanya menguasai penatausahaan

anggaran melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan pemda. Kegagalan SDM pemda dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, umumnya pemda memiliki keterbatasan jumlah SDM yang menguasai logika akuntansi secara baik.

Sebagian besar aparatur pemda khususnya Pegawai bagian Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Temanggung memiliki latar belakang pendidikan non-Akuntansi. Banyaknya Pegawai dengan latar belakang non-akuntansi menjadi salah satu kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemda. Hal tersebut dapat berdampak pada kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemda mengadakan Pendampingan Implementasi AkruaI pada tahun 2013 kepada seluruh Pegawai bagian Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Temanggung. Namun, kegiatan tersebut belum mampu mamfasilitasi aparatur Pemda khususnya Pegawai bagian Keuangan dapat menguasai konsep AkruaI secara menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dalam rangka pertanggungjawaban APBN dapat dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Penyusunan LKPD Kabupaten Temanggung dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer yaitu Sistem Informasi

Akutansi Keuangan Daerah (SIKD) Kabupaten Temanggung. Proses rekapitulasi data dilakukan secara manual, sedangkan proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga penyajian laporan keuangan menggunakan SIAKD.

Perubahan SAP mengharuskan SIAKD berubah pula. Hingga tahun 2013 SIAKD Kabupaten Temanggung berbasis Kas, dimulai tahun 2014 SIAKD dibangun menggunakan basis Akrua. SIAKD dibangun pada saat bersamaan dengan implementasi penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Dalam proses penyusunan laporan keuangan terjadi perubahan dan perbaikan pada SIAKD Kabupaten Temanggung. Hal ini mengakibatkan banyak koreksi atas laporan keuangan SKPD.

Pemerintah Daerah sebagai organisasi sektor publik menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD. Publikasi atas laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi suatu keharusan. Namun, publikasi LKPD Kabupaten Temanggung melalui media masa seperti surat kabar maupun media *online* belum menjadi hal yang umum. Laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dapat tersedia secara langsung dan tidak dapat diakses masyarakat umum. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh kewajaran penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD di Kabupaten Temanggung. LKPD Pemkab Temanggung disajikan sesuai perundangan baru, yaitu Peraturan Pemerintah

Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua. Atas perubahan perundangan tersebut berdampak pada pengolahan dan penyajian laporan keuangan SKPD. Oleh karena itu judul yang diangkat dalam penelitian ini “Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Penurunan kualitas akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil opini BPK RI atas kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2012 dan 2013, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan Tahun Anggaran 2014 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)
3. Pada LKPD Kabupaten Temanggung, penyajian Aset yang tercantum di Neraca tanggal 31 Desember 2014, Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Lainnya telah dilakukan sensus namun masih perlu menindaklanjuti untuk menentukan kejelasan aset senilai Rp 9,65 miliar dan aset tetap pada daerah irigasi.

4. Terdapat temuan BPK bahwa sejak tahun 1995 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menggunakan aset milik PT. KAI, atas penggunaan lahan tersebut PT. KAI mengenakan sewa yang jumlahnya belum disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Keurang saji Hutang sewa Pemkab atas penggunaan Aset milik PT KAI merupakan ketidaksesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
6. Kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dipengaruhi pemahaman sumber daya manusia. Sedangkan sumber daya manusia khususnya Pegawai bagian Keuangan di SKPD Kabupaten Temanggung belum menguasai konsep AkruaI secara menyeluruh.
7. Penyebab permasalahan kurang saji Hutang sewa penggunaan Aset milik PT KAI tidak diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini mengindikasikan terdapat ketidakcukupan pengungkapan.
8. Terdapat ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain terdapat kelebihan pembayaran atas sebelas pekerjaan pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp.940.827.564,49 dan jaminan pelaksanaan tidak dicairkan sebesar Rp.164.998.050,00.
9. Terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan antara lain pengelolaan dan pencatatan Aset Tetap

dan Aset Lainnya kurang memadai, dan Hutang kepada PT. KAI belum disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014.

10. Banyak terjadi koreksi atas laporan keuangan SKPD karena SIAKD dibangun pada saat bersamaan dengan implementasi penyajian laporan keuangan berbasis akrual.

11. Publikasi LKPD Kabupaten Temanggung melalui media masa maupun media *online* masih minim.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini terdapat pembatasan masalah agar hasil yang didapat terfokus dan terhindar dari penafsiran yang tidak diharapkan. Penelitian ini dititikberatkan pada permasalahan terkait penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yaitu “Pengaruh kewajaran penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan”. Kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah dibatasi pada kriteria kewajaran yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang termuat dalam Peraturan Standar Pemeriksaan (PSP) No. 03 BPK RI yaitu kewajaran menurut aspek (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); (2) Kecukupan Pengungkapan; (3) Kepatuhan terhadap Perundang-undangan; dan (4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Penelitian dilakukan pada bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Temanggung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Akuntabilitas Keuangan?
2. Bagaimana pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Kecukupan Pengungkapan terhadap Akuntabilitas Keuangan?
3. Bagaimana pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Kepatuhan pada Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Keuangan?
4. Bagaimana pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan?
5. Bagaimana pengaruh kewajaran penyajian laporan keuangan ditinjau dari aspek kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan pada Perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Keuangan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:



1. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Akuntabilitas Keuangan
2. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Kecukupan Pengungkapan terhadap Akuntabilitas Keuangan
3. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Kepatuhan pada Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Keuangan
4. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan
5. Pengaruh kewajaran penyajian laporan keuangan ditinjau dari aspek kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan pada Perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Keuangan

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi daerah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan akan pengelolaan keuangan daerah terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta penyajian laporan keuangan.

2. Bagi pemerintah daerah yang menjadi lokasi penelitian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah
3. Bagi masyarakat atau publik, penelitian ini sebagai bahan informasi mengenai sejauh mana akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Akuntabilitas Keuangan**

Hapsari (2010) menjelaskan fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

##### **a. Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Abdul Halim (2014: 39) akuntabilitas memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, akuntabilitas menghatuskan tiap badan yang mengelola keuangan Negara harus memberikan pertanggungjawaban atau

perhitungan. Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu badan.

Menurut Mardiasmo (2009: 20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana, pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: (1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan (2)

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

b. Akuntabilitas Keuangan

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Tahun 2010 akuntabilitas merupakan bentuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2011:14), akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan perundangundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Menurut Abdul Halim (2014) akuntabilitas keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai evaluasi tahun berikutnya. Menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Pasal 4 dalam

Akuntabilitas Keuangan yaitu:

Pengelolaan keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Abdul Halim (2014) akuntabilitas yang efektif mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggung jawab terhadap pokok dan fungsi instansi, serta program pembangunan yang dipercayakan kepadanya termasuk pelayanan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang berada dibawah wewenangnya).
- 2) Mencakup aspek yang menyeluruh mengenai aspek integritas keuangan, ekonomis, efisien, dan sesuai prosedur.
- 3) Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kinerja maupun unit instansi.
- 4) Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, untuk menjamin keabsahan, objektivitas dan ketepatan waktu penyampaian informasi.
- 5) Adanya penilaian yang efektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu instansi.
- 6) Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas.

c. Indikator Akuntabilitas Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, akuntabilitas keuangan dapat diukur berdasarkan kriteria berikut:

- 1) Secara tertib maksudnya adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- 3) Efektif merupakan hasil pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- 4) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- 5) Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- 6) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- 7) Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- 8) Keadilan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.

## 2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

### a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2009: 159) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai, posisi keuangan, kinerja perusahaan/organisasi, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lain yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode akuntansi dari suatu kesatuan usaha.

Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Mahmudi (2011: 143) definisi laporan



keuangan yaitu laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

b. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawab dan pengelolaan (Mardiasmo, 2009).

Menurut PSAK (2012) tujuan laporan keuangan yaitu untuk tujuan umum adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam Mardiasmo (2009:167) sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, *Financial Accounting Standards Board* (FASB, 1980) mengeluarkan *Statement of Financial Accounting Concepts No.4* (SFAC 4) mengenai tujuan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (*objectives of financial reporting by nonbusiness organizations*).

Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah:

- 1) Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
- 2) Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan tersebut.
- 3) Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan serta aspek keinerja lainnya.
- 4) Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
- 5) Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan

keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi tersebut.

- 6) Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atas sumber daya kas, mengenai hutang dan pembayaran kembali hutang, dan mengenai factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
- 7) Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

c. Pelaku Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Irwan Ritonga (2012: 12) pelaku akuntansi keuangan daerah meliputi pelaku akuntansi pada entitas pelaporan (level Pemerintah daerah) dan pelaku akuntansi pada entitas akuntansi (level Satuan Kerja Perangkat Daerah). Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerinatah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintah pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas keuangan.

- 1) Pelaku Akuntansi pada Entitas Pelaporan (Level Pemerintah Daerah)
  - a) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dalam bidang akuntansi, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertugas melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan menyajikan informasi keuangan daerah.

2) Pelaku akuntansi pada Entitas Akuntansi (Level Satuan Kerja Perangkat Daerah)

a) Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan dan menyampaikan pada entitas yang lebih tinggi melalui PPKD

b) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Dalam

bidang akuntansi, PPK-SKPD mempunyai tugas menyiapkan laporan keuangan SKPD.

d. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan untuk lingkup pemerintah daerah meliputi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan SKPD yang disusun dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan paragraf 28 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan SAP Berbasis Akrual dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas
- 6) Laporan Arus Kas
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini, sebenarnya sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menginstruksikan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni, namun diperkenankan penerapan basis kas menuju akrual sampai dengan tahun 2015. Terdapat perbedaan dalam komponen laporan keuangan berdasarkan SAP Berbasis Akrual dengan SAP sebelumnya yaitu SAP Berbasis Kas menuju Akrual, yaitu:

Tabel 1. Perbedaan Komponen Laporan Keuangan

PP No. 24 Tahun 2005	PP No. 71 Tahun 2010
(Basis Kas menuju Akrual)	(Basis Akrual)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</li> <li>• Neraca</li> <li>• Laporan Arus Kas</li> <li>• Catatan Atas Laporan Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</li> <li>• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih</li> <li>• Neraca</li> <li>• Laporan Operasional</li> <li>• Laporan Perubahan Ekuitas</li> <li>• Laporan Arus Kas</li> <li>• Catatan Atas Laporan Keuangan</li> </ul>

Sumber: Irwan Ritonga (2012)

#### 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pengertian laporan realisasi anggaran menurut Indra Bastian (2010) adalah Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Sedangkan pengertian laporan realisasi anggaran menurut Abdul Halim (2014) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dan mebandingkan anggaran dengan realisasi dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran menurut Mahmudi (2011) dapat dikelompokkan menjadi enam bagian yaitu:

- a) Pendapatan, pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen yaitu: Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain lain pendapatan yang sah.
- b) Belanja, Pos belanja diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.
- c) Tranfer, transfer pada umumnya juga merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah. Untuk pemerintah provinsi pengeluaran transfer berupa transfer/bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota. Untuk pemerintah kabupaten/kota pengeluaran transfer berupa transfer/ bagi hasil pendapatan ke desa.
- d) Surplus/defisit, selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/defisit.
- e) Pembiayaan, pembiayaan dikategorikan menjadi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.



f) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran.

2) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL)

Laporan perubahan SAL merupakan salah satu laporan yang sebelumnya tidak ada dalam laporan keuangan pokok pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya atau sumber dana yang digunakan untuk menutup Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun lalu, sehingga tersaji sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan.

3) Neraca Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai *asset*, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Selanjutnya di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 85 Ayat mengemukakan Posisi aktiva sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk

pada pengertian aktiva sumber daya seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi *asset* nasional.

Tujuan neraca adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan daerah pada saat tertentu, biasanya pada akhir tahun anggaran. Posisi keuangan daerah adalah keadaan *asset*, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki pemerintah daerah pada akhir periode akuntansi. Menurut Mahmudi (2011) unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal

pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

#### 4) Laporan Operasional (LO)

Sebagai konsekuensi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, maka Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mensyaratkan bagi entitas pelaporan untuk menyajikan Laporan Operasional sebagai bagian dari pelaporan finansial pada laporan keuangan pokok pemerintah. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari:

- a) Pendapatan – LO dari kegiatan operasional
- b) Beban dari kegiatan operasional
- c) Surplus/ defisit dari kegiatan non-operasional (bila ada)
- d) Pos luar biasa (bila ada)
- e) Surplus/ defisit – LO

#### 5) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang baru wajib disajikan oleh entitas pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE merupakan laporan yang menghubungkan antara LO dan Neraca, sehingga penyusunan LO, LPE, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LPE sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos berikut:

- a) Ekuitas awal
  - b) Surplus/ defisit – LO periode bersangkutan
  - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
  - d) Ekuitas akhir
- 6) Laporan Aliran Kas

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 81 mengatakan laporan aliran kas menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan aliran arus kas dapat disusun dengan metode langsung maupun tidak langsung. Tujuan laporan aliran kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam suatu periode akuntansi.

Laporan aliran kas menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas daerah dalam suatu periode akuntansi tahun berkenaan. Laporan aliran kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan aktifitas operasi, investasi dan pembiayaan. Unsur yang dicakup dalam laporan aliran kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

Laporan arus kas dibagi dalam empat aktivitas utama yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan dan arus kas dari aktivitas non anggaran (Mahmudi, 2011).

#### 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Menurut Bastian (2009) Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN atau Peraturan Daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas

pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, dan

- f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

Mahmudi (2011) menjelaskan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan penjelasan secara lebih rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen neraca, laporan realisasi anggaran maupun laporan arus kas. Bagi para pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Catatan atas Laporan Keuangan ini sangat penting untuk dibaca dan dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan yang disajikan tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pemerintahan. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal (Irwan Ritonga, 2012). Sebagai unit pemerintah pengguna anggaran, SKPD berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran SKPD. Laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi:

- 1) Neraca – SKPD
- 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) – SKPD
- 3) Laporan Operasional (LO)– SKPD
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### 3. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK Nomor 1 Tahun 2012 penyajian laporan keuangan secara wajar yaitu:

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2010). Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Hapsari, 2007).

Agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada saat ini, pemerintah di Indonesia sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan



prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Di dalamnya terdapat kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang memuat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Karakteristik kualitatif itu dapat diartikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas laporan keuangan yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Penilaian kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya berdasarkan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah yang ada. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang sekarang telah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. KSAP merupakan salah satu kompartemen yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan.

Diana Sari (2012) menjelaskan di Indonesia pemeriksaan menurut amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara meliputi tiga jenis

yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

Representasi kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan mempertimbangkan kriteria berikut:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- b. Kecukupan pengungkapan
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- d. Efektivitas pengendalian internal.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas empat jenis opini (BPK, 2008). Opini tersebut yakni, opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), opini Tidak Wajar (*adverse opinion*) dan pernyataan menolak memberi opini (*disclaimer opinion*). Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Selain opini WTP, terdapat opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporannya.

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Opini Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) bukanlah merupakan sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Mahmudi, 2011). Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Menurut Abdul Halim (2014) salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang memenuhi prinsip tepat waktu, dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan.

SAP dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut PSAP. PSAP tersebut dilengkapi dengan Interpretasi Standar Pernyataan Akuntansi Pemerintah (IPSAP), yang merupakan klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP serta dilengkapi pula dengan bulletin teknis. Bulletin teknis merupakan informasi yang diterbitkan oleh komite standar akuntansi pemerintah yang memberikan arahan atau pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi permasalahan akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah bagi komite standar akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksaan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual, laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan SAP apabila memenuhi kriteria berikut:

1) Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar

Menurut Abdul Halim (2014) asumsi dasar dalam laporan keuangan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, asumsi dasar dalam laporan keuangan terdiri dari:

- a) Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berbti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antara unit instansi pemerintah dan pelaporan keuangan
- b) Asumsi kesinambungan entitas, laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
- c) Asumsi kerukunan dalam satuan uang, laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

2) Laporan keuangan memuat karakteristik laporan keuangan

Karakteristik laporan keuangan menurut Abdul Halim (2014) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun keempat karakteristik tersebut adalah:

- a) Relevan, Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi dalam laporan keuangan termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan.
  - b) Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material.
  - c) Dapat dibandingkan, informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya dan laporan keuangan instansi lain.
  - d) Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh penggunaannya.
- 3) Berdasarkan Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksud sebagai ketentuan yang dapat dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya.
  - 4) Penyajian Unsur laporan keuangan, laporan keuangan dalam suatu entitas harus menyajikan unsur laporan keuangan sesuai dengan kegiatan entitas pelaporannya.
- b. Kecukupan Pengungkapan Laporan keuangan

Pengungkapan informasi yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu tujuan pelaporan keuangan. Tingkat transparansi dan

akuntabilitas atas pengungkapan laporan keuangan ditentukan oleh suatu ukuran yang berlaku secara umum dan reliabel. Dalam kerangka konseptual SAP, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan sebenarnya.

Cakupan informasi dipengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan. Terdapat tiga konsep dalam tingkat pengungkapan, antara lain (Hendriksen, 2002):

- 1) Pengungkapan cukup (*adequate disclosure*) adalah pengungkapan informasi oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi kewajiban dalam menyampaikan informasi. Informasi yang diungkapkan sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan terutama informasi yang menurut lembaga terkait wajib disajikan. Pengungkapan jenis ini banyak dilakukan oleh perusahaan.
- 2) Pengungkapan wajar (*fair disclosure*) adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyajikan sejumlah informasi yang menurut perusahaan dapat memuaskan pengguna Laporan Keuangan yang potensial

3) Pengungkapan lengkap (*full disclosure*) adalah pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan. Informasi yang diungkapkan adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi lain yang diungkapkan secara suka rela. *Full disclosure* dapat membantu mengurangi terjadinya informasi asimetris, namun seringkali dinilai berlebihan

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kecukupan pengungkapan merupakan penyajian informasi relevan yang melengkapi penyajian informasi keuangan. Informasi dikatakan “cukup” apabila ketiadaan informasi tersebut mengakibatkan pengguna laporan keuangan salah mengambil keputusan. Kecukupan pengungkapan tidak ditentukan dari banyaknya informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 ayat (1) adalah pengungkapan yang cukup, dimana laporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang wajib disajikan berdasarkan SAP. Salah satu komponen pokok dalam laporan keuangan adalah catatan atas laporan keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKPD digunakan sebagai alat ukur tingkat pengungkapan pemerintah daerah (Dyah Setyaningrum, 2012).

Indikator kecukupan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dilihat berdasarkan informasi yang dimuat dalam Catatan atas



Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah dalam CaLK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/ Perda APBD.
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- 5) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.
- 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

Berdasarkan PSAK No 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, informasi yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi:

- 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan
- 2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan
- 3) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan
- 4) Pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK dan ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.
- 5) Menyajikan informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan keuangan.

c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, taat, tunduh, patuh pada aturan atau ajaran.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan selanjutnya diatur dalam Peraturan BPK RI Nomor 07 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Pemerintah Daerah dalam menjalankan

otonomi daerahnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses penyusunan laporan keuangan hingga penyajian LKPD. BPK sebagai pemeriksa laporan keuangan pemerintah mengisyaratkan keharusan penyajian laporan keuangan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan yang mempengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan peraturan yang terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan yang terkait penyajian Laporan Keuangan, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Tidak semua ketidaksesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan menjadi pertimbangan dalam pemberian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketidakpatuhan dan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyajian laporan keuangan akan diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan.

Indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merujuk pada regulasi yang mengatur penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain (BPK, 2008):

- 1) Ketentuan penyajian informasi keuangan secara bruto (asas bruto)
- 2) Ketentuan bahwa belanja merupakan pagu maksimal dan pendapatan adalah target yang harus dicapai
- 3) Ketentuan pengungkapan bahwa penjelasan atas selisih anggaran dan realisasi yang signifikan
- 4) Ketentuan penerimaan dan pengeluaran kas harus diadministrasikan dalam anggaran

#### d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian dipenuhi (Romney dan Steinbart, 2014:226). Sistem terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode pengendalian

yang dianut oleh bagian keuangan, tetapi meliputi pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa intern. Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan untuk digunakan dalam entitas dengan tujuan untuk menjaga keamanan aset milik entitas, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Pengendalian intern pada pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset Negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (BPK, 2014)

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output* (Mardiasmo, 2009:3). Efektivitas menitikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi dapat dicapai,

sehingga efektivitas merupakan derajat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah tingkat keberhasilan sistem pengendalian intern sesuai target yang ditetapkan. Dalam penyajian laporan keuangan, Efektivitas SPI merupakan ketercapaian proses dan prosedur yang digunakan untuk menjaga keamanan aset milik pemerintah, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi dan kepatuhan pada kebijakan manajemen dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Efektivitas sistem pengendalian intern dibuktikan dengan penyajian informasi keuangan secara wajar dan cukup dalam laporan keuangan. Efektivitas SPI dapat ditentukan apabila sistem tersebut telah berjalan. Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang di desain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadahi dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, sebagai berikut:

- 1) Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- 2) Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan

pemungutan dan penyetoran penerimaan daerah serta pelaksanaan kegiatan pada entitas

- 3) Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada / tidaknya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern dalam entitas

Indikator efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Badan Pemeriksa Keuangan No. 03.01, yakni:

- 1) Pengendalian pencatatan akuntansi
- 2) Pengendalian pelaporan keuangan
- 3) Pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
- 4) Struktur pengendalian intern

## **B. Penelitian yang Relevan**

1. Putu Sri Wahyuni (2014) dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi empiris pada pemerintahan Kabupaten Bandung)”.

Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 35 SKPD yang terdiri dari 15 Dinas, 6 Badan, 1 Inspektorat, 2 Sekretariat, 1 RSUD, 4 kantor, 6 Kecamatan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 70 orang. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan dan positif secara parsial dan simultan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah variabel terikat yang dipilih yaitu, akuntabilitas keuangan daerah dan variabel bebas yang digunakan yaitu, penyajian laporan keuangan daerah. Variabel bebas tersebut dimodifikasi dengan adanya penilaian kewajaran atas penyajian laporan keuangan daerah. Metode pengumpulan data dengan menyebar kuesioner. Perbedaan dari penelitian ini adalah subjek, objek, tempat dan waktu penelitian. Variabel bebas dari penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, penulis modifikasi menjadi kewajaran penyajian laporan keuangan. Selain itu, perbedaan teknik analisa, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis berganda, uji t, dan uji f.

2. Surya Metta Silany (2013) dengan judul “Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah: (Studi Kasus pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung)”.

Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 17 Dinas Pemerintah Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah secara parsial memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan pengawasan intern secara parsial memberikan pengaruh yang kuat terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Secara simultan penyajian neraca daerah dan pengawasan intern memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan arah yang positif artinya jika penyajian neraca daerah dan



pengawasan intern meningkat maka akuntabilitas akan mengalami peningkatan dan juga sebaliknya.

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah variabel terikat yang dipilih yaitu, akuntabilitas keuangan daerah. Perbedaan dari penelitian ini adalah subjek, objek, tempat dan waktu penelitian. Variabel bebas dari penelitian ini adalah penyajian neraca daerah dan pengawasan intern, penulis modifikasi menjadi kewajaran penyajian laporan keuangan. Selain itu, perbedaan teknik analisa, pengujian statistik yang digunakan adalah korelasi pearson, metode alternatif partial least square, pengujian hipotesis dan menggunakan aplikasi software SmartPLS 2.0.

3. [Saufi Iqbal Nasution](#) (2010) dengan judul “Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara”.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah assosiatif kausal. Metode pengambilan sample yang digunakan penulis adalah simple random sampling. Hasil dari penelitian tersebut bahwa variabel penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah variabel terikat yang dipilih yaitu, akuntabilitas keuangan daerah. Selain itu, persamaan pada teknik pengumpulan data, pengujian instrumen

penelitian, dan teknik analisis data. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pembagian kuesioner. Pengujian Asumsi klasik yang digunakan peneliti meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Sedangkan model penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan analisis statistik persamaan Regresi Linear Berganda, adapun pengujian hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi simultan, uji signifikansi parsial, dan koefisien determinan. Perbedaan dari penelitian ini adalah subjek, objek, tempat dan waktu penelitian. Variabel bebas dari penelitian ini adalah penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD, penulis modifikasi menjadi kewajaran penyajian laporan keuangan.

### **C. Kerangka Berpikir**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai suatu informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability* dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu organisasi/instansi dalam mencapai tujuannya. Kewajaran penyajian laporan keuangan meliputi kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap Undang-Undang, dan efektifitas sistem pengendalian internal. Hubungan antara kewajaran penyajian laporan keuangan dengan akuntabilitas keuangan, yakni:

1. Pengaruh aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap akuntabilitas keuangan

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berubah dari berbasis kas menjadi berbasis akrual. SAP memuat ketentuan penyusunan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban entitas atas penggunaan anggaran kepada masyarakat dan legislator. Atas pertanggungjawaban tersebut maka laporan keuangan harus berterima umum dengan sesuai standar yang berlaku. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berterima umum memfasilitasi terciptanya akuntabilitas keuangan. Sebaliknya, apabila penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah akan dapat menurunkan akuntabilitas keuangan.

2. Pengaruh aspek kecukupan pengungkapan terhadap akuntabilitas keuangan

Kecukupan pengungkapan merupakan pengungkapan informasi relevan yang melengkapi penyajian informasi keuangan. Informasi dikatakan “cukup” apabila ketiadaan informasi tersebut mengakibatkan

pengguna laporan keuangan salah mengambil keputusan. Kecukupan pengungkapan tidak ditentukan dari banyaknya informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan terutama informasi yang menurut lembaga terkait wajib disajikan.

Akuntabilitas keuangan dapat tercipta melalui pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna terkait pengambilan keputusan. Ketidacukupan pengungkapan dapat mengakibatkan pengguna salah dalam mengambil keputusan. Hal tersebut menjadi bukti kurangnya akuntabilitas keuangan atas laporan keuangan tersebut. Sebaliknya, apabila laporan keuangan telah cukup dalam pengungkapannya, maka dapat tercipta akuntabilitas keuangan.

### 3. Pengaruh aspek kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi salah satu kriteria kewajaran penyajian laporan keuangan. Peraturan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi opini pemeriksa adalah peraturan terkait dengan penyajian laporan keuangan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat berdampak pada salah saji dalam laporan keuangan. Lebih lanjut, akan menurunkan kualitas laporan keuangan yang berdampak pada opini kewajaran oleh BPK yang akan diterima atas laporan keuangan tersebut.

Penyajian laporan keuangan secara wajar merupakan salah satu bentuk akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan dapat tercipta melalui penyajian laporan keuangan secara wajar. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu cara menyajikan laporan keuangan secara wajar. Sehingga, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

4. Pengaruh aspek efektivitas sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan

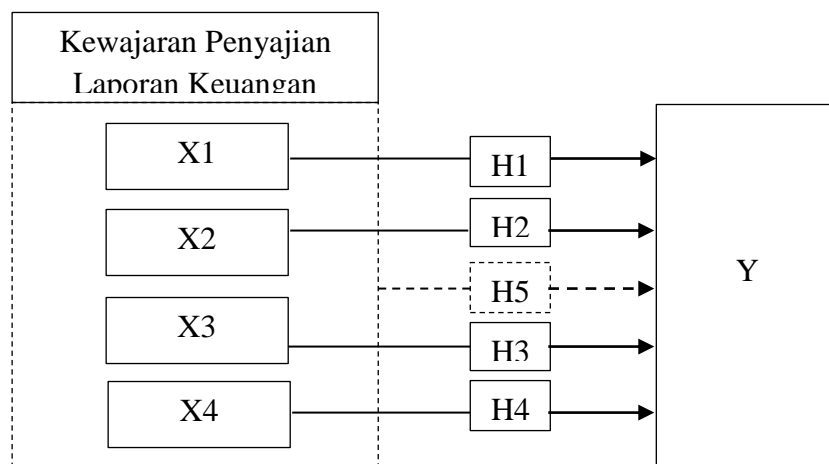
Efektivitas sistem pengendalian internal sebuah entitas adalah apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset Negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keandalan laporan keuangan dapat tercipta jika sistem pengendalian internal berjalan dengan efektif. Sebaliknya, apabila sistem pengendalian internal lemah akan berpengaruh pada efektivitas sistem tersebut untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar dan cukup.

Kewajaran dan kecukupan laporan keuangan merupakan syarat terciptanya akuntabilitas keuangan. Dengan sistem pengendalian internal yang efektif, laporan keuangan dapat disajikan wajar dan cukup. Hal tersebut akan berdampak pada akuntabilitas keuangan. Namun

sebaliknya, sistem pengendalian internal lemah akan berpengaruh pada kewajaran dan kecukupan penyajian laporan keuangan.

#### D. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel terikat akuntabilitas keuangan dan variabel bebas kewajaran penyajian laporan keuangan. Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

- X1 : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- X2 : Kecukupan Pengungkapan
- X3 : Kepatuhan terhadap Perundang-undangan
- X4 : Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
- Y : Akuntabilitas Keuangan
- H1 : Hipotesis Pertama
- H2 : Hipotesis Kedua
- H3 : Hipotesis Ketiga

- H4 : Hipotesis Keempat
- H5 : Hipotesis Kelima
- ▶ : Pengaruh secara parsial kewajaran penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan
- ▶ : Pengaruh secara simultan kewajaran penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan

### **E. Hipotesis Penelitian**

Sugiyono (2015:79) menjelaskan bahwa hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1: Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan
- H2: Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan
- H3: Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari Aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan
- H4: Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan

H5: Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan ditinjau dari aspek Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan.



### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Temanggung pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Temanggung. Objek dalam penelitian ini adalah Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan yang terdiri atas aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Temanggung. Proses penelitian telah dilakukan pada bulan Februari - Maret 2016

#### **B. Desain Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei. Survei dapat memberikan manfaat untuk tujuan-tujuan deskriptif, membantu dalam hal membandingkan kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu secara alamiah yang menggambarkan suatu variabel, gejala atau kejadian yang apa adanya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya.

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel. Apabila dilihat dari karakteristiknya, penelitian ini termasuk pada penelitian kausal-komparatif yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab

akibat antara dua variabel atau lebih. Tujuan dari penelitian kausal komparatif adalah untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dan menyelidiki hubungan sebab akibat.

### **C. Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan empat variabel independen.

#### **1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)**

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2007: 116). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Keuangan.

#### **2. Variabel Bebas (Variabel Independen)**

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahannya atau timbulnya variabel terikat, baik secara positif atau negatif (Sekaran, 2007: 116). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terdiri dari 4 aspek yaitu aspek Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (BPK, 2008).

#### **D. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional dari masing-masing variabel pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Y)**

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan tentang pengelolaan keuangan SKPD. Akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban perangkat daerah dalam menyajikan laporan keuangan

SKPD (Mardiasmo, 2009)

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Indikator tersebut adalah tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, dan keadilan.

##### **2. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah ( $X_1$ )**

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah adalah penyajian laporan keuangan pemerintah disusun sesuai dengan SAP yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berubah dari berbasis kas

menjadi berbasis akrual. SAP memuat ketentuan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah diukur menggunakan indikator dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Indikator tersebut adalah berdasarkan asumsi dasar, memuat karakteristik laporan keuangan, berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, dan memuat unsur – unsur laporan keuangan.

### 3. Kecukupan Pengungkapan ( $X_2$ )

Kecukupan pengungkapan merupakan penyajian informasi relevan yang melengkapi penyajian informasi keuangan. Informasi dikatakan “cukup” apabila ketiadaan informasi tersebut mengakibatkan pengguna laporan keuangan salah mengambil keputusan. Kecukupan pengungkapan tidak ditentukan dari banyaknya informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan.

Kecukupan pengungkapan diukur menggunakan indikator berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Indikator kecukupan pengungkapan diukur berdasarkan informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sehingga indikator kecukupan pengungkapan adalah informasi tentang kebijakan, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih, informasi wajib sesuai SAP, informasi pos-pos aset dan kewajiban, dan informasi tambahan.

#### 4. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan ( $X_3$ )

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan terkait penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Indikator Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan menurut BPK dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 03.01 adalah Ketentuan penyajian informasi keuangan secara bruto (asas bruto), ketentuan bahwa belanja merupakan pagu maksimal dan pendapatan adalah target yang harus dicapai, ketentuan pengungkapan bahwa penjelasan atas selisih anggaran dan realisasi yang signifikan, dan ketentuan penerimaan dan pengeluaran kas harus diadministrasikan dalam anggaran

#### 5. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern ( $X_4$ )

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah tingkat keberhasilan sistem pengendalian intern sesuai target yang ditetapkan. Dalam penyajian laporan keuangan, Efektivitas SPI merupakan ketercapaian proses dan prosedur yang digunakan untuk menjaga keamanan

aset milik pemerintah, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi dan kepatuhan pada kebijakan manajemen dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Efektivitas sistem pengendalian intern dibuktikan dengan penyajian informasi keuangan secara wajar dan cukup dalam laporan keuangan.

Efektivitas SPI diukur menggunakan indikator Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Badan Pemeriksa Keuangan No. 03.01. Indikator tersebut adalah pengendalian pencatatan akuntansi, pengendalian pelaporan keuangan, pengendalian pemungutan dan penyetoran penerimaan daerah, pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan struktur pengendalian intern.

#### **E. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah totalitas nilai yang merupakan hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif atau kualitatif dan karakteristik tertentu atau sekumpulan objek yang lengkap dan jelas sifatnya. Menurut Sugiono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Temanggung yang berjumlah 72 SKPD. Populasi sasaran yang dipilih berdasarkan lokasi penelitian sebanyak 228 responden.

Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2014: 68). Adapun pertimbangan yang ditentukan oleh penulis dalam pengambilan sampel

adalah Pegawai bagian Keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan pada tiap entitas akuntansi keuangan daerah dan jika terdapat rangkap jabatan tidak lebih dari 1. Kualifikasi Pegawai penyusun laporan keuangan SKPD dalam penelitian ini adalah:

1. Pejabat Pengelola Keuangan (PPK)
2. Bendahara Umum/ Kas
3. Pencatat Pembukuan
4. Pembuat Dokumen

Tabel 2. Sampel Penelitian

No	SKPD	Jumlah Sampel
	<b>Kedinasan</b>	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4
2	Dinas Kesehatan	4
3	Dinas Pekerjaan Umum	4
4	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	4
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4
6	Dinas Sosial	4
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4
8	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	4
9	Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4
10	Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan	4
11	Dinas Peternakan dan Perikanan	4
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	4
	<b>Badan</b>	
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	4
14	Badan Kepegawaian Daerah	4
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4
16	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4
17	Badan Penyuluhan	4
	<b>Kantor</b>	
18	Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	4
19	Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja	4
20	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	4
21	Kantor Arsip dan Perpustakaan	4
22	<b>Sekretariat Daerah</b>	4
23	<b>Sekretariat DPRD</b>	4
24	<b>Inspektorat</b>	4

Lanjutan Tabel 2. Sampel Penelitian

No	SKPD	Jumlah Sampel
	<b>Kecamatan</b>	
25	Kecamatan Temanggung	4
26	Kecamatan Pringsurat	4
27	Kecamatan Bulu	4
28	Kecamatan Parakan	4
29	Kecamatan Kedu	4
30	Kecamatan Jumo	4
31	Kecamatan Ngadirejo	4
32	Kecamatan Candirotto	4
33	Kecamatan Gemawang	4
34	Kecamatan Kandangan	4
	<b>Kelurahan</b>	
35	Kelurahan Temanggung 1	3
36	Kelurahan Temanggung 2	3
37	Kelurahan Jampiroso	3
38	Kelurahan Kertosari	3
39	Kelurahan Kowangan	3
40	Kelurahan Madureso	3
41	Kelurahan Kebonsari	3
42	Kelurahan Banyuurip	3
	<b>Jumlah</b>	<b>168</b>

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2014:196), teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan (*questionnaire*) yang diberikan kepada Pegawai bagian Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Temanggung. Kuesioner akan dibagikan secara langsung kepada responden untuk diisi sesuai dengan petunjuk yang ada dan kemudian dikembalikan kepada peneliti untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan metode yang sesuai untuk membuktikan hipotesis yang dibuat.



## G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen angket atau kuesioner. Data dikumpulkan dari para responden dengan menggunakan kuesioner dengan Skala *Likert* modifikasi yang digunakan untuk mengukur Akuntabilitas Keuangan, Kesesuaian terhadap SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Menurut Sutrisno Hadi (2004: 19), Skala *Likert* merupakan skala yang berisi lima tingkat jawaban mengenai kesetujuan responden terhadap pernyataan yang dikemukakan mendahului opsi jawaban yang disediakan. Modifikasi skala likert dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan yang dikandung oleh skala lima tingkat. Skala *Likert* modifikasi yang digunakan dalam penelitian ini berdimensi empat. Alasan memilih Skala *Likert* modifikasi berdimensi empat karena untuk menghindari adanya kecenderungan responden menjawab netral terutama bagi responden yang ragu-ragu pada pilihan jawabannya dan untuk melihat kecenderungan responden ke arah setuju atau tidak setuju serta sangat sering atau sangat jarang.

Pilihan jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) digunakan untuk mengukur variabel Kesesuaian terhadap SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Khusus untuk indikator variabel Akuntabilitas Keuangan pilihan jawabannya yaitu

Sangat Sering (SS), Sering (S), Jarang (J), dan Sangat Jarang (SJ). Kisi-kisi instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Referensi
1	Kesesuaian dengan SAP	a. Berdasarkan asumsi dasar b. Memuat karakteristik laporan keuangan c. Berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan d. Memuat unsur – unsur laporan keuangan	PP No. 71 Tahun 2010
2	Kecukupan Pengungkapan	a. Informasi tentang kebijakan b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan c. Dasar penyusunan laporan keuangan d. Kebijakan-kebijakan akuntansi e. Informasi wajib sesuai SAP f. Informasi pos-pos aset dan kewajiban g. Informasi tambahan	PP Nomor 71 Tahun 2010
3	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	a. Ketentuan penyajian informasi keuangan secara bruto (asas bruto) b. Ketentuan bahwa belanja merupakan pagu maksimal dan pendapatan adalah target yang harus dicapai c. Ketentuan pengungkapan bahwa penjelasan atas selisih anggaran dan realisasi yang signifikan d. Ketentuan penerimaan dan pengeluaran kas harus diadministrasikan dalam anggaran	Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 03.01
4	Efektivitas SPI	a. Pengendalian pencatatan akuntansi b. Pengendalian pelaporan keuangan c. Pengendalian pemungutan dan penyetoran penerimaan daerah d. Pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja e. Struktur pengendalian intern	Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 03.01
5	Akuntabilitas Keuangan	a. Tertib b. Taat pada peraturan perundang-undangan c. Efektif d. Efisien e. Ekonomis f. Transparan g. Bertanggungjawab h. Keadilan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Skor untuk setiap butir pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Skor Skala *Likert* Modifikasi

Indikator	Positif	Negatif
Sangat Setuju (SS)	4	1
Setuju (S)	3	2
Tidak Setuju (TS)	2	3
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	4
Sangat Sering (SS)	4	1
Sering (S)	3	2
Jarang (J)	2	3
Sangat Jarang (SJ)	1	4

## H. Hasil Uji Coba Instrumen

Penggunaan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan, maka diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi valid dan reliabel. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, otomatis hasil (data) penelitian menjadi valid dan reliable. Uji coba instrumen dilakukan pada 30 Pegawai bagian Keuangan dari 14 SKPD di luar sampel penelitian. Berikut hasil dari uji coba instrumen tersebut:

### 1. Hasil Uji Validitas Instrumen

Uji validitas dilakukan untuk mengukur pertanyaan yang ada dalam kuesioner atau pertanyaan yang dianggap sah jika pertanyaan tersebut mampu mengungkap apa yang ingin diukur. Menurut Sugiono (2014) instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur.

Uji validitas data dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pertanyaan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi dalam koefisien korelasi.

Untuk pengujian validitas alat ukur digunakan rumus *Pearson Product*

*Moment* adalah:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{(N\sum X^2) - (\sum X)^2\}\{(N\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

- $r_{xy}$  = Koefisien korelasi product moment
- N = Jumlah responden
- X = Skor butir item tertentu
- Y = Skor total
- $\sum X$  = Jumlah skor butir
- $\sum Y$  = Jumlah skor total
- $\sum XY$  = Perkalian skor butir dan skor total
- $\sum X^2$  = Jumlah kaudrat skor butir
- $\sum Y^2$  = Jumlah kaudrat skor total

(Husein Umar, 2011: 131)

Analisis dilakukan dengan mengorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Uji coba validitas instrumen dilakukan dengan membandingkan antara nilai r hitung dan r tabel. Kriteria dikatakan valid jika koefisien r hitung melebihi atau sama dengan 0,3 r tabel (Sugiyono, 2010: 181). Hasil uji validitas untuk setiap variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Nomor Butir Valid	Nomor Butir Tidak Valid
Kesesuaian terhadap SAP	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	-
Kecukupan Pengungkapan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	-
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	-
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-
Akuntabilitas Keuangan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	7 dan 11

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

(Hasil *Output* SPSS pada Lampiran 6)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, untuk seluruh butir pernyataan variabel Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern adalah valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Pada butir pernyataan variabel Akuntabilitas Keuangan terdapat 2 pernyataan yang tidak valid yaitu pernyataan nomor 7 dan 11. Butir pernyataan nomor 7 dan 11 tersebut tidak akan digunakan, sedangkan butir pernyataan lainnya dapat digunakan.

## 2. Hasil Uji Reabilitas Instrumen

Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya atau reliabel hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuisioner adalah dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*. Instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbrach's Alpha*  $\geq 0,60$  (Sugiyono, 2010: 184). Rumus *Cronbach Alpha* sebagai berikut:

$$(r)^{11} = \frac{k}{(k - 1)} 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2}$$

Keterangan:

$r^{11}$  : Reliabilitas instrumen  
 k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  
 $\sum \sigma_b^2$  : Jumlah varians butir  
 $\sigma_t^2$  : Varians total

(Suharsimi Arikunto, 2010: 239)

Uji reliabilitas diperoleh dengan bantuan program SPSS 20. Berikut ini adalah rangkuman hasil uji coba reliabilitas

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesesuaian dengan SAP	0,959	Reliabel
Kecukupan Pengungkapan	0,956	Reliabel
Kepatuhan terhadap Undang-Undang	0,924	Reliabel
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	0,977	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan	0,964	Reliabel

Sumber: Data yang Primer Diolah, 2016  
(Hasil *Output* SPSS pada Lampiran 6)

## I. Metode Analisis Data

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran variabel penelitian. Variabel yang diukur dan dianalisis dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Keuangan (Y), Kesesuaian dengan SAP ( $X_1$ ), Kecukupan Pengungkapan ( $X_2$ ), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan ( $X_3$ ), dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern ( $X_4$ ). Pada statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi disusun apabila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga jika disajikan dalam tabel biasa menjadi tidak efisien dan kurang komunikatif (Sugiyono, 2015:32). Pembuatan tabel distribusi alternatif dilakukan dengan menentukan kelas interval, menghitung rentang data, dan menentukan panjang kelas. Untuk menentukan jumlah kelas interval dapat dihitung dengan rumus Struges sebagai berikut:

$$K = 1 + 3.3 \log n$$

Keterangan:

K = jumlah kelas interval

n = jumlah data observasi

(Sugiyono, 2010:35)

Perhitungan rentang data dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rentang data} = (\text{nilai maksimal} - \text{nilai minimal}) + 1$$

Perhitungan panjang kelas dengan menggunakan rumus:

$$\text{Panjang Kelas} = \text{rentang data} / \text{jumlah kelas}$$

(Sugiyono, 2010:35)

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengkategorikan terhadap nilai masing-masing indikator. Dari nilai tersebut dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan mean ideal ( $M_i$ ) dan standar deviasi ideal ( $S_i$ ). Rumus untuk mencari mean ideal ( $M_i$ ) dan standar deviasi ideal ( $S_i$ ) adalah sebagai berikut:

$$\text{Mean Ideal } (M_i) = \frac{1}{2} (\text{nilai maksimal} + \text{nilai minimal})$$

$$\text{Standar Deviasi Ideal } (S_i) = \frac{1}{6} (\text{nilai maksimal} - \text{nilai minimal})$$

sedangkan untuk mencari kategori indikator sebagai berikut:

Tabel 7. Kategori Indikator Variabel

Kriteria	Interval
Sangat Tinggi	$M_i + 1,5 S_i < X \leq M_i + 3,0 S_i$
Tinggi	$M_i + 0,5 S_i < X \leq M_i + 1,5 S_i$
Sedang	$M_i - 0,5 S_i < X \leq M_i + 0,5 S_i$
Rendah	$M_i - 1,5 S_i < X \leq M_i - 0,5 S_i$
Sangat Rendah	$M_i - 3,0 S_i < X \leq M_i - 1,5 S_i$

Sumber: Sugiyono (2012)

## 2. Uji Prasyarat Analisis

Sebelum melakukan analisis lebih mendalam, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis terdiri dari:

### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak normal (Ghozali, 2011: 160). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji normalitas dapat dicari dengan rumus:

$$KS = 1,36 \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}}$$

Keterangan:

KS : Harga *Kolmogorov-Smirnov*

n1 : Jumlah sampel yang diperoleh

n2 : Jumlah sampel yang diharapkan

(Ghozali, 2011: 160)

Jika angka signifikansi Kolmogorov-Smirnov Sig > 0,05 maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sebaliknya jika angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* Sig < 0,05 maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

### b. Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik (Ghozali, 2011: 166). Kriteria yang diterapkan untuk menyatakan kelinearan adalah nilai F yang dapat dihitung dengan rumus:

$$F_{reg} = \frac{Rk_{reg}}{Rk_{res}}$$



Keterangan:

$F_{\text{reg}}$  : Harga bilangan F untuk regresi

$Rk_{\text{reg}}$  : Rerata kuadrat garis regresi

$Rk_{\text{res}}$  : Rerata kuadrat garis residu

(Sutrisno, 2004: 13)

Harga F dihitung kemudian dibandingkan dengan F tabel. Apabila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel maka hubungan variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dinyatakan linier.

### c. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik tersebut secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independence*). Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2011: 108). Ada tidaknya dapat dideteksi dengan menggunakan *Pearson Correlation*, dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* yang dapat dicari dengan rumus:

$$VIF = \frac{1}{\text{Tolerance Value}}$$

(Imam Ghozali, 2011: 106)

#### 2) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varian. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homokedastisitas. Untuk pengujian digunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Kriteria pengambilan keputusan adalah signifikansi dari variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011 :143)

### **3. Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda.

#### **a. Analisis Regresi Linear Sederhana**

Persamaan regresi sederhana dapat digunakan untuk memprediksi seberapa tinggi hubungan kausal satu variabel bebas dengan variabel terikatnya. Langkah-langkah dalam melakukan regresi linier sederhana yaitu:

- 1) Membuat garis linier sederhana

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' : Nilai yang diprediksikan

a : Konstanta atau apabila harga X = 0

b : Koefisien regresi

X : nilai variabel bebas

(Sugiyono, 2015: 247)

## 2) Menguji signifikan uji t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel bebas dengan satu variabel terikat yaitu dengan rumus:

$$t = \frac{r (\sqrt{n - 2})}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan:

t : t hitung

r : Koefisien korelasi

n : Jumlah sampel

(Husein, 2011: 132)

Harga t hitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5%. Apabila t hitung lebih besar atau sama dengan t tabel berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara individual. Sebaliknya, apabila t hitung lebih kecil dari t tabel berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Selain itu, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan hipotesis diterima, namun apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh signifikan dan hipotesis ditolak.

## **b. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini akan menghasilkan koefisien regresi variabel bebas terhadap variabel terikat, koefisien determinasi, sumbangan relatif serta sumbangan efektif masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Langkah-langkah dalam regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat persamaan garis dengan empat prediktor, dengan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan:

Y : Kriteria  
a : Bilangan konstan  
 $X_1, X_2, X_3, X_4$  : Prediktor 1, prediktor 2, prediktor 3, prediktor 4  
 $b_1, b_2, b_3, b_4$  : Koefisien prediktor  $X_1$ , koefisien prediktor  $X_2$ , koefisien prediktor  $X_3$ , koefisien prediktor  $X_4$   
(Sugiyono, 2015: 251)

- 2) Mencari koefisien determinasi antar prediktor  $X_1, X_2, X_3, X_4$  dengan kriteria (Y), dengan rumus:

$$R^2_{y(x_1, x_2, x_3, x_4)} = \frac{(a_1 \sum X_1 Y + a_2 \sum X_2 Y + a_3 \sum X_3 Y + a_4 \sum X_4 Y)}{\sum Y^2}$$

Keterangan :

$R^2_{y(x_1, x_2, x_3, x_4)}$  : Koefisien determinasi antara Y dengan  $X_1, X_2, X_3$ , dan  $X_4$   
 $a_1, a_2, a_3, a_4$  : Koefisien prediktor  $X_1, X_2, X_3, X_4$   
 $\sum X_1 Y, \sum X_2 Y, \sum X_3 Y, \sum X_4 Y$  : Jumlah produk antara  $X_1$  dengan Y,  $X_2$  dengan Y,  $X_3$  dengan Y,  $X_4$  dengan Y.  
 $\sum Y^2$  : Jumlah kuadrat kriteria Y

- 3) Menguji signifikansi regresi berganda melalui uji F dengan rumus sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

$F_h$  : Harga F garis regresi

$k$  : Jumlah variabel bebas

$n$  : Jumlah sampel

$R^2$  : Koefisien determinasi antara kriteria dengan prediktor

(Sugiyono, 2015: 252)

Setelah diperoleh hasil perhitungan, kemudian  $F$  hitung dibandingkan dengan  $F$  tabel pada taraf signifikansi 5%. Apabila  $F$  hitung lebih besar atau sama dengan  $F$  tabel, maka variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Sebaliknya, apabila  $F$  hitung lebih kecil dari  $F$  tabel maka tidak mempunyai pengaruh. Signifikansi digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama dan hipotesis diterima. Namun apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama dan hipotesis ditolak.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan pada responden penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Bagian Keuangan SKPD Kabupaten Temanggung yang memenuhi kualifikasi pada teknik pengambilan sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – Maret 2016.

##### **1. Profil SKPD Kabupaten Temanggung**

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Teamnggung terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang dilatarbelakangi oleh perubahan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Kepala Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan realisasi APBD, lingkungan pengendalian daerah, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Perkembangan jumlah SKPD Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun terus meningkat. Jumlah SKPD Kabupaten Temanggung tahun 2016 sebanyak 72 SKPD, yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, 12 Dinas, 7 Badan, 5 Kantor, 20 Kecamatan, 23 Kelurahan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan BLUD RSUD.

Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah memaksa organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif menuju pemerintahan yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar yakni pengelolaan keuangan daerah yang menuntut alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, permasalahan manajemen keuangan sektor publik selama ini belum dapat ditangani secara komprehensif dalam mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Secara umum perangkat daerah atau sering disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertugas membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah. Tiap SKPD memiliki wewenang menggunakan dana anggaran yang berasal dari APBD dalam menjalankan fungsinya. Konsekuensi atas kewenangan tersebut masing-masing SKPD harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut tiap periode tertentu. Pengelolaan keuangan SKPD dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan SKPD. Pejabat Pengelola Keuangan SKPD terdiri dari Kepala SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran.



## 2. Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian sebanyak 161 responden. Kuesioner yang dibagikan sejumlah 168 lembar eksemplar dan kembali sebanyak 161 lembar eksemplar. Semua responden bersedia mengisi kuesioner yang diberikan dan merespon kuesioner tersebut dengan baik. Namun terdapat kuesioner yang tidak dapat diolah, karena pengisian data oleh responden tidak lengkap. Adapun gambaran karakteristik data kuesioner dan deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Karakteristik Data Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	168	100%
Kuesioner yang direspon	161	95,83%
Kuesioner yang dapat diolah	157	93,45%

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu: jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan dan lama bekerja. Berikut ini karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan dan lama bekerja.

Tabel 9. Demografi Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
<b>Jenis Kelamin</b>		
1 Pria	76	48,40 %
2 Wanita	81	51,60 %
<b>Usia</b>		
1 25 – 30 Tahun	13	8,28 %
2 31 – 35 Tahun	25	15,92 %
3 36 – 40 Tahun	19	12,10 %
4 41 – 45 Tahun	29	18,47 %
5 46 – 50 Tahun	37	23,56 %
6 51 – 55 Tahun	24	15,28 %
7 > 55 Tahun	10	6,39 %

Lanjutan Tabel 9. Demografi Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
<b>Pendidikan</b>		
1 SMA	71	45,22 %
2 Diploma 3 (D3)	24	15,28 %
3 Sarjana (S1)	49	31,22 %
4 Magister (S2)	13	8,28 %
<b>Jabatan</b>		
1 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	39	24,84 %
2 Bendahara Kas/ Umum	42	26,76 %
3 Pencatat Pembukuan	40	25,47 %
4 Pembuat Dokumen	36	22,93 %
<b>Lama Bekerja</b>		
1 1 – 5 Tahun	30	19,11 %
2 6 – 10 Tahun	26	16,56 %
3 > 10 Tahun	101	64,33 %

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Berdasarkan tabel tersebut, dalam penelitian ini didominasi oleh responden Wanita yaitu sebanyak 51.60 % dan sisanya responden Pria sebesar 48.40 %. Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan usia, diketahui bahwa mayoritas responden berusia 46 – 50 tahun yaitu sebanyak 23,56%, usia 25 – 30 tahun 13 orang (8,28 %), usia 31 – 35 tahun sebanyak 25 orang (15,92%), usia 36 – 40 tahun sebanyak 19 orang (12,10%), usia 41 – 45 tahun sebanyak 29 orang (18,47%), usia 51 – 55 tahun sebanyak 24 orang (15,28%), sedangkan responden dengan usia diatas 55 tahun sebanyak 10 orang (6,39%).

Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa mayoritas responden yang berpendidikan SMA yaitu sebanyak 45,22%, diikuti pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 31,22%. Kemudian mereka yang berpendidikan Diploma 3 (D3) dan Magister (S2) masing-masing sebanyak 15,28% dan 8,28%. Berdasarkan jabatan, paling banyak responden

merupakan Bendahara sebanyak 42 orang (26,74%). Responden yang memiliki jabatan sebagai PPK sebanyak 39 orang (24,82%), jabatan Pencatat Pembukuan sebanyak 40 orang (25,47%) dan jabatan Pembuat Dokumen sebanyak 36 orang (22,93%). Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan masa kerja, diketahui bahwa masa kerja lebih dari 10 tahun adalah sebanyak 64,33%, responden dengan masa kerja 6 – 10 tahun sebanyak 16,56% dan masa kerja 1 – 5 tahun sebanyak 19,11%.

## B. Deskripsi Statistik Variabel

Variabel dalam penelitian ini dideskripsikan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis data deskriptif yang disajikan dalam penelitian ini meliputi harga rerata *Mean* (M), Modus (Mo), Median (Me), dan Standar Deviasi (SD). Mean merupakan rata-rata, modus merupakan nilai variabel atau data yang mempunyai frekuensi tinggi dalam distribusi. Median adalah suatu nilai yang membatasi 50% dari frekuensi distribusi sebelah atas dan 50% dari frekuensi distribusi sebelah bawah, sedangkan standar deviasi adalah akar varians. Selain itu, disajikan tabel distribusi frekuensi kemudian menentukan kategori terhadap nilai masing-masing indikator. Hasil analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Mo	Me	SD
Akuntabilitas Keuangan	157	56	75	64,69	63	64	3,86
Kesesuaian dengan SAP	157	41	64	55,84	55	55	3,24
Kecukupan Pengungkapan	157	49	76	60,60	60	60	5,67
Kepatuhan terhadap UU	157	28	39	33,19	33	33	2,39
Efektivitas SPI	157	45	58	50,09	49	48	2,55

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016

### 1. Statistik Deskriptif Variabel Akuntabilitas Keuangan (Y)

Variabel Akuntabilitas Keuangan terdiri dari delapan indikator yaitu Tertib, Taat, Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan, Bertanggungjawab, dan Keadilan. Berdasarkan indikator tersebut dibuat 21 pernyataan, di mana semua pernyataan dalam instrumen dinyatakan valid. Penentuan skor menggunakan skala ordinal modifikasi skala *Likert* yang terdiri dari empat alternatif jawaban. Skor yang diberikan maksimal empat dan minimal satu, sehingga dihasilkan skor tertinggi yang mungkin dicapai 84 ( $21 \times 4 = 84$ ) dan skor terendah yang mungkin dicapai 21 ( $21 \times 1 = 21$ ).

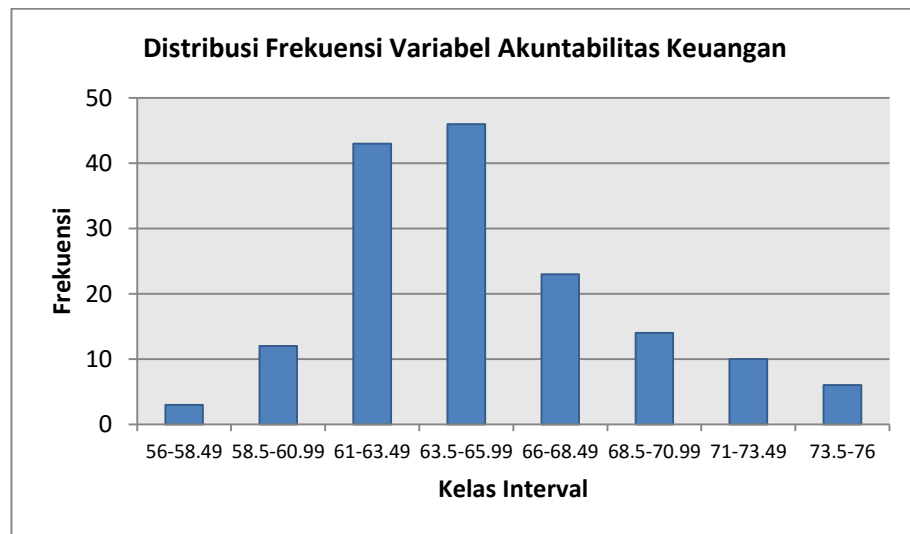
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif sebelumnya didapatkan skor maksimum 84 dan skor minimum 21. Jumlah kelas interval adalah  $1 + 3,3 \log 157 = 8.24$  (dibulatkan menjadi 8). Rentang data  $(75 - 56) + 1 = 20$  dan panjang kelas  $20/8 = 2.5$ , sehingga didapatkan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas Keuangan

No	Kelas Interval	Frekuensi	F (%)
1	56.00 – 58.49	3	1.91%
2	58.50 – 59.99	12	7.64%
3	61.00 – 63.49	43	27.39%
4	63.50 – 65.99	46	29.30%
5	66.00 – 68.49	23	14.65%
6	68.50 – 70.99	14	8.92%
7	71.00 – 73.49	10	6.37%
8	73.50 – 76.00	6	3.82%
	Jumlah	157	100.00%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Histogram Variabel Akuntabilitas Keuangan

Data variabel Akuntabilitas Keuangan kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan yang dapat dikategorikan ke dalam lima kategori. Hasil distribusi kecenderungan data variabel Akuntabilitas Keuangan sebagai berikut:

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel Y

No	Interval	Frekuensi	Frekuensi Relatif	Kategori
1	$21,00 < X \leq 36,75$	-	-	Sangat Rendah
2	$36,75 < X \leq 47,25$	-	-	Rendah
3	$47,25 < X \leq 57,75$	2	1,27%	Sedang
4	$57,75 < X \leq 68,25$	121	77,08%	Tinggi
5	$68,25 < X \leq 84,00$	34	21,65%	Sangat Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Tabel 12 menunjukkan bahwa frekuensi Akuntabilitas Keuangan yang termasuk sebagai kategori sedang sebanyak 2 responden (1,27%), kategori tinggi sebanyak 121 responden (77,08%), dan pada kategori sangat tinggi sebanyak 34 responden (21,65%). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian responden tentang variabel Akuntabilitas

Keuangan adalah tinggi karena mayoritas responden memberikan penilaian dalam kategori tinggi.

## 2. Statistik Deskriptif Variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Aspek Kesesuaian terhadap SAP ( $X_1$ )

Variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian terhadap SAP terdiri dari empat indikator yaitu berdasarkan asumsi dasar, memuat karakteristik laporan keuangan, berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan, serta memuat unsur – unsur laporan keuangan. Berdasarkan indikator tersebut dibuat 18 pernyataan. Penentuan skor menggunakan skala ordinal modifikasi skala *Likert* yang terdiri dari empat alternatif jawaban. Skor yang diberikan maksimal empat dan minimal satu, sehingga dihasilkan skor tertinggi yang mungkin dicapai 72 ( $18 \times 4 = 84$ ) dan skor terendah yang mungkin dicapai 18 ( $18 \times 1 = 21$ ).

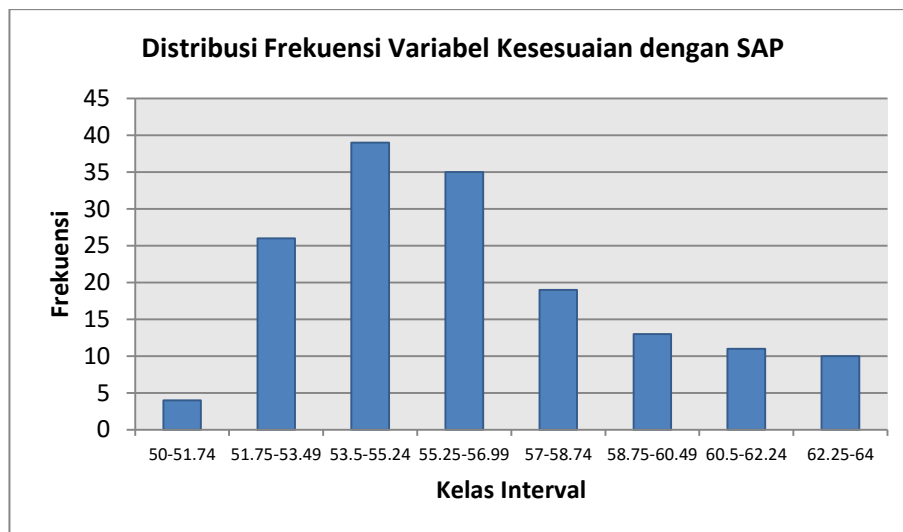
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, skor maksimum 64 dan skor minimum 51. Jumlah kelas interval adalah  $1 + 3.3\log 157 = 8.24$  (dibulatkan menjadi 8). Rentang data  $(64 - 51) + 1 = 14$  dan panjang kelas  $14/8 = 1.75$ , sehingga tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Variabel Kesesuaian dengan SAP

No	Kelas Interval	Frekuensi	F (%)
1	50.00 – 51.74	4	2.55%
2	51.75 – 53.49	26	16.56%
3	53.50 – 55.24	39	24.84%
4	55.25 – 56.99	35	22.29%
5	57.00 – 68.74	19	12.10%
6	58.75 – 60.49	13	8.28%
7	60.50 – 62.24	11	7.01%
8	62.25 – 64.00	10	6.37%
	Jumlah	157	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Histogram Variabel Kesesuaian dengan SAP

Data variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian terhadap SAP kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan dengan lima kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Hasil distribusi kecenderungan data variabel Kesesuaian terhadap SAP sebagai berikut:

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel  $X_1$

No	Interval	Frekuensi	Frekuensi Relatif	Kategori
1	$18,00 < X \leq 31,50$	-	-	Sangat Rendah
2	$31,50 < X \leq 40,50$	-	-	Rendah
3	$40,50 < X \leq 49,50$	-	-	Sedang
4	$49,50 < X \leq 58,50$	121	77,07%	Tinggi
5	$58,50 < X \leq 72,00$	36	22,93%	Sangat Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Tabel 14 menunjukkan bahwa frekuensi Kecenderungan Variabel Kesesuaian dengan SAP kategori tinggi sebanyak 121 responden (77,07%), dan pada kategori sangat tinggi sebanyak 36 responden (22,93%). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian responden

tentang variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian terhadap SAP adalah tinggi karena mayoritas responden memberikan penilaian dalam kategori tinggi.

### 3. Statistik Deskriptif Variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Aspek Kecukupan Pengungkapan ( $X_2$ )

Variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan terdiri dari tujuh indikator bersumber dari PP No 71 Tahun 2010. Berdasarkan indikator tersebut dibuat 20 pernyataan dan semua pernyataan dalam instrumen dinyatakan valid. Penentuan skor menggunakan skala ordinal modifikasi skala *Likert* yang terdiri dari empat alternatif jawaban. Skor yang diberikan maksimal empat dan minimal satu, sehingga dihasilkan skor tertinggi yang mungkin dicapai 80 ( $20 \times 4 = 80$ ) dan skor terendah yang mungkin dicapai 20 ( $20 \times 1 = 20$ ).

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, skor maksimum 76 dan skor minimum 49. Jumlah kelas interval adalah  $1 + 3.3\log 157 = 8.24$  (dibulatkan menjadi 8). Rentang data  $(76 - 49) + 1 = 28$  dan panjang kelas  $28/8 = 3.5$ , sehingga tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

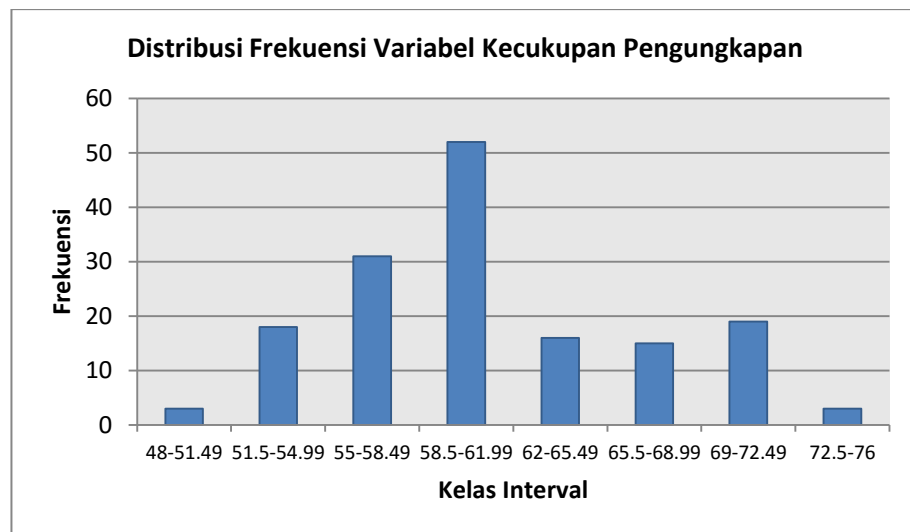
Tabel 15. Distribusi Frekuensi Variabel Kecukupan Pengungkapan

No	Kelas Interval	Frekuensi	F (%)
1	48.00 – 51.49	3	1.91%
2	51.50 – 54.99	18	11.46%
3	55.00 – 58.49	31	19.75%
4	58.50 – 61.99	52	33.12%
5	62.00 – 65.49	16	10.19%
6	65.50 – 68.99	15	9.55%
7	69.00 – 72.49	19	12.10%
8	72.50 – 76.00	3	1.91%
	Jumlah	157	100.00%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016



Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Histogram Variabel Kecukupan Pengungkapan

Data variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan yang dapat dikategorikan ke dalam lima kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Hasil distribusi kecenderungan data variabel Kecukupan Pengungkapan adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel  $X_2$

No	Interval	Frekuensi	Frekuensi Relatif	Kategori
1	$18,00 < X \leq 31,50$	-	-	Sangat Rendah
2	$31,50 < X \leq 40,50$	-	-	Rendah
3	$40,50 < X \leq 49,50$	-	-	Sedang
4	$49,50 < X \leq 58,50$	121	77,07%	Tinggi
5	$58,50 < X \leq 72,00$	36	22,93%	Sangat Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Tabel 16 menunjukkan bahwa frekuensi Kecenderungan Kecukupan Pengungkapan kategori tinggi sebanyak 121 responden (77,07%), dan pada kategori sangat tinggi sebanyak 36 responden

(22,93%). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian responden tentang variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan adalah tinggi karena mayoritas responden memberikan penilaian dalam kategori tinggi.

#### **4. Statistik Deskriptif Variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan ( $X_3$ )**

Variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari empat indikator besumber dari PSP BPK RI No 03.01 Tahun 2008. Indikator tersebut yaitu ketentuan penyajian informasi keuangan berdasarkan asas bruto, ketentuan belanja merupakan pagu maksimal dan pendapatan merupakan target yang harus dicapai, ketentuan pengungkapan, dan ketentuan penerimaan serta pengeluaran kas. Berdasarkan indikator tersebut dibuat 11 pernyataan. Penentuan skor menggunakan skala ordinal modifikasi skala *Likert* yang terdiri dari empat alternatif jawaban. Skor yang diberikan maksimal empat dan minimal satu, sehingga dihasilkan skor tertinggi yang mungkin dicapai 44 ( $11 \times 4 = 44$ ) dan skor terendah yang mungkin dicapai 11 ( $11 \times 1 = 11$ ).

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif sebelumnya didapatkan skor maksimum 39 dan skor minimum 28. Jumlah kelas interval adalah  $1 + 3,3 \log 157 = 8.24$  (dibulatkan menjadi 8). Rentang data  $(39 - 28) + 1$

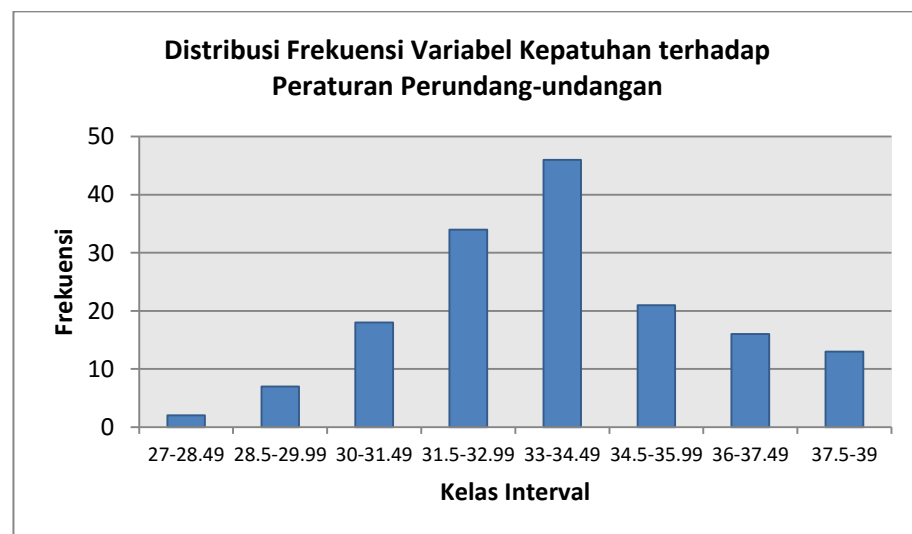
= 12 dan panjang kelas  $12/8 = 1.50$ , sehingga didapatkan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 17. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

No	Kelas Interval	Frekuensi	F (%)
1	27.00 – 28.49	2	1.27%
2	28.50 – 29.99	7	4.46%
3	30.00 – 31.49	18	11.46%
4	31.50 – 32.99	34	21.66%
5	33.00 – 34.49	46	29.30%
6	34.50 – 35.99	21	13.38%
7	36.00 – 47.49	16	10.19%
8	37.50 – 39.00	13	8.28%
	Jumlah	157	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Histogram Variabel Kepatuhan terhadap Undang-Undang

Data variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan yang dapat dikategorikan ke dalam lima kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat

rendah. Hasil distribusi kecenderungan data variabel Kepatuhan terhadap Undang-undang adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel  $X_3$

No	Interval	Frekuensi	Frekuensi Relatif	Kategori
1	$11,00 < X \leq 19,25$	-	-	Sangat Rendah
2	$19,25 < X \leq 24,75$	-	-	Rendah
3	$24,75 < X \leq 30,25$	19	12,10%	Sedang
4	$30,25 < X \leq 35,75$	96	61,15%	Tinggi
5	$35,75 < X \leq 44,00$	42	26,75%	Sangat Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Tabel 18 menunjukkan bahwa frekuensi Kecenderungan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan kategori sedang sebanyak 19 responden (12,10%), kategori tinggi sebanyak 96 responden (61,15%) dan pada kategori sangat tinggi sebanyak 36 responden (22,93%). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian responden tentang variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undang adalah tinggi karena mayoritas responden memberikan penilaian dalam kategori tinggi.

#### **5. Statistik Deskriptif Variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Aspek Efektifitas Sistem Pengendalian Intern ( $X_4$ )**

Variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern terdiri dari lima indikator bersumber dari Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) BPK No 03.01 Tahun 2008. Berdasarkan indikator tersebut dibuat 16 pernyataan, di mana semua pernyataan dalam instrumen dinyatakan valid. Penentuan skor menggunakan skala ordinal modifikasi skala *Likert* yang terdiri dari

empat alternatif jawaban. Skor yang diberikan maksimal empat dan minimal satu, sehingga dihasilkan skor tertinggi yang mungkin dicapai 16 ( $16 \times 4 = 64$ ) dan skor terendah yang mungkin dicapai 16 ( $16 \times 1 = 16$ ).

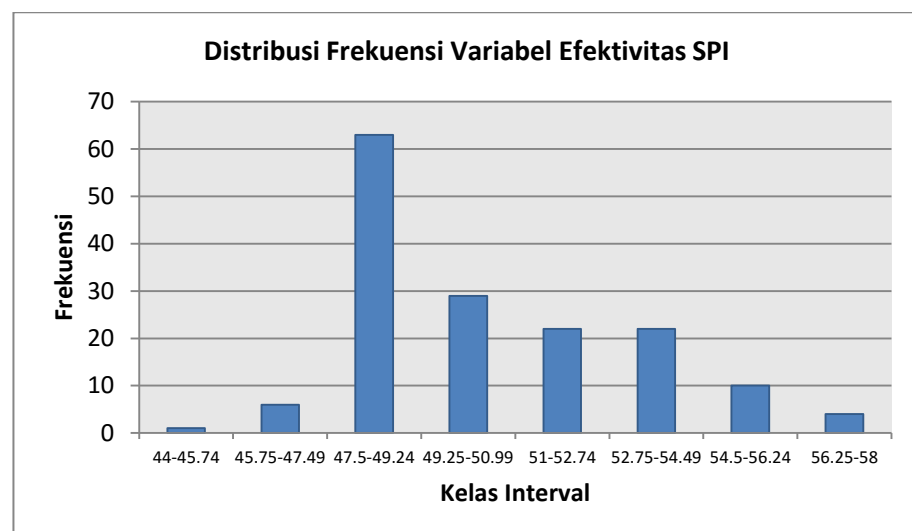
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif sebelumnya didapatkan skor maksimum 58 dan skor minimum 45. Jumlah kelas interval adalah  $1 + 3,3 \log 157 = 8.24$  (dibulatkan menjadi 8). Rentang data  $(58 - 45) + 1 = 14$  dan panjang kelas  $14/8 = 1.75$ , sehingga didapatkan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 19. Distribusi Frekuensi Variabel Efektivitas SPI

No	Kelas Interval	Frekuensi	F (%)
1	44.00 – 45.74	1	0.64%
2	45.75 – 47.49	6	3.82%
3	47.50 – 49.24	63	40.13%
4	49.25 – 50.99	29	18.47%
5	51.00 – 52.74	22	14.01%
6	52.75 – 54.49	22	14.01%
7	54.50 – 56.24	10	6.37%
8	56.25 – 58.00	4	2.55%
	Jumlah	157	100.00%

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6. Histogram Variabel Efektivitas SPI

Data variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas SPI kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan yang dapat dikategorikan ke dalam lima kategori. Hasil distribusi kecenderungan data variabel Efektivitas SPI adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Distribusi Frekuensi Kecenderungan Variabel  $X_4$ 

No	Interval	Frekuensi	Frekuensi Relatif	Kategori
1	$16 < X \leq 28$	-	-	Sangat Rendah
2	$28 < X \leq 36$	-	-	Rendah
3	$36 < X \leq 44$	-	-	Sedang
4	$44 < X \leq 52$	125	79,61%	Tinggi
5	$52 < X \leq 64$	32	20,39%	Sangat Tinggi

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Tabel 20 menunjukkan bahwa frekuensi Kecenderungan Efektivitas SPI kategori tinggi sebanyak 125 responden (79,61%) dan kategori sangat tinggi sebanyak 32 responden (20,39%). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian responden tentang variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas SPI adalah tinggi karena mayoritas responden memberikan penilaian dalam kategori tinggi.

### C. Uji Prasyarat Analisis Data

#### 1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Imam Ghazali, 2011: 160). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai *Kolmogorov-Smirnov* memiliki tingkat

signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil Uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 21. Hasil Uji Normalitas Data  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		157
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.09792150
	Absolute	.067
Most Extreme Differences	Positive	.067
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.839
Asymp. Sig. (2-tailed)		.482

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* di atas diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov Test* sebesar 0,839 dan *Asymp.sig.* sebesar 0,482 lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

## 2. Uji Linearitas Data

Pengujian linearitas regresi dilakukan dengan menggunakan uji statistik F. Harga F hitung kemudian dikonsultasikan dengan F tabel dengan taraf signifikansi 5%. Kriteria yang diterapkan untuk pengujian linearitas adalah nilai F hitung dan nilai signifikansi pada masing-masing variabel bebas. Kriteria F hitung yaitu kurang dari nilai F tabel. Nilai F tabel untuk jumlah responden (n) 157 dan jumlah variabel (k) 5 adalah 2,43. Nilai signifikansi memenuhi kriteria apabila lebih besar dari pada nilai taraf signifikansi *Deviation from Linearity* 0,05 maka hubungan antara

variabel bebas terhadap variabel terikat adalah linear. Hasil dari uji linearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Rangkuman Hasil Uji Linearitas

Variabel	F Hitung	<i>Deviation from Linearity</i>	Keterangan
X <sub>1</sub> dengan Y	1,464	0,144	Linear
X <sub>2</sub> dengan Y	1,262	0,206	Linear
X <sub>3</sub> dengan Y	1,995	0,450	Linear
X <sub>4</sub> dengan Y	1,260	0,258	Linear

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

(Hasil *Output* SPSS pada Lampiran 9)

Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel 22 di atas menunjukkan bahwa uji linearitas antara X<sub>1</sub> diperoleh F Hitung sebesar 1,464 ( $1,464 < 2,43$ ) dan *Deviation from Linearity* sebesar 0,144 ( $0,144 > 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa hubungan antara Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP terhadap Akuntabilitas Keuangan adalah linear. Hasil uji linearitas antara X<sub>2</sub> diperoleh F Hitung sebesar 1,262 ( $1,262 < 2,43$ ) dan *Deviation from Linearity* sebesar 0,206 ( $0,206 > 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa hubungan antara Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan dengan Akuntabilitas Keuangan adalah linear. Hasil uji linearitas antara X<sub>3</sub> diperoleh F Hitung sebesar 1,995 ( $1,995 < 2,43$ ) dan *Deviation from Linearity* sebesar 0,450 ( $0,450 > 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa hubungan antara Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Undang-undang dengan Akuntabilitas Keuangan adalah linear. Hasil uji linearitas antara X<sub>4</sub> diperoleh F Hitung sebesar 1,260 ( $1,260 < 2,43$ ) dan *Deviation from Linearity* sebesar 0,258 ( $0,258 >$



0,05) yang menunjukkan bahwa hubungan antara Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dengan Akuntabilitas Keuangan adalah linear.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas (Imam Ghozali, 2011: 108). Hasil uji multikolinearitas pada variabel bebas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
X <sub>1</sub>	0,751	1,332	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X <sub>2</sub>	0,529	1,892	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X <sub>3</sub>	0,546	1,832	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X <sub>4</sub>	0,836	1,196	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016  
(Hasil *Output* SPSS pada Lampiran 9)

Hasil perhitungan analisis menunjukkan bahwa nilai VIF tiap variabel bebas lebih kecil dari 10. Selain itu nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastisitas. Untuk pengujian digunakan uji Glejser. Uji

Glejser dilakukan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Kriteria pengambilan keputusan adalah signifikansi dari variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2011: 143). Hasil dari Uji Heteroskedastisitas dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 24. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig t	Keterangan
X <sub>1</sub>	0,443	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X <sub>2</sub>	0,351	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X <sub>3</sub>	0,438	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X <sub>4</sub>	0,269	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016  
(Hasil *Output* SPSS pada Lampiran 9)

Hasil uji Glejser menunjukkan bahwa tidak satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat nilai absolut. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, atau nilai signifikansi variabel bebas > 0.05 sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas

#### **D. Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

##### **1. Uji Hipotesis Pertama**

Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa “Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan”. Pengujian hipotesis pertama menggunakan analisis regresi linear sederhana, sehingga

diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linear sederhana sebagai berikut:

Tabel 25. Rangkuman Hasil Regresi Hipotesis Pertama

Model Regresi	Keterangan	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
1	Konstanta	44,619	8,746	0,000
	X <sub>1</sub>	0,359	3,947	0,000
	R Square = 0,091			

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016  
(Hasil *Output* SPSS pada Lampiran 11)

a. Persamaan garis regresi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 44,619 dan koefisien regresi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,359. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi untuk hipotesis pertama sebagai berikut:

$$Y = 44,619 + 0,359 X_1$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP dianggap konstan, maka perubahan Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 44,619 satuan. Dari persamaan di atas juga dapat diketahui jika variabel Kesesuaian dengan SAP naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,359 satuan. Nilai koefisien regresi variabel independen yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan. Hal

ini dapat diartikan semakin tinggi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, maka akan semakin tinggi pula Akuntabilitas Keuangan.

b. Koefisien determinasi

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 25, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana (*R square*) sebesar 0,091. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP adalah sebesar 9,1% . Sedangkan sisanya sebesar 90,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

c. Hasil Uji t

Uji t statistik untuk variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP pada Tabel 25 di atas, menghasilkan t hitung sebesar 3,947 dan nilai t tabel sebesar 1,654 (tingkat signifikansi 5%,  $n = 157$ ). Jika keduanya dibandingkan, maka t hitung lebih besar dari t tabel ( $3,947 > 1,654$ ). Hal tersebut berarti terdapat pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan diterima.

## 2. Uji Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa “Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan”. Pengujian hipotesis kedua menggunakan analisis regresi linear sederhana, sehingga diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linear sederhana sebagai berikut:

Tabel 26. Rangkuman Hasil Regresi Hipotesis Kedua

Model Regresi	Keterangan	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
2	Konstanta	58,575	17,787	0,000
	X <sub>1</sub>	0,101	1,864	0,064
	R Square = 0,022			

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016  
(Hasil *Output* SPSS pada Lampiran 11)

### a. Persamaan garis regresi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 58,575 dan koefisien regresi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,101. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi untuk hipotesis kedua sebagai berikut:

$$Y = 58,575 + 0,101 X_2$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan dianggap konstan, maka perubahan

Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 58,575 satuan. Dari persamaan di atas juga dapat diketahui jika variabel Kecukupan Pengungkapan naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,101 satuan. Nilai koefisien regresi variabel independen yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan, maka akan semakin tinggi pula Akuntabilitas Keuangan.

b. Koefisien determinasi

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 26, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana (*R square*) sebesar 0,022. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan adalah sebesar 2,2%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

c. Hasil Uji t

Uji t statistik untuk variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan pada Tabel 26 di atas, menghasilkan t hitung sebesar 1,864 dan nilai t tabel sebesar 1,654 (tingkat signifikansi 5%,  $n = 157$ ). Jika keduanya dibandingkan, maka t hitung lebih besar dari t tabel ( $1,864 > 1,654$ ). Nilai signifikansi 0,032

(nilai Sig. dibagi 2 karena merupakan pengujian satu arah) yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti terdapat pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan diterima.

### 3. Uji Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa “Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan”. Pengujian hipotesis ketiga menggunakan analisis regresi linear sederhana, sehingga diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linear sederhana sebagai berikut:

Tabel 27. Rangkuman Hasil Regresi Hipotesis Ketiga

Model Regresi	Keterangan	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
3	Konstanta	56,992	13,337	0,000
	X <sub>1</sub>	0,232	1,806	0,073
	R Square = 0,021			

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016  
(Hasil *Output* SPSS pada Lampiran 11)

a. Persamaan garis regresi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 56,992 dan koefisien regresi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Undang-undang berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,232. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi untuk hipotesis ketiga sebagai berikut:

$$Y = 56,992 + 0,232 X_3$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dianggap konstan, maka perubahan Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 56,992 satuan. Dari persamaan di atas juga dapat diketahui jika variabel Kepatuhan terhadap Undang-undang naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,232 satuan. Nilai koefisien regresi variabel independen yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undang, maka akan semakin tinggi pula Akuntabilitas Keuangan.



b. Koefisien determinasi

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 27, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana (*R square*) sebesar 0,021. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah sebesar 2,1%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

c. Hasil Uji t

Uji t statistik untuk variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Tabel 27 di atas, menghasilkan t hitung sebesar 1,806 dan nilai t tabel sebesar 1,654 (tingkat signifikansi 5%,  $n = 157$ ). Jika keduanya dibandingkan, maka t hitung lebih besar dari t tabel ( $1,806 > 1,654$ ). Nilai signifikansi 0,037 (nilai Sig. dibagi 2 karena merupakan pengujian satu arah) yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti terdapat pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang

menyatakan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan diterima

#### 4. Uji Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa “Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan”. Pengujian hipotesis ketiga menggunakan analisis regresi linear sederhana, sehingga diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linear sederhana sebagai berikut:

Tabel 28. Rangkuman Hasil Regresi Hipotesis Keempat

Model Regresi	Keterangan	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
4	Konstanta	25,280	4,840	0,000
	X <sub>1</sub>	0,787	7,555	0,000
	R Square = 0,269			

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016  
(Hasil *Output* SPSS pada Lampiran 11)

##### a. Persamaan garis regresi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 25,280 dan koefisien regresi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,787. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi untuk hipotesis keempat sebagai berikut:

$$Y = 25,280 + 0,787 X_4$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas

Sistem Pengendalian Intern dianggap konstan, maka perubahan Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 25,280 satuan. Dari persamaan di atas juga dapat diketahui jika variabel Efektivitas Sistem Pengendalian Intern naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,787 satuan. Nilai koefisien regresi variabel independen yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, maka akan semakin tinggi pula Akuntabilitas Keuangan.

b. Koefisien determinasi

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 28, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana (*R square*) sebesar 0,269. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern adalah sebesar 26,9%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

c. Hasil Uji t

Uji t statistik untuk variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern pada Tabel 28 di atas, menghasilkan t hitung sebesar 7,555 dan nilai t tabel sebesar

1,654 (tingkat signifikansi 5%,  $n = 157$ ). Jika keduanya dibandingkan, maka  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $1,864 > 1,654$ ). Nilai signifikansi 0,000 (nilai Sig. dibagi 2 karena merupakan pengujian satu arah) yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti terdapat pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan diterima.

## **5. Uji Hipotesis Kelima**

Hipotesis kelima pada penelitian ini menyatakan bahwa “Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan”. Pengujian hipotesis ketiga menggunakan analisis regresi linear sederhana, sehingga diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linear sederhana sebagai berikut:

Tabel 29. Rangkuman Hasil Regresi Hipotesis Kelima

Variabel Independen	Nilai R		Nilai F		Sig	Konst	Koef
	R	R <sup>2</sup>	F Hitung	F Tabel			
Kesesuaian dengan SAP	0,534	0,285	15,139	1,654	0,001	21,258	0,169
Kecukupan Pengungkapan							0,050
Kepatuhan terhadap UU							0,065
Efektivitas SPI							0,728

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016  
(Hasil *Output* SPSS pada Lampiran 11)

a. Persamaan garis regresi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 21,258 dan koefisien regresi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern masing-masing sebesar 0,169; 0,050; 0,065; dan 0,728. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi untuk hipotesis kelima sebagai berikut:

$$Y = 21,258 + 0,169 X_1 + 0,050 X_2 + 0,065 X_3 + 0,728 X_4$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diketahui:

- 1) Nilai konstanta 21,258 dapat diartikan jika seluruh variabel independen dianggap konstan, Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, maka nilai variabel dependen, Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 21,258 satuan.

- 2) Nilai koefisien regresi Kesesuaian dengan SAP sebesar 0,169 diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel Kesesuaian dengan SAP, sedangkan variabel Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dianggap konstan, maka variabel dependen, Akuntabilitas Keuangan akan naik sebesar 0,169 satuan.
- 3) Nilai koefisien regresi Kecukupan Pengungkapan sebesar 0,050 diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel Kecukupan Pengungkapan, sedangkan variabel Kesesuaian dengan SAP, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dianggap konstan, maka variabel dependen, Akuntabilitas Keuangan akan naik sebesar 0,050 satuan.
- 4) Nilai koefisien regresi Kepatuhan terhadap Undang-undang sebesar 0,065 diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, sedangkan variabel Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dianggap konstan, maka variabel dependen, Akuntabilitas Keuangan akan naik sebesar 0,065 satuan.
- 5) Nilai koefisien regresi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,728 diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, sedangkan variabel Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, dan

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dianggap konstan, maka variabel dependen, Akuntabilitas Keuangan akan naik sebesar 0,728 satuan.

b. Koefisien determinasi

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 29, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana (*R square*) sebesar 0,285. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern adalah sebesar 28,5%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

c. Hasil Uji F

Hasil uji F pada Tabel 29 dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 15,139 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,050 yaitu 0,001. Jika dibandingkan dengan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 2,43 (Df 1 = 4 dan Df 2 = 152), maka nilai F hitung lebih besar daripada F tabel ( $15,139 > 2,43$ ). Berdasar hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan diterima.

#### **E. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi  $X_1$  sebesar 0,359 menyatakan bahwa setiap kenaikan Kesesuaian dengan SAP sebesar 1



satuan akan meningkatkan Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,359 satuan. Nilai  $t$  hitung 3,947 lebih dari nilai  $t$  tabel sebesar 1,654 ( $3,947 > 1,654$ ) mengindikasikan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan sehingga hipotesis pertama yang menyatakan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan diterima.

Hasil pengamatan dan jawaban responden atas pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel  $X_1$  didominasi oleh jawaban sangat setuju dan setuju, hal ini berarti bahwa kewajaran penyajian laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Temanggung dalam menyusun laporan keuangan telah sesuai dengan SAP. SKPD Kabupaten Temanggung, telah menyusun laporan keuangan berdasarkan Asumsi dasar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam SAP, laporan keuangan SKPD Kabupaten Temanggung telah memuat karakteristik laporan keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam SAP, laporan keuangannya juga sudah disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, selain itu SKPD Kabupaten Temanggung telah menyajikan unsur laporan keuangan pemerintah sesuai dengan SAP.

Kontribusi secara parsial masing-masing variabel bahwa kesesuaian laporan keuangan dengan SAP mempunyai kontribusi lebih tinggi dibandingkan dengan indikator kecukupan pengungkapan dan kepatuhan

terhadap Undang-undang, hal ini dikarenakan standar akuntansi merupakan acuan dan juga syarat utama badan pemeriksa laporan keuangan (BPK) menilai kewajaran laporan keuangan, apabila pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah maka hal tersebut akan berpengaruh pada kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan BPK, dimana syarat dari kewajaran penyajian laporan keuangan adalah kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Hal ini membuktikan teori dari Mahsun dkk (2006: 42) standar akuntansi pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Menurut Renyowijoyo (2008:171) salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang memenuhi prinsip tepat waktu, dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan

## **2. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi  $X_2$  sebesar 0,101 menyatakan bahwa setiap kenaikan Kecukupan Pengungkapan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,101 satuan. Nilai  $t$  hitung 1,864 lebih dari nilai  $t$  tabel sebesar 1,654 ( $1,864 > 1,654$ ) mengindikasikan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan sehingga hipotesis kedua yang menyatakan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan diterima.

Hasil penelitian dan pengamatan peneliti terkait kewajaran penyajian laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Temanggung khususnya aspek kecukupan pengungkapan ( $X_2$ ), SKPD Kabupaten Temanggung telah menyajikan informasi dalam laporan keuangan secara lengkap. Kelengkapan informasi laporan keuangan disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Kelengkapan informasi tersebut terkait informasi tentang kebijakan, ikhtisar pencapaian kinerja, dasar penyusunan laporan keuangan, informasi yang diwajibkan SAP, informasi

terkat pos-pos aset dan kewajiban, serta informasi tambahan yang diperlukan. SKPD Kabupaten Temanggung telah mengungkapkan informasi laporan keuangan secara lengkap dalam catatan laporan keuangan, sehingga dengan adanya kecukupan pengungkapan ini dapat tercipta akuntabilitas keuangan pada SKPD Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan kontribusi pengaruh secara parsial kecukupan pengungkapan memiliki pengaruh yang paling rendah terhadap akuntabilitas keuangan. Kesesuaian laporan keuangan dengan SAP memiliki kontribusi lebih tinggi daripada Kecukupan pengungkapan dalam menciptakan akuntabilitas keuangan. Penjelasan peraturan terkait kecukupan pengungkapan dipaparkan dalam Lampiran Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No 71 Tahun 2010). Laporan keuangan telah sesuai dengan SAP maka akan memperhatikan kecukupan pengungkapan. Sehingga dapat diartikan bahwa Kecukupan pengungkapan ini merupakan salah satu bagian dari kesesuaian dengan SAP.

Berdasarkan hasil kuesioner untuk item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel Kecukupan Pengungkapan ( $X_2$ ) menunjukkan mayoritas jawaban responden pada kategori sangat setuju dan setuju. Hal ini berarti penyajian laporan keuangan SKPD Kabupaten Temanggung diungkapkan secara lengkap. Namun berdasarkan pengamatan atas permasalahan yang dipaparkan dalam catatan oleh BPK atas LKPD Kabupaten Temanggung TA 2014. Catatan tersebut bahwa sebagian dari aset tetap berupa daerah irigasi di Kabupaten Temanggung belum tercatat

dan besaran utang sewa tanah PT Kereta Api Indonesia yang digunakan pemkab belum tersajikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengungkapan informasi secara lengkap belum terpenuhi. Sesuai dengan kontribusi pengaruh variabel Kecukupan Pengungkapan ( $X_2$ ) dalam penelitian ini adalah yang paling rendah.

### **3. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi  $X_3$  sebesar 0,232 menyatakan bahwa setiap kenaikan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,232 satuan. Nilai  $t$  hitung 1,806 lebih dari nilai  $t$  tabel sebesar 1,654 ( $1,806 > 1,654$ ) mengindikasikan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan diterima.

Hasil pengujian hipotesis ketiga bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek variabel Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Semakin tinggi Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan maka meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Penilaian BPK tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya berdasarkan kepatuhan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundang-undangan merupakan landasan utama bagi pemerintah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Undang-undang terkait penyajian laporan keuangan antara lain ketentuan penyajian informasi keuangan, ketentuan belanja dan pendapatan, ketentuan pengungkapan atas anggaran dan realisasi, serta ketentuan terkait penerimaan dan pengeluaran kas. Penjelasan Undang-undang terkait penyajian laporan keuangan dipaparkan secara spesifik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### **4. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Hasil penelitian mendukung hipotesis keempat bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern ( $X_4$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi

$X_4$  sebesar 0,787 menyatakan bahwa setiap kenaikan Kepatuhan terhadap Undang-undang sebesar 1 satuan akan meningkatkan Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,787 satuan. Nilai  $t$  hitung 7,555 lebih dari nilai  $t$  tabel sebesar 1,654 ( $7,555 > 1,654$ ) mengindikasikan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan sehingga hipotesis keempat yang menyatakan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan diterima.

Hasil penelitian menunjukkan SKPD Kabupaten Temanggung telah memiliki Sistem Pengendalian Intern yang cukup efektif. Sistem Pengendalian Intern terkait pengendalian pencatatan akuntansi, pengendalian pelaporan keuangan, pengendalian penerimaa, pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta struktur pengendalian intern. Hal ini tampak pada mayoritas jawaban responden yang setuju dan sangat setuju. Selain itu kontribusi pengaruh variabel Efektivitas Pengendalian Intern merupakan yang paling tinggi terhadap Akuntabilitas Keuangan. Pengendalian intern ini dilakukan sebagai pengontrol untuk mengawasi pengelolaan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Semakin baik penerapan efektivitas

sistem pengendalian intern maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, sangat diperlukan penerapan sistem pengendalian intern secara efektif. Sistem pengendalian intern dapat digunakan oleh manajemen pemerintah untuk merencanakan dan mengendalikan operasi atau kegiatan pemerintah. Sistem pengendalian intern merupakan kebijakan dan prosedur yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan/sasaran dan menjamin tersedianya informasi laporan keuangan yang berkualitas.

**5. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Hasil penelitian mendukung hipotesis kelima bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP ( $X_1$ ), Kecukupan Pengungkapan ( $X_2$ ), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan ( $X_3$ ) dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern ( $X_4$ ) secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dibuktikan oleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel sebesar 15,139 ( $15,139 > 2,43$ ) dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,050$ ). Nilai koefisien regresi untuk variabel Kesesuaian dengan SAP sebesar 0,169, variabel Kecukupan Pengungkapan sebesar 0,050, variabel Kepatuhan terhadap Undang-undang sebesar 0,065, dan variabel Efektifitas Sistem



Pengendalian Intern sebesar 0,720. Semua nilai koefisien regresi memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin wajar penyajian laporan keuangan berdasarkan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, maka Akuntabilitas Keuangan akan semakin tinggi.

Penelitian ini juga mendukung teori dari Mardiasmo (2004) yang menjelaskan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas dan transparansi adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan CALK. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas keuangan sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja financial pemerintah.

Penelitian ini mendukung berbagai penelitian terdahulu yang diantaranya penelitian Putu Sri Wahyuni (2014) yang menyatakan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian dari Pautina Indriyani (2011) yang menyatakan secara parsial dan simultan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Penelitian lainnya oleh Iqbal Nasution

(2009), penelitian tersebut menyatakan bahwa penyajian neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan pemerintah daerah maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar. Wajar berarti penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan SAP, kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan secara lengkap, disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah terdapat sistem pengendalian intern yang efektif dalam hal pelaporan/penyajian laporan keuangan.

#### **F. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Responden penelitian ini terbatas pada pegawai bagian keuangan di SKPD Kabupaten Temanggung, sehingga kemungkinan akan mengurangi generalisasi dari hasil penelitian ini.
2. Sampel penelitian tidak diklasifikasikan berdasarkan pemahaman responden tentang variabel penelitian, Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan. Setelah penelitian, diketahui bahwa tidak semua responden yang sesuai dengan kriteria sampel penelitian memahami kewajaran penyajian laporan keuangan. Pegawai bagian keuangan SKPD jabatan Pembuat Dokumen dan Pencatat Pembukuan sebagian besar kurang memahami hal tersebut. Pembuat Dokumen dan Pencatat Pembukuan melaksanakan

tanggungjawab sesuai Tugas, Pokok, Fungsi (TUPOKSI) yaitu terkait pembuatan dokumen atas transaksi/kegiatan dan terkait pencatatan nilai transaksi/kegiatan. Kedua jabatan tersebut terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan SKPD, tetapi tidak terlibat langsung dalam penyajian Laporan Keuangan SKPD. Akibatnya, terdapat kemungkinan jawaban responden atas pernyataan dalam kuesioner bias dan tidak menunjukkan pemahaman responden yang sebenarnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Uji t statistik untuk variabel Kesesuaian dengan SAP menghasilkan nilai t hitung 3,947 lebih dari nilai t tabel sebesar 1,654 ( $3,947 > 1,654$ ) dan nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,050. Hal ini berarti apabila Kesesuaian laporan keuangan dengan SAP semakin meningkat maka Akuntabilitas Keuangan akan naik.
2. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Uji t statistik untuk variabel Kecukupan Pengungkapan menghasilkan nilai t hitung 1,864 lebih dari nilai t tabel sebesar 1,654 ( $1,864 > 1,654$ ) dan nilai signifikansi 0,032 yang berarti lebih kecil dari 0,050. Hal ini berarti apabila Kecukupan Pengungkapan laporan keuangan semakin meningkat maka Akuntabilitas Keuangan akan naik.
3. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Undang-undang ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Uji t statistik untuk variabel Kepatuhan terhadap

Undang-undang menghasilkan nilai  $t$  hitung 1,806 lebih dari nilai  $t$  tabel sebesar 1,654 ( $1,806 > 1,654$ ) dan nilai signifikansi 0,037 yang berarti lebih kecil dari 0,050. Hal ini berarti apabila Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan dalam aspek Kepatuhan terhadap Undang-undang semakin meningkat maka Akuntabilitas Keuangan akan naik.

4. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektifitas Sistem Pengendalian Intern ( $X_4$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Uji  $t$  statistik untuk variabel Efektifitas Sistem Pengendalian Intern menghasilkan nilai  $t$  hitung 7,555 lebih dari nilai  $t$  tabel sebesar 1,654 ( $7,555 > 1,654$ ) dan nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,050. Hal ini berarti apabila Efektifitas Sistem Pengendalian Intern semakin meningkat maka Akuntabilitas Keuangan akan naik.
5. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dilihat dari hasil regresi linear berganda bahwa yang menghasilkan nilai  $F$  Hitung sebesar  $15,139 > F$  tabel 2,430 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001. Pengaruh dari keempat variabel terhadap Akuntabilitas Keuangan secara individu berdasarkan nilai koefisien regresi untuk variabel Kesesuaian dengan SAP sebesar 0,169, variabel Kecukupan Pengungkapan sebesar 0,050, variabel Kepatuhan terhadap

Undang-undang sebesar 0,065, dan variabel Efektifitas Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,720. Semua nilai koefisien regresi memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang, dan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, maka Akuntabilitas Keuangan akan semakin tinggi

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan terkait keterbatasan penelitian ini, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung
  - a. Publikasi dan aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Temanggung lebih diperhatikan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Dalam penelitian ditemukan bahwa skor yang diberikan responden pada butir pernyataan variabel Akuntabilitas Keuangan untuk indikator Transparansi untuk poin ini rendah.
  - b. Upaya peningkatan pemahaman terkait Akuntansi berbasis Akrual Pegawai bagian Keuangan SKPD Kabupaten Temanggung perlu dilakukan. Perlunya peningkatan pemahaman Pegawai bagian Keuangan karena berpengaruh pada kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah yang saat ini berbasis Akrual.

Hal ini dikarenakan rendahnya rata-rata skor yang diberikan responden pada butir pernyataan variabel Kesesuaian terhadap SAP untuk indikator laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi.

- c. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban lebih diperhatikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecukupan pengungkapan atas informasi keuangan terkait transaksi/kegiatan dalam pemda. Permasalahan dalam Penyajian LKPD Kabupaten Temanggung TA 2104 juga terkait dengan pengungkapan aset yang belum memadai dan kewajiban yang belum terpenuhi. Hal ini seiring dengan rendahnya skor yang diberikan responden pada butir pernyataan variabel Kecukupan Pengungkapan untuk indikator pengungkapan informasi pos-pos aset dan kewajiban.
- d. Instansi SKPD diharapkan dapat melakukan verifikasi atas penerapan asas bruto pada nilai transaksi/kegiatan. Dalam penelitian ditemukan bahwa skor yang diberikan responden pada butir pernyataan variabel Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan untuk indikator kepatuhan pada Ketentuan Penyajian Informasi Keuangan berdasarkan Asas Bruto untuk poin ini rendah.
- e. Perbaikan struktur pengendalian intern pada SKPD Kabupaten Temanggung perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan rendahnya rata-rata skor yang diberikan responden pada butir pernyataan variabel Efektivitas Sistem Pengendalian Intern untuk indikator Struktur Pengendalian Intern.

f. Kontribusi tertinggi pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan yaitu Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, disarankan kepada Pemda Kabupaten Temanggung lebih meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern. Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, sangat diperlukan penerapan sistem pengendalian intern secara efektif. Sistem pengendalian intern dapat digunakan oleh manajemen pemerintah untuk merencanakan dan mengendalikan operasi atau kegiatan pemerintah. Penerapan sistem pengendalian intern dalam manajemen pemerintah dapat dilakukan dengan cara memberi pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi untuk mencapai tujuan/sasaran dan menjamin informasi laporan keuangan yang berkualitas.

## 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Hasil penelitian ini yaitu Akuntabilitas Keuangan hanya bisa dijelaskan sebesar 28,5% oleh variabel bebas Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Bagi penelitian yang akan datang, sebaiknya dapat menambahkan variabel lain.
- b. Penyebaran kuisioner dapat disertai dengan metode wawancara atau terlibat tatap muka langsung dengan responden agar responden dapat lebih memahami pernyataan kuisioner yang diberikan oleh peneliti



sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Selain itu, penelitian ini terkait Akuntabilitas Keuangan, sebaiknya peneliti selanjutnya melakukan observasi dan kajian secara lebih mendalam dan menyeluruh di semua tempat yang akan dijadikan tempat penelitian

- c. Responden yang digunakan dalam penelitian selanjutnya sebaiknya lebih luas, karena pada penelitian ini lingkup populasi masih sempit, hanya sebatas pada satu wilayah pemerintahan. Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya dapat memperluas cakupan area penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2008). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (Expsure Draft)*. Jakarta: KSPKN
- \_\_\_\_\_. (2014). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*. Jakarta: BPK RI.
- \_\_\_\_\_. (2015). “Seluruh LHP LKPD TA 2014 Telah Diserahkan”, 4 Juni 2015. Diakses melalui <http://semarang.bpk.go.id/?p=5793> pada tanggal 10 November 2015
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Diana Sari. (2012). Pengaruh SPI Pemerintah, Implementasi SP, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Kualitas LKPD dan Implikasinya terhadap Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang Baik. *Indonesian Journal of Economics and Bussiness*. Hlm 116 – 124.
- Dyah Setyaningrum dan Febriyani Syafitri. (2012). Analisa Penaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 9 No. 2 Tahun 2014). Hlm 154 – 170.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate denga Program IBM SPSS 19*. Edisi ke 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko, T. Hani. (1995). *Manajemem*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hapsari, Andhisa Setya. (2008). “Tinjauan Kebermanfaatan Laporan Keuangan Auditan BPK (Reflrksi Eksistensi dan Peranan BPK)”. Diakses melalui <https://www.assassinsborn.multiply.com/jurnal/item/3/tinjauan-kebermanfaatan-laporan-keuangan-auditan-BPK.com> pada 2 November 2015
- Hariyanto, Agus. (2012). Penggunaan Basis Akrua dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. *Dharma Ekonomi* (Online). Vol. 36 No. 36. Diakses dari <http://ejurnal.stiedharmaputra-smg.ac.id> pada 2 November 2015
- Hendriksen, Eldon S. (2002). *Teori Akuntansi Jilid 1 Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga

- Husein Umar. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- LAN dan BPKP. (2011). *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, Moh, dkk. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mira Tania. (2010). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Kota Subang. *Skripsi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Standar Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI No 03.01 Tahun 2008
- Putu Sri Wahyuni. (2014). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintahan Kabupaten Badung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)* (Vol 2 No 1 Tahun 2014). Hlm 64 – 75.

- Renyowijoyo, Muindro. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Ritonga, Irwan Taufiq. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah.
- Romney, Marshall, dan Paul Steinbart. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- [Saufi Iqbal Nasution](#) (2010). Pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sekaran, Uma. (2007). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku 1 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2009). *Dasar–Dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukhemi. (2010). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol 5,
- Surya Metta Silany. (2013). Pengaruh penyajian neraca daerah dan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah : (studi kasus pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung). *Skripsi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia
- Sutrisno Hadi. (2004). *Analisis Regresi*. Yogyakarta: Andi Offset.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1**  
**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**LAMPIRAN : III**

**PERDA NO. :**

**TANGGAL :**



**NERACA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**TEMANGGUNG**



**PER 31 DESEMBER 2014**



**NERACA DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
 Per 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah Penuh)

NO	URAIAN	REF	Saldo Per 31 Desember 2014 (Audited)	Saldo Per 31 Desember 2013 (Restatement)
1	2	3	4	5
1	ASET	V.I.A		
2	ASET LANCAR	V.I.A		
3	Kas di Kas Daerah	V.I.A.1.a	169.025.327.575,00	91.906.927.721,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	V.I.A.1.b	284.452.334,00	597.584.215,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	V.I.A.1.c	173.967.372,00	11.579.575,00
6	Kas di BLUD	V.I.A.1.d	17.907.390.974,00	10.561.433.580,00
7	Kas di Rekening JKN	V.I.A.1.e	5.087.173.688,00	0,00
8	Kas di Bendahara BOS	V.I.A.1.f	1.328.286.643,00	0,00
9	Piutang	V.I.A.2	0,00	0,00
10	Piutang Bagi Hasil Pajak	V.I.A.2.a	9.113.746.216,35	0,00
11	Piutang Pajak	V.I.A.2.b	7.091.212.655,00	6.193.691.290,00
12	Penyisihan Piutang Pajak	V.I.A.2.c	(5.176.986.053,00)	(4.822.149.810,00)
13	Piutang Retribusi	V.I.A.2.d	614.709.993,00	918.733.459,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi	V.I.A.2.e	(255.262.159,00)	(168.994.737,00)
15	Belanja Dibayar di Muka	V.I.A.2.f	377.189.489,14	0,00
16	Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	V.I.A.2.g	3.488.349.722,00	512.045.272,00
17	Piutang Lain-lain	V.I.A.2.h	6.305.461.341,00	6.472.647.821,00
18	Penyisihan Piutang Lain-lain	V.I.A.2.i	(67.747.225,00)	(59.813.093,00)
19	Piutang Bunga Deposito	V.I.A.2.j	300.598.933,56	0,00
20	Bagian Lancar TPTGR	V.I.A.2.h	29.833.029,00	33.333.029,00
21	Persediaan	V.I.A.3	12.398.256.437,90	9.465.296.890,26
22	Jumlah Aset Lancar		228.025.960.945,95	121.622.315.212,26
23	INVESTASI JANGKA PANJANG	V.I.A.4		
24	Investasi Non permanen	V.I.A.4.a		
25	Investasi Non permanen lainnya	V.I.A.4.a	1.680.226.153,43,00	4.465.716.012,00
26	Jumlah Investasi Non Permanen		1.680.226.153,43,00	4.465.716.012,00
27	Investasi Permanen	V.I.A.4.b		
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.I.A.4.b	88.482.799.639,05	68.721.269.053,50
29	Jumlah Investasi Permanen		88.482.799.639,05	68.721.269.053,50
30	Jumlah Investasi Jangka Panjang		90.163.026.792,48	73.186.985.065,50
31	ASET TETAP	V.I.A.5		
32	Tanah	V.I.A.5.a	512.865.902.990,00	508.821.079.494,00
33	Peralatan dan Mesin	V.I.A.5.b	266.759.074.237,00	232.555.227.820,00
34	Gedung dan Bangunan	V.I.A.5.c	745.138.735.795,00	719.664.857.548,00



No	URAIAN	REF	Saldo Awal 31 Desember 2013 (Audited)	Saldo Akhir 31 Desember 2014 (Audited)
1	2	3	4	5
35	Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.I.A.5.d	1.048.693.364.956,00	995.006.970.943,00
36	Aset Tetap Lainnya	V.I.A.5.e	50.916.710.485,10	53.721.016.707,00
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.I.A.5.f	47.095.660.161,00	2.081.675.000,00
38	Akumulasi Penyusutan		(874.807.054.297,89)	(768.604.604.364,23)
39	Jumlah Aset Tetap		1.796.662.394.326,21	1.743.246.223.147,77
40	ASET LAINNYA	V.I.A.7		
41	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	V.I.A.7.a	801.989.539,00	800.638.976,00
42	Aset Tak Berwujud	V.I.A.7.b	2.108.679.017,00	2.765.768.898,00
43	Aset Lain	V.I.A.7.c	70.252.358.414,00	20.585.910.065,00
44	Akumulasi Penyusutan		(1.692.893.049,50)	(1.759.164.247,75)
45	Jumlah Aset Lainnya		71.470.133.920,50	22.393.153.691,25
46	JUMLAH ASET		2.186.321.514.985,14	1.960.448.677.116,78
47	KEWAJIBAN	V.I.A.8		
48	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	V.I.A.8		
49	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.I.B.8.a	96.167.580,00	78.377.627,00
50	Utang Bunga	V.I.B.8.b	48.540.538,00	0,00
51	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	V.I.B.8.c	18.000.000.000,00	0,00
52	Pendapatan Diterima di muka	V.I.B.8.d	1.128.686.004,55	866.660.397,00
53	Utang Belanja	V.I.B.8.e	2.301.650.707,00	3.058.985.210,00
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	V.I.B.8.f	5.529.298.307,00	4.623.907.385,00
55	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		27.104.343.136,55	8.627.930.619,00
56	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
57	Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat		0,00	0,00
58	Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
60	Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
61	Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
62	Utang Jangka Panjang Lainnya		19.579.771.350,00	0,00
63	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		19.579.771.350,00	0,00
64	JUMLAH KEWAJIBAN		46.684.114.486,55	8.627.930.619,00
65	EKUITAS DANA	V.I.A.9	2.139.637.400.498,59	1.951.820.746.497,78
66	EKUITAS	V.I.A.9.1	2.139.637.400.498,59	1.951.820.746.497,78
67	JUMLAH EKUITAS DANA		2.139.637.400.498,59	1.951.820.746.497,78
68	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.186.321.514.985,14	1.960.448.677.116,78

Temanggung, 2015

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2014**

NO	KETERANGAN	JUMLAH
<b>1</b>	<b>Kas di Kas Umum Daerah</b>	<b>Rp 169.025.327.575,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Kas Umum Daerah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:	
	- Rekening Nomor 1.014-000431	Rp 79.019.327.575,00
	- Rekening Deposito di Bank Jateng Cabang Temanggung	Rp 80.000.000.000,00
	- Rekening Deposito di Bank Syariah Mandiri No. Rek D 462090	Rp 1.000.000.000,00
	- Rekening Deposito di Bank Syariah Mandiri No. Rek D 462057	Rp 1.500.000.000,00
	- Rekening Deposito di BRI Temanggung No. 0102-01-002839-40-7	Rp 2.000.000.000,00
	- Rekening Deposito di Bank BTN Magelang No. 000081.40.000407.2	Rp 1.500.000.000,00
	- Rekening Deposito di Bank Mandiri Cabang Parakan No. 136-02-0440947-6	Rp 1.000.000.000,00
	- Rekening Deposito di Bank BRI Cabang Parakan No. 0262-01-002370-40-9	Rp 1.000.000.000,00
	- Rekening Deposito di Bank BNI Cabang Temanggung No. 0337738864	Rp 1.000.000.000,00
	- Rekening Deposito di Bank Mandiri Cabang Temanggung No. 136-02-0443101-6	Rp 1.000.000.000,00
	- RKUD Ban BNI Temanggung No. Rek 247763347	Rp 1.000.000,00
	- RKUD Bank BNI Capem Parakan No. Rek 248077459	Rp 1.000.000,00
	- RKUD Bank Mandiri Temanggung No. Rek 136.00.10711403	Rp 1.000.000,00
	- RKUD Bank Mandiri Parakan No. Rek 136.00.10712344	Rp 1.000.000,00
	- RKUD Bank BRI Temanggung No. Rek 0102-01-000553-30-6	Rp 1.000.000,00
	- RKUD Bank BRI Parakan No. Rek 0262-01-000183-30-18	Rp 1.000.000,00
<b>2</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Rp 284.452.334,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 yang terdiri dari:	
	- Sisa UP/GU/TU di Bendahara Pengeluaran yang disetor TA 2015	Rp 188.284.754,00
	- Pajak Tahun 2014 yang disetor pada Tahun 2015	Rp 96.167.580,00
	- Jasa Giro Tahun 2014 yang disetor pada Tahun 2015	Rp 0,00
<b>3</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>Rp 173.967.372,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan dari penerimaan Pasar Temanggung Permai yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum disetor ke RKUD pada Disperindagkop dengan rincian sebagai berikut:	
	- Penerimaan setoran Pasar Temanggung Permai	Rp 166.807.500,00
	- Jasa giro di Rekening UPT Pasar Temanggung	Rp 3.670.672,00
	- Penerimaan Dana Bergulir LED	Rp 3.067.600,00
	- Bunga tabungan rekening dana bergulir	Rp 421.600,00
<b>4</b>	<b>Kas di BLUD</b>	<b>Rp 17.907.390.974,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di BLUD yang terdiri dari:	
	- Kas BLUD Mandiri Syariah	Rp 12.290.429.177,00
	- Kas BLUD BPD di Bank Jateng Cabang Temanggung	Rp 5.616.961.797,00
<b>5</b>	<b>Kas Rekening Bendahara JKN di Bank Jateng Cabang</b>	<b>Rp 5.087.173.688,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Jaminan Kesehatan Nasional di 24 Puskesmas yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum disetor ke RKUD	
<b>6</b>	<b>Kas di BOS</b>	<b>Rp 1.328.286.643,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo Kas BOS yang masih berada di rekening sekolah-sekolah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum disetor ke RKUD	

NO	KETERANGAN	JUMLAH
<b>7</b>	<b>Piutang Pajak</b>	<b>Rp 6.039.486.561,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Pajak Kabupaten	
	Temanggung per 31 Desember 2014 yang terdiri dari:	
	- Piutang Pajak Restoran	Rp 5.718.850,00
	- Piutang Pajak Reklame	Rp 92.075.380,00
	- Piutang Pajak Hiburan	Rp 1.325.000,00
	- Piutang Pajak Bahan Galian Gol C	Rp 5.607.720,00
	- Piutang Pajak Air Tanah	Rp 6.125.535,00
	- Piutang Pajak BPHTB	Rp 763.668,00
	- Piutang PBB	Rp 5.927.870.408,00
	- Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum	Rp 1.051.726.094,00
	Penyisihan Piutang Pajak	(5.176.986.053,00)
<b>8</b>	<b>Piutang Retribusi</b>	<b>Rp 359.447.834,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo piutang retribusi Kabupaten	
	Temanggung per 31 Desember 2014 yang terdiri dari:	
	- <i>Piutang Retribusi Parkir</i>	
	- Piutang Parkir Umum	Rp 351.980.900,00
	- Piutang Parkir Khusus	Rp 125.771.500,00
	- <i>Piutang Retribusi KP3M</i>	
	- Piutang Retribusi HO	Rp 9.006.700,00
	- Piutang Retribusi IT	Rp 0,00
	- Piutang Retribusi PMT	Rp 53.975.293,00
	- <i>Piutang Retribusi DPU</i>	
	- Piutang Retribusi IMB	Rp 73.975.600,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (255.262.159,00)
<b>9</b>	<b>Belanja Dibayar di Muka</b>	<b>377.189.469,14</b>
	Jumlah tersebut merupakan beban tahun 2015 yang sudah dibayar	
	per 31 Desember 2014	
<b>10</b>	<b>Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</b>	<b>Rp 3.488.349.722,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Hasil Pemanfaatan	
	Kekayaan Daerah per 31 Desember 2014 yang terdiri dari:	
	- <i>Piutang Sewa Los/Kios Pasar</i>	
	- Piutang Pasar Wage Ngadirejo	Rp 193.121.250,00
	- Piutang Pasar Kliwon Temanggung	Rp 190.505.472,00
	- Piutang Pasar Temanggung Permai	Rp 3.080.170.500,00
	- <i>Piutang Sewa tanah bengkok</i>	Rp 24.552.500,00
<b>11</b>	<b>Piutang Lain-lain</b>	<b>Rp 6.237.714.116,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Lain-lain Kabupaten	
	Temanggung per 31 Desember 2014 yang terdiri dari:	
	- <i>Piutang RSU</i>	
	- Piutang pasien pada RSUD	Rp 58.083.485,00
	- Piutang Pasien Umum, Jamsostek	Rp 381.453.134,00
	- Piutang Jaminan Kesehatan Temanggung	Rp 152.176.290,00
	- Piutang TKPI/PWKWI	Rp 4.023.200,00
	- Piutang Asuransi Kesehatan	Rp 2.652.800,00
	- Piutang BPJS Rawat Inap	Rp 3.186.117.200,00
	- Piutang BPJS Rawat Jalan	Rp 1.331.179.000,00
	- Piutang Obat kronis	Rp 609.292.190,00
	- <i>Piutang Denda CPNS yang mengundurkan diri</i>	Rp 10.000.000,00
	- <i>Piutang Lainnya</i>	Rp 570.484.042,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain	Rp (67.747.225,00)
<b>12</b>	<b>Piutang Bunga Deposito</b>	<b>Rp 300.598.933,56</b>
	Piutang tersebut merupakan bunga deposito yang seharusnya	
	diterima Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2014	

NO	KETERANGAN	JUMLAH
<b>13</b>	<b>Bagian Lancar TPTGR</b>	<b>Rp 29.833.029,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo bagian lancar TPTGR Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2014	
<b>14</b>	<b>Persediaan</b>	<b>Rp 12.398.256.437,90</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2014 yang terdiri dari:	
	- Persediaan ATK, barang cetakan dan bahan pakai habis lainnya	Rp 1.310.120.657,96
	- Persediaan obat di DKK dan Puskesmas	Rp 6.954.915.435,94
	- Persediaan obat dan alat kesehatan dan bahan lainnya di RSUD	Rp 2.462.340.643,00
	- Persediaan obat dan alat kontrasepsi pada BKB dan PP	Rp 1.458.140.807,00
	- Persediaan obat Dinakan	Rp 21.724.700,00
	- Persediaan aspal di DPU	Rp 18.774.194,00
	- Persediaan bibit tanaman di Dintanbunhut	Rp 172.240.000,00
<b>15</b>	<b>Investasi Non Permanen Lainnya</b>	<b>Rp 1.680.226.153,43</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo investasi non permanen lainnya Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2014 yang terdiri dari:	
	<i>Dana Bergulir di Setda</i>	
	- Program Kredit Lunak	Rp 128.700.675,00
	- Dana Bergulir LED	Rp 258.332.820,00
	- Dana Bergulir Ternak	Rp 1.286.104.471,43
	<i>Dana Bergulir di Dintanbunhut</i>	
	- Dana Bergulir Handtracktor	Rp 0,00
	<i>Dana Bergulir di Disperindagkop</i>	
	- Dana Bergulir Jawamas	Rp 0,00
	- Dana Bergulir UKM	Rp 7.088.187,00
	- Dana Bergulir KSP/USP	Rp 0,00
	- Dana Bergulir Sentra UKM	Rp 0,00
<b>16</b>	<b>Investasi Permanen</b>	<b>Rp 88.482.799.639,05</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2014 yang terdiri dari:	
	- PD BPR Bank Pasar	Rp 27.814.585.889,61
	- PT Bank Jateng	Rp 16.345.000.000,00
	- PD BPR BKK Temanggung	Rp 10.327.343.250,12
	- PD BKK Pringsurat	Rp 4.736.272.112,22
	- PD Apotik Waringin Mulyo	Rp 2.201.996.228,25
	- PD Air Minum Temanggung	Rp 13.563.568.092,10
	- BUMD Aneka Usaha	Rp 4.971.306.126,75
	- PT PRPP Jawa Tengah	Rp 90.000.000,00
	- PD. Bhumi Phala Wisata	Rp 8.432.727.940,00
<b>17</b>	<b>Aktiva Tetap</b>	<b>Rp 1.796.662.394.326,21</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2014 yang terdiri dari:	
	- Tanah	Rp 512.865.902.990,00
	- Peralatan dan Mesin	Rp 266.759.074.237,00
	- Gedung dan Bangunan	Rp 745.138.735.795,00
	- Jalan, Irigasi, Jembatan, dan Jaringan	Rp 1.048.693.364.956,00
	- Aset Tetap Lainnya	Rp 50.916.710.485,10
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 47.095.660.161,00
	- Akumulasi Penyusutan	Rp (874.807.054.297,89)
<b>18</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>Rp 71.470.133.920,50</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Lain-lain Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2014 yang terdiri dari:	
	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp 801.989.539,00
	- Aset Tak Berwujud	Rp 2.108.679.017,00
	- Aset Lainnya	Rp 70.252.358.414,00
	- Akumulasi Penyusutan	Rp (1.692.893.049,50)

NO	KETERANGAN	JUMLAH
19	<b>Utang Perhitungan Fihak Ketiga</b>	Rp 96.167.580,00
	Jumlah tersebut merupakan saldo Utang PFK yang terdiri dari:	
	- Pajak Tahun 2014 yang disetorkan pada Tahun 2015	Rp 96.167.580,00
20	<b>Utang Bunga</b>	Rp 48.540.538,00
	Jumlah tersebut merupakan utang bunga pinjaman dari Pusat	
	Investasi Pemerintah (PIP) untuk pembangunan Pasar Legi Parakan	
21	<b>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	Rp 18.000.000.000,00
	Jumlah tersebut merupakan utang Pemerintah Kabupaten	
	Temanggung ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk	
	pembangunan Pasar Legi Parakan	
22	<b>Pendapatan Diterima di Muka</b>	Rp 1.128.686.004,55
	Jumlah tersebut merupakan pendapatan yang diterima di muka	
	per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:	
	- DPPKAD	Rp 142.464.667,55
	- KP3M	Rp 182.612.862,00
	- DPU	Rp 8.746.017,00
	- Setda	Rp 794.862.458,00
23	<b>Utang Belanja</b>	Rp 2.301.650.707,00
	Jumlah tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten	
	Temanggung yang harus dibayar per 31 Desember 2014	
24	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	Rp 5.529.298.307,00
	Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya,	
	yaitu:	
	- Utang Retensi/Jaminan Pemeliharaan Tahun Anggaran 2014 yang	Rp 5.529.298.307,00
	dianggarkan pada Tahun 2015	
25	<b>Ekuitas</b>	Rp 2.139.637.400.498,59
	Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Lancar Pemerintah	
	Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2014 yang merupakan	
	kekayaan bersih pemerintah daerah dan hasil selisih aktiva lancar	
	dan kewajiban	

Temanggung, April 2015

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

**LAMPIRAN : V**

PERDA NO. :

TANGGAL :



**LAPORAN ARUS KAS  
PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG**



**TAHUN ANGGARAN 2014**



**LAPORAN ARUS KAS  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 dan Tahun 2013

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2014 (Audited)	TAHUN 2013 (Audited)
1	2	3	4	5
I.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.I.C.1		
1	Arus Kas Masuk	V.I.C.1.1		
2	Pajak Daerah	V.I.C.1.1.a	29.822.602.704,00	25.583.570.757,00
3	Retribusi daerah	V.I.C.1.1.b	20.299.495.547,00	15.480.551.151,00
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	V.I.C.1.1.c	11.246.688.910,00	11.287.250.631,00
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.I.C.1.1.d	16.844.934.765,00	10.754.470.771,00
6	Dana Bagi Hasil Pajak	V.I.C.1.1.e	18.324.589.186,00	23.225.082.234,00
7	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	V.I.C.1.1.f	25.187.375.575,00	27.003.376.557,00
8	Dana Alokasi Umum	V.I.C.1.1.g	708.764.753.000,00	651.171.674.000,00
9	Dana Alokasi Khusus	V.I.C.1.1.h	56.702.810.000,00	41.627.620.000,00
10	Dana Otonomi Khusus	V.I.C.1.1.i	0,00	0,00
11	Dana Penyesuaian	V.I.C.1.1.j	163.186.074.000,00	136.253.400.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Provinsi	V.I.C.1.1.k	58.804.804.253,00	43.787.719.599,00
13	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	V.I.C.1.1.l	33.736.550.000,00	28.268.425.036,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	V.I.C.1.1.m	0,00	0,00
15	Hibah	V.I.C.1.1.n	725.668.600,00	428.077.240,00
16	Dana Darurat	V.I.C.1.1.o	0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya	V.I.C.1.1.p	0,00	0,00
18	Jumlah		1.143.428.346.540,00	1.014.871.217.976,00
19	Arus Kas Keluar	V.I.C.1.2		
20	Belanja Pegawai	V.I.C.1.2.a	647.810.116.640,00	609.756.162.002,00
21	Belanja Barang dan Jasa	V.I.C.1.2.b	131.338.915.593,00	118.402.330.527,00
22	Belanja Bunga	V.I.C.1.2.c	1.006.766.714,00	1.352.611.525,00
23	Belanja Subsidi	V.I.C.1.2.d	0,00	0,00
24	Belanja Hibah	V.I.C.1.2.e	70.509.291.100,00	58.141.919.542,00
25	Belanja Bantuan Sosial	V.I.C.1.2.f	17.601.444.713,00	29.564.076.045,00
26	Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa	V.I.C.1.2.g	39.677.734.025,00	45.249.304.525,00
26	Belanja Bantuan Keuangan ke Partai Politik	V.I.C.1.2.h	969.204.175,00	907.606.495,00



No	URAIAN	REF	TAHUN 2014 (Audited)	TAHUN 2013 (Audited)
1	2	3	4	5
27	Belanja Tidak Terduga	V.I.C.1.2.i	416.416.000,00	221.845.000,00
28	Belanja Bagi Hasil Pajak & Retribusi ke Pem Desa	V.I.C.1.2.j	4.507.625.240,00	4.316.725.502,00
29	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	V.I.C.1.2.k	0,00	0,00
30	Jumlah		913.837.514.200,00	867.912.581.163,00
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		229.588.832.340,00	146.958.636.813,00
II.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIASET NON KEUANGAN	V.I.C.2		
32	Arus Kas Masuk	V.I.C.2.1		
33	Pendapatan Penjualan atas Tanah	V.I.C.2.1.a	0,00	0,00
34	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	V.I.C.2.1.b	103.600.000,00	7.895.000,00
35	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	V.I.C.2.1.c	178.525.000,00	868.351.250,00
36	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.I.C.2.1.d	0,00	0,00
37	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	V.I.C.2.1.e	0,00	4.250.000,00
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	V.I.C.2.1.f	64.370.000,00	0,00
39	Jumlah		346.495.000,00	880.496.250,00
40	Arus Kas Keluar	V.I.C.2.2		
41	Belanja Tanah	V.I.C.2.2.a	3.885.239.500,00	3.312.069.000,00
42	Belanja Peralatan dan Mesin	V.I.C.2.2.b	48.064.799.130,00	16.357.195.053,00
43	Belanja Gedung dan Bangunan	V.I.C.2.2.c	74.526.704.516,00	40.945.179.551,00
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.I.C.2.2.d	59.592.972.600,00	39.348.864.600,00
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	V.I.C.2.2.e	1.005.043.404,00	472.399.300,00
46	Belanja Aset Lainnya	V.I.C.2.2.f	0,00	0,00
47	Jumlah		187.074.759.150,00	100.435.707.504,00
48	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/ Aset Nonkeuangan		(186.728.264.150,00)	(99.555.211.254,00)
III.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	V.I.C.3		
49	Arus Kas Masuk	V.I.C.3.1		
50	Pencairan Dana Cadangan	V.I.C.3.1.a	0,00	12.867.002.883,00
51	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah Dipisahkan	V.I.C.3.1.b	0,00	0,00
52	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	V.I.C.3.1.c	37.579.771.350,00	0,00
53	Penerimaan Kembali Pinjaman	V.I.C.3.1.d	110.592.998,00	243.081.070,00
54	Penerimaan Piutang Daerah	V.I.C.3.1.e	0,00	0,00
55	Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi)	V.I.C.3.1.f	5.447.188.464,00	4.527.353.885,00
56	Jumlah		43.137.552.812,00	17.637.437.838,00
57	Arus Kas Keluar	V.I.C.3.2		
58	Pembentukan Dana Cadangan	V.I.C.3.2.a	0,00	0,00
59	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	V.I.C.3.2.b	4.500.000.000,00	4.533.609.000,00
60	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	V.I.C.3.2.c	0,00	0,00



NO	URAIAN	REF	TAHUN 2014 (Audited)	TAHUN 2013 (Audited)
1	2	3	4	5
61	Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)	V.I.C.3.2.d	4.548.255.185,00	4.910.546.394,00
62	Jumlah		9.048.255.185,00	9.444.155.394,00
63	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		34.089.297.627,00	8.193.282.444,00
IV.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	V.I.C.4		
64	Arus Kas Masuk	V.I.C.4.1		
65	Penerimaan kembali Sisa UP Tahun lalu	V.I.C.4.1.a	518.974.493,00	3.012.894.802,00
66	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	V.I.C.4.1.b	54.316.303.497,00	47.455.874.555,00
67	Jumlah		54.835.277.990,00	50.468.769.357,00
68	Arus Kas Keluar	V.I.C.4.2		
69	Sisa UP Tahun berjalan	V.I.C.4.2.a	188.284.754,00	518.974.493,00
70	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	V.I.C.4.2.b	54.316.303.497,00	47.455.874.555,00
71	Jumlah		54.504.588.251,00	47.974.849.048,00
72	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		330.689.739,00	2.493.920.309,00
73	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas		77.280.556.556,00	58.090.628.312,00
74	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Umum Daerah		91.918.739.391,00	33.828.111.079,00
75	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah		169.199.294.947,00	91.918.739.391,00
76	a. Saldo Akhir Kas di BUD terdiri dari:			
	Kas di Kasda (Rek Koran per 31 Desember 2014)		169.025.327.575,00	91.906.927.721,00
78	Kas di Bendahara Penerimaan		173.967.372,00	11.579.575,00
79	Kas di Bendahara Pengeluaran (Jasa Giro)		0,00	232.095,00
80	b. Saldo di Bendahara Pengeluaran (Non Jasa Giro)		284.452.334,00	597.352.120,00
81	c. Kas di BLUD		17.907.390.974,00	10.561.433.580,00
82	d. Kas di Bendahara JKN		5.087.173.688,00	0,00
83	e. Kas di Bendahara BOS		1.328.286.643,00	0,00
84	Saldo Akhir Kas		193.806.598.586,00	103.077.525.091,00

Temanggung, 2015

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

**LAMPIRAN : VI**

**PERDA NO. :**

**TANGGAL :**



**LAPORAN  
PERUBAHAN EKUITAS  
PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG**



**TAHUN ANGGARAN 2014**



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 dan Tahun 2013

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2014 (Audited)	TAHUN 2013 (Audited)
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL		1.951.820.746.497,78	0,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		215.421.787.170,99	0,00
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN		(27.605.133.170,18)	0,00
	RK SKPKD		(980.424.050.049,00)	0,00
	SP2D-CP 2014		980.850.088.437,00	0,00
	Setor UYHD Tahun 2013		(426.038.388,00)	0,00
	Setor Pendapatan dari SKPD		(66.530.254.204,00)	0,00
	Pendapatan dari SKPD		66.530.254.204,00	0,00
	Koreksi Kurang Catat/Lebih Catat Piutang		471.849.722,00	0,00
	Koreksi Nilai Investasi Permanen		11.817.839.077,44	0,00
	Koreksi penyisihan Piutang Pajak		(701.430.417,00)	0,00
	Koreksi Nilai Utang Tahun 2013		(430.871.496,00)	0,00
	Koreksi Nilai LLPAD Yang Sah		(481.323.344,00)	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap		(11.898.381.685,21)	0,00
	Koreksi Nilai Penyusutan		(26.313.973.822,41)	0,00
	Barang Ekstrakomptabel		(108.708.205,00)	0,00
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		39.867.000,00	0,00
	SELISIHREVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
4	EKUITAS AKHIR		2.139.637.400.498,59	0,00

Temanggung, 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

**LAMPIRAN : II**

PERDA NO. :

TANGGAL :



**LAPORAN PERUBAHAN  
SALDO ANGGARAN LEBIH  
PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG**



**TAHUN ANGGARAN 2014**



**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 dan Tahun 2013

*(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2014 (Audited)	TAHUN 2013 (Audited)
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		102.999.147.464,00	41.776.547.255,00
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		102.999.147.464,00	41.776.547.255,00
3	Sub Total (1 - 2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		192.382.144.363,00	102.999.147.464,00
5	Sub Total (3 + 4)		192.382.144.363,00	102.999.147.464,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir		192.382.144.363,00	102.999.147.464,00

Temanggung, 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

**LAMPIRAN : IV**

PERDA NO. :

TANGGAL :

**LAPORAN OPERASIONAL  
PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG****TAHUN ANGGARAN 2014**



**LAPORAN OPERASIONAL  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 dan Tahun 2013

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2014 (Audited)	TAHUN 2013 (Audited)
1	2	3	4	5
I.	KEGIATAN OPERASIONAL			
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pajak Daerah		30.406.995.143,45	0,00
4	Retribusi daerah		19.947.697.364,00	0,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan		11.246.688.910,00	0,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		102.563.251.209,56	0,00
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s/d 6)		164.164.632.627,01	0,00
8	PENDAPATAN TRANSFER			
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
10	Dana Bagi Hasil Pajak		18.324.589.186,00	0,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		25.187.375.575,00	0,00
12	Dana Alokasi Umum		708.764.753.000,00	0,00
13	Dana Alokasi Khusus		56.702.810.000,00	0,00
14	JUMLAH TRANSFER-DANA PERIMBANGAN (10 s/d 13)		808.979.527.761,00	0,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			
16	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
17	Dana Penyesuaian		160.166.074.000,00	0,00
18	Dana Insentif Daerah		3.000.000.000,00	0,00
19	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER LAINNYA (16 s/d 18)		163.166.074.000,00	0,00
20	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Provinsi		67.918.550.469,35	0,00
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
23	JUMLAH PEND. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI (21 s/d 22)		67.918.550.469,35	0,00
24	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14+19+23)		1.040.064.152.230,35	0,00
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
26	Pendapatan Hibah		61.695.151.970,00	0,00
27	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
28	Pendapatan Lainnya		33.736.550.000,00	0,00
29	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (26 s/d 28)		95.431.701.970,00	0,00
30	JUMLAH PENDAPATAN		1.299.660.486.827,36	0,00

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2014 (Aud/ta)	TAHUN 2013 (Aud/ta)
1	2	3	4	5
31	<b>BEBAN</b>			
32	Beban Pegawai		660.217.710.836,00	0,00
33	Beban Barang dan Jasa		0,00	0,00
34	Beban Persediaan		115.330.016.723,17	0,00
35	Beban Jasa		84.673.719.751,94	0,00
36	Beban Pemeliharaan		9.013.047.526,00	0,00
37	Beban Perjalanan Dinas		17.347.228.290,00	0,00
38	Beban Bunga		1.055.307.252,00	0,00
39	Beban Subsidi		0,00	0,00
40	Beban Hibah		70.509.291.100,00	0,00
41	Beban Bantuan Sosial		17.601.444.713,00	0,00
42	Beban Penyusutan dan Amortisasi		59.873.071.617,69	0,00
43	Beban Penyisihan Piutang Pajak		354.836.243,00	0,00
44	Beban Penyisihan Piutang Retribusi		86.267.422,00	0,00
45	Beban Penyisihan Piutang lain-lain		7.934.132,00	
46	Beban Cadangan Kerugian Piutang Investasi Non Permanen		2.597.844.609,57	0,00
47	Beban Transfer		45.154.563.440,00	0,00
48	Beban dibayar di muka		0,00	0,00
49	Beban Lain-lain		0,00	0,00
50	<b>JUMLAH BEBAN (32 s/d 49)</b>		<b>1.083.822.283.656,37</b>	<b>0,00</b>
51	<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASI (30-49)</b>		<b>215.838.203.170,99</b>	<b>0,00</b>
52	<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASI</b>			
53	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
55	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
57	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
58	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
59	<b>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (50+57)</b>		<b>215.838.203.170,99</b>	<b>0,00</b>
60	<b>POS LUAR BIASA</b>			
61	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
62	Beban Luar Biasa		416.416.000,00	0,00
63	<b>JUMLAH POS LUAR BIASA (60 s/d 61)</b>		<b>(416.416.000,00)</b>	<b>0,00</b>
64	<b>SURPLUS/(DEFISIT) LO (58+62)</b>		<b>215.421.787.170,99</b>	<b>0,00</b>

Temanggung, 2015

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO



NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2014	REALISASI 2014	BERLEBIH (BERKURANG)	
				Rp	%
6.	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN DAERAH	102.499.147.514	146.196.105.574	(37.303.041.940)	-20,33%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th lalu	102.499.147.514	102.999.147.464	(50)	0,00%
6.1.2	Pencairan dari Dana Cadangan	0	0	0	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	76.500.000.000	37.579.771.350	(38.920.228.650)	-50,88%
6.1.6	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	110.592.998	110.592.998	
6.1.7	Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi)	4.000.000.000	5.506.593.762	1.506.593.762	37,66%
6.2	PENGELUARAN DAERAH	54.090.812.385	9.073.226.385	(45.017.586.000)	-83,23%
6.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	40.000.000.000	0	(40.000.000.000)	
6.2.2	Penyertaan Investasi Pemerintah Daerah	9.500.000.000	4.500.000.000	(5.000.000.000)	-52,63%
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	
6.2.7	Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)	4.590.812.385	4.573.226.385	(17.586.000)	-0,38%
	Pembiayaan Netto	129.408.335.129	137.122.879.189	7.714.544.060	5,96%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	0	192.382.144.363		

Temanggung, Juni 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

TTD

M. BAMBANG SUKARNO

**LAMPIRAN 2**  
**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**  
**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Temanggung tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Temanggung. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2014 menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga berdampak pada penyajian kembali akun-akun pada Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Disamping itu, dari Aset yang tercantum di Neraca tanggal 31 Desember 2014, Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Lainnya telah dilakukan sensus namun masih perlu menindaklanjuti untuk menentukan kejelasan aset senilai Rp9,65 miliar dan aset tetap pada daerah irigasi. Selain itu, sejak Tahun 1995 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menggunakan aset milik PT KAI, atas penggunaan lahan tersebut PT KAI mengenakan sewa yang jumlahnya belum disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung

tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 31B/LHP/BPK/XVIII. SMG/05/2015 dan Nomor 31C/LHP/BPK/XVIII. SMG/05/2015 Tanggal 08 Mei 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 08 Mei 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah  
Pendahuluan Jawab Pemeriksaan,



Elson H.H. Surgear, S.E., M.Acc., Ak., CFE  
Negeri Nomor D-17.235

**LAMPIRAN**

**STATISTIKA PENELITIAN**

**KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**  
**TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN**  
**(STUDI EMPIRIS PADA SKPD KABUPATEN TEMANGGUNG)**

**Lampiran 3. Kuesioner Uji Coba Instrumen**

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu Responden

di tempat

Dengan Hormat,

Saya adalah mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang sedang menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE), dengan ini saya :

Nama : Dian Dharmaningtyas

Nim : 12812141043

Jurusan : Akuntansi

Mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap.

Kuesioner ini akan dijadikan data dalam penelitian saya. Oleh karena itu, Bapak/Ibu/Saudara berkenan untuk membacanya dengan teliti dan menjawab dengan lengkap. Segala informasi yang diperoleh dari kuesioner ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis.

Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Dian Dharmaningtyas

## KUESIONER PENELITIAN

### A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut:

- |    |                           |   |  |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Nama                      | : | .....  |
| 2. | Jenis Kelamin             | : | Pria                      Wanita                 |
| 3. | Umur                      | : | ..... Tahun                                      |
| 4. | Nama SKPD                 | : | .....  |
| 5. | Pendidikan Terakhir       | : | SMA      D3      S1      S2      S3              |
| 6. | Latar Belakang Pendidikan | : | .....  |
| 7. | Jabatan                   | : | PPK<br><br>Bendahara<br><br>Pencatat Pembukuan   |
| 8. | Lama Bekerja              | : | 1 – 5 Tahun<br><br>6 – 10 Tahun<br><br>>10 Tahun |

### DAFTAR PERTANYAAN

#### Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan

#### Kuisiener Variabel Independen : Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu

**SS** = Sangat Setuju

**S** = Setuju

**KS** = Kurang Setuju

**TS** = Tidak Setuju

#### 1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS
1	Setiap SKPD memiliki wewenang menyusun anggaran dan melaksanakan anggaran dengan penuh tanggung jawab				
2	SKPD merupakan unit instansi mandiri yang berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan				
3	Laporan keuangan SKPD melaporkan kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang				
4	Informasi dalam laporan keuangan SKPD disajikan selengkap mungkin				
5	Informasi dalam laporan keuangan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan				
6	Informasi dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur tentang transaksi yang dilakukan SKPD				
7	Informasi dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur tentang kegiatan penggunaan anggaran SKPD				
8	Informasi dalam laporan keuangan SKPD tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu				
9	Neraca SKPD disusun menggunakan basis akrual				
10	Laporan Operasional SKPD disusun menggunakan basis akrual				
11	Laporan Realisasi Anggaran SKPD disusun menggunakan basis kas				



No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS
12	Periode pelaporan keuangan SKPD adalah satu tahun anggaran				
13	Penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2015 menggunakan metode akuntansi yang sama dengan tahun 2014				
14	Neraca SKPD menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu				
15	Laporan Operasional SKPD menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan SKPD				
16	Laporan Realisasi Anggaran SKPD merupakan gambaran perbandingan antara anggaran SKPD dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan				
17	SKPD wajib menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)				
18	CaLK merupakan penjelasan terinci atas penyajian laporan keuangan SKPD				

## 2. Kecukupan Pengungkapan

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS
1	SKPD harus menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan SKPD				
2	CALK memuat penjelasan mengenai kegiatan pokok SKPD				
3	CALK mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran SKPD secara umum				
4	CALK memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD				
5	CALK memuat informasi tentang posisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya				
6	CALK menyajikan informasi penjelasan realisasi anggaran				
7	CALK memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja anggaran SKPD				
8	Ikhtisar pencapaian kinerja berupa realisasi pencapaian program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan				
9	Hambatan dalam pencapaian target kinerja diungkapkan dalam CALK				

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS
10	CALK memaparkan basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD				
11	CALK menjelaskan dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan SKPD				
12	CALK memuat informasi penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam SAP				
13	Adanya perbedaan anggaran dan realisasi dijelaskan dalam CALK				
14	Prosentase pencapaian dalam LRA dijelaskan dalam CALK				
15	Perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu dalam LO harus dijelaskan				
16	Informasi yang diharuskan SAP tetapi belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan diungkapkan dalam CALK				
17	CALK harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian dari lembar muka laporan keuangan				
18	Kejadian penting selama tahun pelaporan diungkapkan dalam CALK				
19	Informasi yang apabila tidak diungkapkan dapat menyesatkan pengguna laporan harus diungkapkan				
20	Pergantian manajemen SKPD selama tahun berjalan perlu diungkapkan dalam CALK				

### 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS
1	Penyajian informasi keuangan secara bruto (asas bruto)				
2	Penyajian laporan keuangan secara umum sesuai SAP Berbasis Akrua (PP No 71 Tahun 2010)				
3	Anggaran disusun berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas				
4	Belanja merupakan pagu maksimal				
5	Belanja SKPD terdiri dari belanja langsung dan belanja tak langsung				
6	Belanja langsung mengacu pada PPAS (Penetapan Platfon Anggaran Sementara)				
7	Pengungkapan informasi rinci atas laporan keuangan SKPD pada CALK				

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS
8	Selisih antara anggaran dan realisasi yang signifikan harus dijelaskan				
9	Pengeluaran kas harus diadministrasikan dalam anggaran				
10	Penerimaan kas harus diadministrasikan dalam anggaran				
11	UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan) termasuk kas				

#### 4. Efektivitas SPI

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS
1	Buku Kas Umum (BKU) dikelola oleh bendahara SKPD				
2	Bendahara mencatat uang muka operasional kerja sesuai yang diajukan PPTK				
3	Pelaksanaan kegiatan dan/atau transaksi keuangan dibuktikan melalui Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)				
4	TPBU dapat berlaku setelah otorisasi lengkap				
5	Syarat SKPD untuk memperoleh dokumen SP2D yaitu SPP dan SPM				
6	SPJ dilaporkan ke SKPKD				
7	Laporan keuangan SKPD di laporkan ke SKPKD				
8	Pengguna Anggaran (PA) memiliki wewenang mengawasi proses pelaksanaan anggaran				
9	Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan				
10	Surat Pertanggung Jawabab (SPJ) dilaporkan ke SKPKD setiap bulan				
11	Pelaporan SPJ berisi Rekapitulasi SPJ, Buku Kas Umum (BKU), Bukti-Bukti, dan Jurnal				
12	PPK-SKPD bertugas menyiapkan laporan keuangan SKPD				
13	Bendahara SKPD bertugas menyiapkan dokumen atas transaksi terkait proses pelaksanaan anggaran				
14	Pencatat Pembukuan bertugas membuat rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan/atau transaksi keuangan SKPD				
15	Pembuat Dokumen bertugas membuat dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kegiatan dan/atau transaksi keuangan SKPD				
16	Tidak boleh ada rangkap jabatan dalam pelaksanaan akuntansi SKPD				

### Kuisiomer Variabel Dependen : Akuntabilitas Keuangan

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu

**SS** = Sangat Sering

**S** = Sering

**JS** = Jarang Sekali

**TP** = Tidak Pernah

No	PERNYATAAN	SS	S	JS	TP
1	Pelaporan keuangan SKPD dilaksanakan tepat waktu				
2	Laporan SPJ disertai bukti-bukti andministrsi				
3	Laporan keuangan SKPD tahun berjalan diserahkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya				
4	Pelaksanaan kegiatan dan/atau transaksi keuangan sesuai dengan DPA				
5	Penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan				
6	Pelaporan akuntansi SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah				
7	Pelaporan keuangan SKPD tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya				
8	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang dianggarkan				
9	SKPD mencapai target yang ditetapkan				
10	Pencapaian target akhir tahun anggaran mengacu pada anggaran perubahan				
11	Dana anggaran habis pada akhir tahun anggaran				
12	Laporan keuangan SKPD merupakan hasil akhir pertanggungjawaban keuangan SKPD				
13	Pelaksanaan anggaran mempertimbangkan prinsip ekonomis				
14	Penggunaan dana anggaran memperhatikan tingkat urgensi kegiatan dan/atau transaksi keuangan SKPD				
15	Bukti-bukti transaksi diotorisasi berbagai pihak				
16	Laporan keuangan SKPD dapat diakses siapa saja				
17	Laporan keuangan SKPD dipublikasikan				
18	Pelaporan SPJ sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan				

No	PERNYATAAN	SS	S	JS	TP
19	SKPD melaporkan SPJ untuk setiap bulan atas penggunaan dana anggaran bulan terkait				
20	SKPD melaporkan laporan keuangan SKPD untuk setiap periode anggaran				
21	Tiap pelaksana akuntansi/keuangan dalam SKPD menjalankan tanggungjawabnya masing-masing				
22	Penggunaan dana anggaran sesuai dengan anggaran SKPD				
23	Setiap melaksanakan kegiatan dipertanggungjawabkan melalui Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)				

Terima kasih atas kesediaan dan partisipasinya dalam mengisi kuesioner.

#### Lampiran 4. Data Uji Coba Instrumen

Tabel 1. Demografi Responden Uji Coba Instrumen

No	SKPD	No Resp	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Lama Kerja
1	Sekretariat Daerah Bagian Humas	1	PPK	43	W	S1	Non Akuntansi	
		2	PP	30	W	D3	Non Akuntansi	
		3	Bendahara	44	P	S1	Non Akuntansi	
		4	PD	40	P	S1	Non Akuntansi	
2	BKBPP	5	Bendahara	48	P	SMA	Non Akuntansi	
		6		44	W	S1	Non Akuntansi	
3	BLH	7	Bendahara	42	W	SMA	Non Akuntansi	
		8		37	P	SMA	Non Akuntansi	
4	Kantor Ketahanan Pangan	9	Bendahara	57	P	D3	Non Akuntansi	
		10		41	W	S1	Non Akuntansi	
5	Kec. Kranggan	11	Bendahara	52	W	S2	Non Akuntansi	
		12		32	P	SMA	Non Akuntansi	
6	Kec. Tembarak	13		42	P	SMA	Non Akuntansi	
		14	Bendahara	49	W	SMA	Non Akuntansi	
7	Kec. Selopampang	15		33	P	S1	Akuntansi	
		16	Bendahara	56	W	SMA	Non Akuntansi	
8	Kel. Manding	17	Bendahara	54	W	S1	Non Akuntansi	
		18		45	P	SMA	Non Akuntansi	
9	Kel. Butuh	19		32	P	SMA	Non Akuntansi	
		20		35	W	S1	Non Akuntansi	
10	Kel. Giyanti	21		32	W	SMA	Non Akuntansi	

No	SKPD	No Resp	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Lama Kerja
		22	PP	29	W	D3	Non Akuntansi	
11	Kec. Kledung	23	PD	28	P	D3	Non Akuntansi	
		24	Bendahara	43	W	S2	Non Akuntansi	
12	Kel. Jurang	25	PP	32	W	S2	Non Akuntansi	
		26	Bendahara	55	P	S2	Non Akuntansi	
13	Kec. Bejen	27	Bendahara	57	P	SMA	Non Akuntansi	
		28	PP	47	W	S1	Non Akuntansi	
14	Kel. Sidorejo	29	PD	34	P	SMA	Non Akuntansi	
		30	Bendahara	40	W	SMA	Non Akuntansi	





Tabel 3. Skor Butir Kuesioner Variabel X<sub>2</sub>

Resp	Butir Pernyataan Variabel X <sub>2</sub>																				Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	75
2	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	75
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	66
4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	49
5	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	53
6	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	53
7	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	53
8	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	2	2	53
9	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	55
10	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	53
11	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	4	4	59
12	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	2	2	61
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	56
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
16	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	61
17	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	75
18	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	54
19	4	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
20	4	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
21	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	66
22	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	58
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
24	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	64
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	76
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	76
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60

Resp	Butir Pernyataan Variabel X <sub>2</sub>																				Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	59
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
30	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	70

Tabel 4. Skor Butir Kuesioner Variabel  $X_3$ 

Resp	Butir Pernyataan Variabel $X_3$											Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	41
2	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	42
3	3	3	4	3	4	2	3	4	3	3	1	33
4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	30
5	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	31
6	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	29
7	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	31
8	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	31
9	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	30
10	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
11	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	40
12	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
13	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
14	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	35
15	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	43
16	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	34
17	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
18	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	31
19	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	32
20	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	32
21	2	3	3	2	4	2	3	4	3	3	4	33
22	2	2	3	3	3	2	4	3	4	4	3	33
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
24	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	41
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
28	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
30	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	41

Tabel 5. Skor Butir Kuesioner Variabel X<sub>4</sub>

Tabel 6. Skor Butir Kuesioner Y

Res p	Butir Pernyataan Variabel X <sub>2</sub>																							Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	85
2	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	85
3	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4	1	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	78
4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	85
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	66
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	66
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	66
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	66
9	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	65
10	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	66
11	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	1	3	4	4	4	4	3	4	79
12	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	69
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	67
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	90
15	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	87
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	68
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	3	4	3	4	2	4	4	4	4	4	4	85
18	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	72
19	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	87
20	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	87
21	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	1	1	4	3	3	3	3	3	71
22	3	3	3	4	3	3	3	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	75
23	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	76
24	3	4	4	4	3	4	2	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	85
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	65

Res p	Butir Pernyataan Variabel X <sub>2</sub>																							Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
28	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	67
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	65
30	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	72

### Lampiran 6. Hasil Uji Coba Instrumen

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel  $X_1$

No Item	$r_{x1}$	$r_{\text{tabel}}$	Keterangan
1	0.716	0.361	Valid
2	0.671		Valid
3	0.596		Valid
4	0.795		Valid
5	0.681		Valid
6	0.843		Valid
7	0.843		Valid
8	0.645		Valid
9	0.799		Valid
10	0.756		Valid
11	0.768		Valid
12	0.841		Valid
13	0.843		Valid
14	0.889		Valid
15	0.876		Valid
16	0.805		Valid
17	0.787		Valid
18	0.843		Valid

Tabel 8. Hasil *Output* SPSS 20 Uji Validitas Variabel X<sub>1</sub>

		Correlation																		
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1.16	X1.17	X1.18	Total X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.764**	.471**	.535**	.560**	.467**	.467**	.606**	.364*	.386*	.605**	.605**	.458*	.566**	.603**	.560**	.471**	.600**	.716**
	Sig. (2-tailed)		.000	.009	.002	.001	.009	.009	.000	.048	.035	.000	.000	.011	.001	.000	.001	.009	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	.764**	1	.572**	.591**	.413*	.436*	.436*	.415*	.290	.415*	.418*	.418*	.510**	.579**	.592**	.527**	.462*	.546**	.671**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.001	.023	.016	.016	.023	.120	.023	.021	.021	.004	.001	.001	.003	.010	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	.471**	.572**	1	.503**	.509**	.336	.336	.604**	.305	.382*	.267	.403*	.413*	.523**	.629**	.509**	.276	.336	.596**
	Sig. (2-tailed)	.009	.001		.005	.004	.069	.069	.000	.102	.037	.154	.027	.023	.003	.000	.004	.140	.069	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	.535**	.591**	.503**	1	.589**	.802**	.802**	.538**	.501**	.427*	.530**	.530**	.637**	.614**	.645**	.589**	.683**	.668**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.002	.001	.005		.001	.000	.000	.002	.005	.019	.003	.003	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.5	Pearson Correlation	.560**	.413*	.509**	.589**	1	.560**	.560**	.440*	.459*	.324	.480**	.480**	.616**	.594**	.697**	.559**	.367*	.420*	.681**
	Sig. (2-tailed)	.001	.023	.004	.001		.001	.001	.015	.011	.080	.007	.007	.000	.001	.000	.001	.046	.021	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.6	Pearson Correlation	.467**	.436*	.336	.802**	.560**	1	1.000**	.496**	.677**	.606**	.605**	.740**	.733**	.707**	.603**	.560**	.740**	.733**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.009	.016	.069	.000	.001		.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.7	Pearson Correlation	.467**	.436*	.336	.802**	.560**	1.000**	1	.496**	.677**	.606**	.605**	.740**	.733**	.707**	.603**	.560**	.740**	.733**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.009	.016	.069	.000	.001	.000		.005	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.8	Pearson Correlation	.606**	.415*	.604**	.538**	.440*	.496**	.496**	1	.319	.271	.360	.471**	.510**	.507**	.632**	.556**	.419*	.386*	.645**
	Sig. (2-tailed)	.000	.023	.000	.002	.015	.005	.005		.086	.148	.051	.009	.004	.004	.000	.001	.021	.035	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.9	Pearson Correlation	.364*	.290	.305	.501**	.459*	.677**	.677**	.319	1	.921**	.641**	.746**	.687**	.773**	.659**	.569**	.725**	.781**	.799**
	Sig. (2-tailed)	.048	.120	.102	.005	.011	.000	.000	.086		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.10	Pearson Correlation	.386*	.415*	.382*	.427*	.324	.606**	.606**	.271	.921**	1	.582**	.694**	.586**	.741**	.632**	.556**	.642**	.717**	.756**



		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1.16	X1.17	X1.18	Total X1
X1.11	Sig. (2-tailed)	.035	.023	.037	.019	.080	.000	.000	.148	.000		.001	.000	.001	.000	.000	.001	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.605**	.418*	.267	.530**	.480**	.605**	.605**	.360	.641**	.582**	1	.864**	.543**	.666**	.690**	.622**	.629**	.740**	.768**
X1.12	Sig. (2-tailed)	.000	.021	.154	.003	.007	.000	.000	.051	.000	.001		.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.605**	.418*	.403*	.530**	.480**	.740**	.740**	.471**	.746**	.694**	.864**	1	.635**	.809**	.690**	.622**	.629**	.740**	.841**
X1.13	Sig. (2-tailed)	.000	.021	.027	.003	.007	.000	.000	.009	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.458*	.510**	.413*	.637**	.616**	.733**	.733**	.510**	.687**	.586**	.543**	.635**	1	.745**	.781**	.809**	.660**	.642**	.843**
X1.14	Sig. (2-tailed)	.011	.004	.023	.000	.000	.000	.000	.004	.000	.001	.002	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.566**	.579**	.523**	.614**	.594**	.707**	.707**	.507**	.773**	.741**	.666**	.809**	.745**	1	.853**	.743**	.618**	.707**	.889**
X1.15	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.003	.000	.001	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.603**	.592**	.629**	.645**	.697**	.603**	.603**	.632**	.659**	.632**	.690**	.690**	.781**	.853**	1	.855**	.527**	.603**	.876**
X1.16	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.003	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.560**	.527**	.509**	.589**	.559**	.560**	.560**	.556**	.569**	.556**	.622**	.622**	.809**	.743**	.855**	1	.509**	.560**	.805**
X1.17	Sig. (2-tailed)	.001	.003	.004	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.000	.000	.000	.000	.000		.004	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.471**	.462*	.276	.683**	.367*	.740**	.740**	.419*	.725**	.642**	.629**	.629**	.660**	.618**	.527**	.509**	1	.874**	.787**
X1.18	Sig. (2-tailed)	.009	.010	.140	.000	.046	.000	.000	.021	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.003	.004		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.600**	.546**	.336	.668**	.420*	.733**	.733**	.386*	.781**	.717**	.740**	.740**	.642**	.707**	.603**	.560**	.874**	1	.843**
Kesesuaian SAP	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.069	.000	.021	.000	.000	.035	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.716**	.671**	.596**	.795**	.681**	.843**	.843**	.645**	.799**	.756**	.768**	.841**	.843**	.889**	.876**	.805**	.787**	.843**	1
Kesesuaian SAP	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel X<sub>2</sub>

No Item	r <sub>x2</sub>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
1	0.633	0.361	Valid
2	0.611		Valid
3	0.728		Valid
4	0.728		Valid
5	0.825		Valid
6	0.861		Valid
7	0.860		Valid
8	0.757		Valid
9	0.748		Valid
10	0.769		Valid
11	0.807		Valid
12	0.873		Valid
13	0.799		Valid
14	0.864		Valid
15	0.753		Valid
16	0.857		Valid
17	0.775		Valid
18	0.632		Valid
19	0.632		Valid
20	0.479		Valid

Tabel 10. Hasil *Output* SPSS 20 Uji Validitas Variabel X<sub>2</sub>

		Correlations																				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2.15	X2.16	X2.17	X2.18	X2.19	X2.20	Total X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.270	.373*	.432*	.421*	.557**	.498**	.432*	.457*	.554**	.492**	.551**	.453*	.539**	.638**	.611**	.485**	.403*	.288	.237	.633**
	Sig. (2-tailed)		.150	.043	.017	.021	.001	.005	.017	.011	.002	.006	.002	.012	.002	.000	.000	.007	.027	.123	.208	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	.270	1	.780**	.711**	.634**	.441*	.657**	.607**	.535**	.487**	.340	.442*	.255	.404*	.464**	.433*	.396*	.196	.181	.129	.611**
	Sig. (2-tailed)	.150		.000	.000	.000	.015	.000	.000	.002	.006	.066	.014	.173	.027	.010	.017	.030	.299	.337	.496	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	.373*	.780**	1	.635**	.748**	.688**	.675**	.730**	.569**	.531**	.542**	.461*	.371*	.515**	.607**	.577**	.372*	.358	.331	.236	.728**
	Sig. (2-tailed)	.043	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.001	.003	.002	.010	.043	.004	.000	.001	.043	.052	.074	.210	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	.432*	.711**	.635**	1	.698**	.566**	.847**	.579**	.435*	.609**	.630**	.668**	.376*	.526**	.485**	.541**	.478**	.248	.349	.174	.728**
	Sig. (2-tailed)	.017	.000	.000		.000	.001	.000	.001	.016	.000	.000	.000	.040	.003	.007	.002	.008	.185	.059	.358	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	.421*	.634**	.748**	.698**	1	.745**	.814**	.789**	.784**	.612**	.596**	.597**	.607**	.675**	.674**	.646**	.449*	.527**	.326	.173	.825**
	Sig. (2-tailed)	.021	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.013	.003	.078	.360	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.6	Pearson Correlation	.557**	.441*	.688**	.566**	.745**	1	.715**	.566**	.624**	.774**	.842**	.726**	.711**	.767**	.674**	.688**	.626**	.458*	.478**	.349	.861**
	Sig. (2-tailed)	.001	.015	.000	.001	.000		.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.011	.008	.059	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.7	Pearson Correlation	.498**	.657**	.675**	.847**	.814**	.715**	1	.691**	.671**	.563**	.713**	.832**	.582**	.669**	.646**	.675**	.587**	.394*	.385*	.288	.860**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.001	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.001	.031	.036	.123	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.8	Pearson Correlation	.432*	.607**	.730**	.579**	.789**	.566**	.691**	1	.726**	.609**	.489**	.514**	.629**	.625**	.592**	.730**	.478**	.426*	.215	.105	.757**
	Sig. (2-tailed)	.017	.000	.000	.001	.000	.001	.000		.000	.000	.006	.004	.000	.000	.001	.000	.008	.019	.254	.580	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.9	Pearson Correlation	.457*	.535**	.569**	.435*	.784**	.624**	.671**	.726**	1	.549**	.364*	.598**	.653**	.679**	.645**	.569**	.470**	.611**	.231	.177	.748**
	Sig. (2-tailed)	.011	.002	.001	.016	.000	.000	.000	.000		.002	.048	.000	.000	.000	.000	.001	.009	.000	.219	.348	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.10	Pearson Correlation	.554**	.487**	.531**	.609**	.612**	.774**	.563**	.609**	.549**	1	.610**	.616**	.630**	.704**	.548**	.650**	.714**	.403*	.372*	.179	.769**

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2.15	X2.16	X2.17	X2.18	X2.19	X2.20	Total X2
X2.11	Sig. (2-tailed)	.002	.006	.003	.000	.000	.000	.001	.000	.002		.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.027	.043	.344	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.492**	.340	.542**	.630**	.596**	.842**	.713**	.489**	.364*	.610**	1	.763**	.686**	.715**	.605**	.700**	.656**	.289	.567**	.417*	.807**
X2.12	Sig. (2-tailed)	.006	.066	.002	.000	.001	.000	.000	.006	.048	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.121	.001	.022	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.551**	.442*	.461*	.668**	.597**	.726**	.832**	.514**	.598**	.616**	.763**	1	.746**	.842**	.571**	.720**	.737**	.528**	.584**	.461*	.873**
X2.13	Sig. (2-tailed)	.002	.014	.010	.000	.000	.000	.000	.004	.000	.000	.000		.000	.000	.001	.000	.000	.003	.001	.010	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.453*	.255	.371*	.376*	.607**	.711**	.582**	.629**	.653**	.630**	.686**	.746**	1	.920**	.656**	.749**	.743**	.461*	.456*	.284	.799**
X2.14	Sig. (2-tailed)	.012	.173	.043	.040	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.010	.011	.128	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.539**	.404*	.515**	.526**	.675**	.767**	.669**	.625**	.679**	.704**	.715**	.842**	.920**	1	.709**	.736**	.699**	.519**	.471**	.295	.864**
X2.15	Sig. (2-tailed)	.002	.027	.004	.003	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.003	.009	.114	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.638**	.464**	.607**	.485**	.674**	.674**	.646**	.592**	.645**	.548**	.605**	.571**	.656**	.709**	1	.726**	.541**	.484**	.230	.076	.753**
X2.16	Sig. (2-tailed)	.000	.010	.000	.007	.000	.000	.000	.001	.000	.002	.000	.001	.000	.000		.000	.002	.007	.221	.692	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.611**	.433*	.577**	.541**	.646**	.688**	.675**	.730**	.569**	.650**	.700**	.720**	.749**	.736**	.726**	1	.634**	.556**	.556**	.390*	.857**
X2.17	Sig. (2-tailed)	.000	.017	.001	.002	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.001	.001	.033	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.485**	.396*	.372*	.478**	.449*	.626**	.587**	.478**	.470**	.714**	.656**	.737**	.743**	.699**	.541**	.634**	1	.427*	.609**	.411*	.775**
X2.18	Sig. (2-tailed)	.007	.030	.043	.008	.013	.000	.001	.008	.009	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000		.019	.000	.024	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.403*	.196	.358	.248	.527**	.458*	.394*	.426*	.611**	.403*	.289	.528**	.461*	.519**	.484**	.556**	.427*	1	.587**	.492**	.632**
X2.19	Sig. (2-tailed)	.027	.299	.052	.185	.003	.011	.031	.019	.000	.027	.121	.003	.010	.003	.007	.001	.019		.001	.006	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.288	.181	.331	.349	.326	.478**	.385*	.215	.231	.372*	.567**	.584**	.456*	.471**	.230	.556**	.609**	.587**	1	.832**	.632**
X2.20	Sig. (2-tailed)	.123	.337	.074	.059	.078	.008	.036	.254	.219	.043	.001	.001	.011	.009	.221	.001	.000	.001		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.237	.129	.236	.174	.173	.349	.288	.105	.177	.179	.417*	.461*	.284	.295	.076	.390*	.411*	.492**	.832**	1	.479**
	Sig. (2-tailed)	.208	.496	.210	.358	.360	.059	.123	.580	.348	.344	.022	.010	.128	.114	.692	.033	.024	.006	.000		.007

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2.15	X2.16	X2.17	X2.18	X2.19	X2.20	Total X2
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kecuku	Pearson	.633**	.611**	.728**	.728**	.825**	.861**	.860**	.757**	.748**	.769**	.807**	.873**	.799**	.864**	.753**	.857**	.775**	.632**	.632**	.479**	1
pan	Correlation																					
Pengun	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.007	
gkapan	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Variabel X<sub>3</sub>

No Item	r <sub>x3</sub>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
1	0.682	0.361	Valid
2	0.712		Valid
3	0.796		Valid
4	0.715		Valid
5	0.843		Valid
6	0.673		Valid
7	0.838		Valid
8	0.743		Valid
9	0.832		Valid
10	0.832		Valid
11	0.721		Valid

Tabel 12. Hasil *Output* SPSS 20 Uji Validitas X<sub>3</sub>

		Correlations											
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	Total X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.488**	.520**	.646**	.519**	.506**	.353	.308	.467**	.467**	.337	.682**
	Sig. (2-tailed)		.006	.003	.000	.003	.004	.056	.098	.009	.009	.068	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	.488**	1	.697**	.343	.568**	.539**	.447*	.492**	.442*	.442*	.509**	.712**
	Sig. (2-tailed)	.006		.000	.064	.001	.002	.013	.006	.015	.015	.004	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	.520**	.697**	1	.647**	.707**	.376*	.595**	.639**	.573**	.573**	.363*	.796**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000		.000	.000	.041	.001	.000	.001	.001	.049	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.4	Pearson Correlation	.646**	.343	.647**	1	.563**	.343	.545**	.388*	.504**	.504**	.385*	.715**
	Sig. (2-tailed)	.000	.064	.000		.001	.063	.002	.034	.005	.005	.036	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.5	Pearson Correlation	.519**	.568**	.707**	.563**	1	.469**	.677**	.825**	.635**	.635**	.526**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.003	.001	.000	.001		.009	.000	.000	.000	.000	.003	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.6	Pearson Correlation	.506**	.539**	.376*	.343	.469**	1	.558**	.376*	.436*	.436*	.598**	.673**
	Sig. (2-tailed)	.004	.002	.041	.063	.009		.001	.041	.016	.016	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.7	Pearson Correlation	.353	.447*	.595**	.545**	.677**	.558**	1	.733**	.782**	.782**	.648**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.056	.013	.001	.002	.000	.001		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.8	Pearson Correlation	.308	.492**	.639**	.388*	.825**	.376*	.733**	1	.573**	.573**	.464**	.743**
	Sig. (2-tailed)	.098	.006	.000	.034	.000	.041	.000		.001	.001	.010	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.9	Pearson Correlation	.467**	.442*	.573**	.504**	.635**	.436*	.782**	.573**	1	1.000**	.597**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.009	.015	.001	.005	.000	.016	.000	.001		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.10	Pearson Correlation	.467**	.442*	.573**	.504**	.635**	.436*	.782**	.573**	1.000**	1	.597**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.009	.015	.001	.005	.000	.016	.000	.001	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3.11	Pearson Correlation	.337	.509**	.363*	.385*	.526**	.598**	.648**	.464**	.597**	.597**	1	.721**
	Sig. (2-tailed)	.068	.004	.049	.036	.003	.000	.000	.010	.000	.000		.000

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	Total X3
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kepatuhan terhadap UU	Pearson Correlation	.682**	.712**	.796**	.715**	.843**	.673**	.838**	.743**	.832**	.832**	.721**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel 13. Hasil Uji Validitas Variabel X<sub>4</sub>

No Item	r <sub>x4</sub>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
1	0.896	0.361	Valid
2	0.899		Valid
3	0.938		Valid
4	0.801		Valid
5	0.887		Valid
6	0.847		Valid
7	0.897		Valid
8	0.877		Valid
9	0.948		Valid
10	0.858		Valid
11	0.886		Valid
12	0.889		Valid
13	0.889		Valid
14	0.918		Valid
15	0.867		Valid
16	0.473		Valid

Tabel 14. Hasil *Output* SPSS 20 Uji Validitas Variabel X<sub>4</sub>

		Correlations																
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10	X4.11	X4.12	X4.13	X4.14	X4.15	X4.16	Total X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.935**	.935**	.700**	.802**	.866**	.873**	.732**	.800**	.590**	.732**	.665**	.717**	.813**	.873**	.331	.896**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.074	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X4.2	Pearson Correlation	.935**	1	.864**	.749**	.740**	.800**	.796**	.665**	.864**	.646**	.665**	.729**	.767**	.870**	.934**	.381*	.899**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.038	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X4.3	Pearson Correlation	.935**	.864**	1	.749**	.874**	.800**	.934**	.800**	.864**	.766**	.800**	.729**	.767**	.870**	.796**	.381*	.938**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.038	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X4.4	Pearson Correlation	.700**	.749**	.749**	1	.655**	.700**	.802**	.700**	.749**	.664**	.554**	.602**	.625**	.709**	.653**	.463**	.801**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.010	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X4.5	Pearson Correlation	.802**	.740**	.874**	.655**	1	.802**	.816**	.802**	.874**	.776**	.802**	.740**	.793**	.761**	.680**	.283	.887**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.130	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X4.6	Pearson Correlation	.866**	.800**	.800**	.700**	.802**	1	.736**	.732**	.800**	.590**	.732**	.665**	.717**	.675**	.736**	.331	.847**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.074	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X4.7	Pearson Correlation	.873**	.796**	.934**	.802**	.816**	.736**	1	.873**	.796**	.706**	.736**	.659**	.697**	.791**	.722**	.433*	.897**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.017	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X4.8	Pearson Correlation	.732**	.665**	.800**	.700**	.802**	.732**	.873**	1	.800**	.829**	.866**	.800**	.717**	.675**	.600**	.472**	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.008	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X4.9	Pearson Correlation	.800**	.864**	.864**	.749**	.874**	.800**	.796**	.800**	1	.887**	.800**	.864**	.890**	.870**	.796**	.381*	.948**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.038	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X4.10	Pearson Correlation	.590**	.646**	.766**	.664**	.776**	.590**	.706**	.829**	.887**	1	.829**	.887**	.789**	.772**	.584**	.464**	.858**



		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10	X4.11	X4.12	X4.13	X4.14	X4.15	X4.16	Total X4
X4.11	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.010	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.732**	.665**	.800**	.554**	.802**	.732**	.736**	.866**	.800**	.829**	1	.935**	.839**	.813**	.736**	.331	.886**
X4.12	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.074	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.665**	.729**	.729**	.602**	.740**	.665**	.659**	.800**	.864**	.887**	.935**	1	.890**	.870**	.796**	.381*	.889**
X4.13	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.038	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.717**	.767**	.767**	.625**	.793**	.717**	.697**	.717**	.890**	.789**	.839**	.890**	1	.881**	.821**	.302	.889**
X4.14	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.105	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.813**	.870**	.870**	.709**	.761**	.675**	.791**	.675**	.870**	.772**	.813**	.870**	.881**	1	.932**	.342	.918**
X4.15	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.064	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.873**	.934**	.796**	.653**	.680**	.736**	.722**	.600**	.796**	.584**	.736**	.796**	.821**	.932**	1	.289	.867**
X4.16	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000		.122	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.331	.381*	.381*	.463**	.283	.331	.433*	.472**	.381*	.464**	.331	.381*	.302	.342	.289	1	.473**
Efektifitas SPI	Sig. (2-tailed)	.074	.038	.038	.010	.130	.074	.017	.008	.038	.010	.074	.038	.105	.064	.122		.008
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.896**	.899**	.938**	.801**	.887**	.847**	.897**	.877**	.948**	.858**	.886**	.889**	.889**	.918**	.867**	.473**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.008	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel 15. Hasil Uji Validitas Variabel Y

No Item	$r_y$	$r_{\text{tabel}}$	Keterangan
1	0.633	0.361	Valid
2	0.800		Valid
3	0.812		Valid
4	0.870		Valid
5	0.736		Valid
6	0.802		Valid
7	0.336		Tidak Valid
8	0.632		Valid
9	0.512		Valid
10	0.487		Valid
11	0.199		Tidak Valid
12	0.871		Valid
13	0.865		Valid
14	0.916		Valid
15	0.796		Valid
16	0.793		Valid
17	0.763		Valid
18	0.870		Valid
19	0.866		Valid
20	0.920		Valid
21	0.916		Valid
22	0.888		Valid
23	0.906		Valid

Tabel 16. Hasil *Output* SPSS Uji Validitas Variabel Y

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	Y19	Y20	Y21	Y22	Y23	Total Y
Y1	Pearson Correlation	1	.509**	.686**	.498**	.509**	.467**	.388*	.271	.488**	.524**	.074	.455*	.408*	.505**	.378*	.300	.446*	.509**	.653**	.602**	.505**	.356	.655**	.633**
	Sig. (2-tailed)		.004	.000	.005	.004	.009	.034	.148	.006	.003	.699	.012	.025	.004	.040	.107	.013	.004	.000	.000	.004	.053	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y2	Pearson Correlation	.509**	1	.717**	.761**	.733**	.802**	.111	.620**	.268	.218	.000	.874**	.623**	.680**	.656**	.659**	.477**	.600**	.680**	.740**	.680**	.680*	.733**	.800**
	Sig. (2-tailed)	.004		.000	.000	.000	.000	.559	.000	.152	.247	1.000	.000	.000	.000	.000	.000	.008	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y3	Pearson Correlation	.686**	.717**	1	.690**	.606**	.678**	.257	.547**	.321	.445*	-.056	.694**	.683**	.743**	.536**	.564**	.545**	.717**	.743**	.805**	.743**	.630*	.827**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.170	.002	.084	.014	.770	.000	.000	.000	.002	.001	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y4	Pearson Correlation	.498**	.761**	.690**	1	.761**	.813**	.254	.343	.340	.498**	.157	.665**	.579**	.621**	.565**	.534**	.448*	.761**	.621**	.665**	.621**	.621*	.761**	.780**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.000		.000	.000	.176	.063	.066	.005	.407	.000	.001	.000	.001	.002	.013	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y5	Pearson Correlation	.509**	.733**	.606**	.761**	1	.935**	.333	.496**	.268	.218	-.084	.740**	.484**	.544**	.656**	.599**	.409*	.600**	.680**	.605**	.544**	.544*	.600**	.736**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.000		.000	.072	.005	.152	.247	.658	.000	.007	.002	.000	.000	.025	.000	.000	.000	.002	.002	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y6	Pearson Correlation	.467**	.802**	.678**	.813**	.935**	1	.200	.580**	.239	.321	.017	.818**	.573**	.627**	.630**	.684**	.501**	.668**	.627**	.683**	.627**	.627*	.668**	.802**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000	.000	.000	.000		.288	.001	.203	.084	.929	.000	.001	.000	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y7	Pearson Correlation	.388*	.111	.257	.254	.333	.200	1	.413*	.447*	.267	.225	.045	.208	.295	.259	-.030	.057	.222	.295	.157	.295	.181	.222	.336
	Sig. (2-tailed)	.034	.559	.170	.176	.072	.288		.023	.013	.154	.233	.814	.271	.114	.168	.875	.765	.238	.114	.407	.114	.337	.238	.070
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y8	Pearson Correlation	.271	.620**	.547**	.343	.496**	.580**	.413*	1	.222	.135	.000	.584**	.558**	.633**	.518**	.501**	.338	.372*	.506**	.584**	.633**	.506*	.496**	.632**
	Sig. (2-tailed)	.148	.000	.002	.063	.005	.001	.023		.239	.476	1.000	.001	.001	.000	.003	.005	.067	.043	.004	.001	.000	.004	.005	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y9	Pearson Correlation	.488**	.268	.321	.340	.268	.239	.447*	.222	1	.683**	.339	.331	.217	.365*	.293	.321	.335	.447*	.365*	.331	.365*	.548*	.447*	.512**
	Sig. (2-tailed)	.006	.152	.084	.066	.152	.203	.013	.239		.000	.067	.074	.250	.047	.115	.083	.070	.013	.047	.074	.047	.002	.013	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y10	Pearson Correlation	.524**	.218	.445*	.498**	.218	.321	.267	.135	.683**	1	.257	.308	.257	.356	.117	.170	.298	.655**	.356	.455*	.356	.356	.509**	.487**

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	Y19	Y20	Y21	Y22	Y23	Total Y
Y11	Sig. (2-tailed)	.003	.247	.014	.005	.247	.084	.154	.476	.000		.170	.097	.171	.053	.538	.370	.110	.000	.053	.012	.053	.053	.004	.006
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y12	Pearson Correlation	.074	.000	-.056	.157	-.084	.017	.225	.000	.339	.257	1	-.034	.280	.120	.256	-.053	.258	.084	-.138	-.034	.120	.206	.084	.199
	Sig. (2-tailed)	.699	1.000	.770	.407	.658	.929	.233	1.000	.067	.170		.858	.135	.526	.172	.781	.168	.658	.469	.858	.526	.274	.658	.291
Y13	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.455*	.874**	.694**	.665**	.740**	.818**	.045	.584**	.331	.308	-.034	1	.731**	.796**	.718**	.797**	.642**	.740**	.796**	.864**	.796**	.796*	.740**	.871**
Y14	Sig. (2-tailed)	.012	.000	.000	.000	.000	.000	.814	.001	.074	.097	.858		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y15	Pearson Correlation	.408*	.623**	.683**	.579**	.484**	.573**	.208	.558**	.217	.257	.280	.731**	1	.932**	.796**	.646**	.755**	.761**	.791**	.870**	.932**	.791*	.761**	.865**
	Sig. (2-tailed)	.025	.000	.000	.001	.007	.001	.271	.001	.250	.171	.135	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y16	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.505**	.680**	.743**	.621**	.544**	.627**	.295	.633**	.365*	.356	.120	.796**	.932**	1	.755**	.721**	.696**	.816**	.861**	.934**	1.000**	.861*	.816**	.916**
Y17	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.000	.002	.000	.114	.000	.047	.053	.526	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y18	Pearson Correlation	.378*	.656**	.536**	.565**	.656**	.630**	.259	.518**	.293	.117	.256	.718**	.796**	.755**	1	.632**	.509**	.656**	.755**	.718**	.755**	.755*	.656**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.040	.000	.002	.001	.000	.000	.168	.003	.115	.538	.172	.000	.000	.000		.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y19	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.300	.659**	.564**	.534**	.599**	.684**	-.030	.501**	.321	.170	-.053	.797**	.646**	.721**	.632**	1	.735**	.659**	.660**	.737**	.721**	.843*	.718**	.793**
Y20	Sig. (2-tailed)	.107	.000	.001	.002	.000	.000	.875	.005	.083	.370	.781	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y21	Pearson Correlation	.446*	.477**	.545**	.448*	.409*	.501**	.057	.338	.335	.298	.258	.642**	.755**	.696**	.509**	.735**	1	.614**	.626**	.711**	.696**	.696*	.682**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.013	.008	.002	.013	.025	.005	.765	.067	.070	.110	.168	.000	.000	.000	.004	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y22	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.509**	.600**	.717**	.761**	.600**	.668**	.222	.372*	.447*	.655**	.084	.740**	.761**	.816**	.656**	.659**	.614**	1	.816**	.874**	.816**	.816*	.867**	.870**
Y23	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.000	.000	.000	.238	.043	.013	.000	.658	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y24	Pearson Correlation	.653**	.680**	.743**	.621**	.680**	.627**	.295	.506**	.365*	.356	-.138	.796**	.791**	.861**	.755**	.660**	.626**	.816**	1	.934**	.861**	.722*	.816**	.866**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.114	.004	.047	.053	.469	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
Y25	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.602**	.740**	.805**	.665**	.605**	.683**	.157	.584**	.331	.455*	-.034	.864**	.870**	.934**	.718**	.737**	.711**	.874**	.934**	1	.934**	.796*	.874**	.920**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.407	.001	.074	.012	.858	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	Y19	Y20	Y21	Y22	Y23	Total Y
Y21	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.505**	.680**	.743**	.621**	.544**	.627**	.295	.633**	.365*	.356	.120	.796**	.932**	1.000**	.755**	.721**	.696**	.816**	.861**	.934**	1	.861*	.816**	.916**
	Correlation Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.000	.002	.000	.114	.000	.047	.053	.526	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
Y22	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.356	.680**	.630**	.621**	.544**	.627**	.181	.506**	.548**	.356	.206	.796**	.791**	.861**	.755**	.843**	.696**	.816**	.722**	.796**	.861**	1	.816**	.888**
	Correlation Sig. (2-tailed)	.053	.000	.000	.000	.002	.000	.337	.004	.002	.053	.274	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000			.000	.000
Y23	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.655**	.733**	.827**	.761**	.600**	.668**	.222	.496**	.447*	.509**	.084	.740**	.761**	.816**	.656**	.718**	.682**	.867**	.816**	.874**	.816**	.816*	1	.906**
	Correlation Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.238	.005	.013	.004	.658	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000			.000
Akunt abilita s Keua ngan	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson	.633**	.800**	.812**	.780**	.736**	.802**	.336	.632**	.512**	.487**	.199	.871**	.865**	.916**	.796**	.793**	.763**	.870**	.866**	.920**	.916**	.888*	.906**	1
	Correlation Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.070	.000	.004	.006	.291	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel 17. Hasil Uji Reabilitas Variabel X<sub>1</sub>**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.959	18

Tabel 18. Hasil Uji Reabilitas Variabel X<sub>2</sub>**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.956	20

Tabel 19. Hasil Uji Reabilitas Variabel X<sub>3</sub>**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.924	11

Tabel 20. Hasil Uji Reabilitas Variabel X<sub>4</sub>**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.977	16

Tabel 21. Hasil Uji Reabilitas Variabel Y

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.964	21

**Lampiran 7. Kuesioner Penelitian**

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu Responden

di tempat

Dengan Hormat,

Saya adalah mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang sedang menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE), dengan ini saya :

Nama : Dian Dharmaningtyas

Nim : 12812141043

Jurusan : Akuntansi

Mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap.

Kuesioner ini akan dijadikan data dalam penelitian saya. Oleh karena itu, Bapak/Ibu/Saudara berkenan untuk membacanya dengan teliti dan menjawab dengan lengkap. Segala informasi yang diperoleh dari kuesioner ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis.

Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Dian Dharmaningtyas





## DAFTAR PERTANYAAN

### Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan

#### Kuisiener Variabel Independen : Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu

**SS** = Sangat Setuju

**S** = Setuju

**KS** = Kurang Setuju

**TS** = Tidak Setuju

#### 1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS
1	Setiap SKPD memiliki wewenang menyusun anggaran dan melaksanakan anggaran dengan penuh tanggung jawab				
2	SKPD merupakan unit instansi mandiri yang berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan				
3	Laporan keuangan SKPD melaporkan kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang				
4	Informasi dalam laporan keuangan SKPD disajikan selengkap mungkin				
5	Informasi dalam laporan keuangan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan				
6	Informasi dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur tentang transaksi yang dilakukan SKPD				
7	Informasi dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur tentang kegiatan penggunaan anggaran SKPD				
8	Informasi dalam laporan keuangan SKPD tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu				
9	Neraca SKPD disusun menggunakan basis akrual				
10	Laporan Operasional SKPD disusun menggunakan basis akrual				
11	Laporan Realisasi Anggaran SKPD disusun menggunakan basis kas				

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS
12	Periode pelaporan keuangan SKPD adalah satu tahun anggaran				
13	Penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2015 menggunakan metode akuntansi yang sama dengan tahun 2014				
14	Neraca SKPD menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu				
15	Laporan Operasional SKPD menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan SKPD				
16	Laporan Realisasi Anggaran SKPD merupakan gambaran perbandingan antara anggaran SKPD dengan realisasi dalam satu periode pelaporan				
17	SKPD wajib menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)				
18	CaLK merupakan penjelasan terinci atas penyajian laporan keuangan SKPD				

## 2. Kecukupan Pengungkapan

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS
1	SKPD harus menyajikan Catatan atas Atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan SKPD				
2	CALK memuat penjelasan mengenai kegiatan pokok SKPD				
3	CALK mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran SKPD secara umum				
4	CALK memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD				
5	CALK memuat informasi tentang posisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya				
6	CALK menyajikan informasi penjelasan realisasi anggaran				
7	CALK memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja anggaran SKPD				
8	Ikhtisar pencapaian kinerja berupa realisasi pencapaian program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan				
9	Hambatan dalam pencapaian target kinerja diungkapkan dalam CALK				

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS
10	CALK memaparkan basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD				
11	CALK menjelaskan dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan SKPD				
12	CALK memuat informasi penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam SAP				
13	Adanya perbedaan anggaran dan realisasi dijelaskan dalam CALK				
14	Prosentase pencapaian dalam LRA dijelaskan dalam CALK				
15	Perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu dalam LO harus dijelaskan				
16	Informasi yang diharuskan SAP tetapi belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan diungkapkan dalam CALK				
17	CALK harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian dari lembar muka laporan keuangan				
18	Kejadian penting selama tahun pelaporan diungkapkan dalam CALK				
19	Informasi yang apabila tidak diungkapkan dapat menyesatkan pengguna laporan harus diungkapkan				
20	Pergantian manajemen SKPD selama tahun berjalan perlu diungkapkan dalam CALK				

### 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS
1	Penyajian informasi keuangan secara bruto (asas bruto)				
2	Penyajian laporan keuangan secara umum sesuai SAP Berbasis Akrua (PP No 71 Tahun 2010)				
3	Anggaran disusun berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas				
4	Belanja merupakan pagu maksimal				
5	Belanja SKPD terdiri dari belanja langsung dan belanja tak langsung				
6	Belanja langsung mengacu pada PPAS (Penetapan Platfon Anggaran Sementara)				
7	Pengungkapan informasi rinci atas laporan keuangan SKPD pada CALK				

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS
8	Selisih antara anggaran dan realisasi yang signifikan harus dijelaskan				
9	Pengeluaran kas harus diadministrasikan dalam anggaran				
10	Penerimaan kas harus diadministrasikan dalam anggaran				
11	UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan) termasuk kas				

#### 4. Efektivitas SPI

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS
1	Buku Kas Umum (BKU) dikelola oleh bendahara SKPD				
2	Bendahara mencatat uang muka operasional kerja sesuai yang diajukan PPTK				
3	Pelaksanaan kegiatan dan/atau transaksi keuangan dibuktikan melalui Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)				
4	TPBU dapat berlaku setelah otorisasi lengkap				
5	Syarat SKPD untuk memperoleh dokumen SP2D yaitu SPP dan SPM				
6	SPJ dilaporkan ke SKPKD				
7	Laporan keuangan SKPD di laporkan ke SKPKD				
8	Pengguna Anggaran (PA) memiliki wewenang mengawasi proses pelaksanaan anggaran				
9	Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan				
10	Surat Pertanggung Jawabab (SPJ) dilaporkan ke SKPKD setiap bulan				
11	Pelaporan SPJ berisi Rekapitulasi SPJ, Buku Kas Umum (BKU), Bukti-Bukti, dan Jurnal				
12	PPK-SKPD bertugas menyiapkan laporan keuangan SKPD				
13	Bendahara SKPD bertugas menyiapkan dokumen atas transaksi terkait proses pelaksanaan anggaran				
14	Pencatat Pembukuan bertugas membuat rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan/atau transaksi keuangan SKPD				
15	Pembuat Dokumen bertugas membuat dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kegiatan dan/atau transaksi keuangan SKPD				
16	Tidak boleh ada rangkap jabatan dalam pelaksanaan akuntansi SKPD				

### Kuisiomer Variabel Dependen : Akuntabilitas Keuangan

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu

**SS** = Sangat Sering

**S** = Sering

**JS** = Jarang Sekali

**TP** = Tidak Pernah

No	PERNYATAAN	SS	S	JS	TP
1	Pelaporan keuangan SKPD dilaksanakan tepat waktu				
2	Laporan SPJ disertai bukti-bukti andministrsi				
3	Laporan keuangan SKPD tahun berjalan diserahkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya				
4	Pelaksanaan kegiatan dan/atau transaksi keuangan sesuai dengan DPA				
5	Penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan				
6	Pelaporan akuntansi SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah				
7	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang dianggarkan				
8	SKPD mencapai target yang ditetapkan				
9	Pencapaian target akhir tahun anggaran mengacu pada anggaran perubahan				
10	Laporan keuangan SKPD merupakan hasil akhir pertanggungjawaban keuangan SKPD				
11	Pelaksanaan anggaran mempertimbangkan prinsip ekonomis				
12	Penggunaan dana anggaran memperhatikan tingkat urgensi kegiatan dan/atau transaksi keuangan SKPD				
13	Bukti-bukti transaksi diotorisasi berbagai pihak				
14	Laporan keuangan SKPD dapat diakses siapa saja				
15	Laporan keuangan SKPD dipublikasikan				
16	Pelaporan SPJ sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan				
17	SKPD melaporkan SPJ untuk setiap bulan atas penggunaan dana anggaran bulan terkait				

<b>No</b>	<b>PERNYATAAN</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>JS</b>	<b>TP</b>
18	SKPD melaporkan laporan keuangan SKPD untuk setiap periode anggaran				
19	Tiap pelaksana akuntansi/keuangan dalam SKPD menjalankan tanggungjawabnya masing-masing				
20	Penggunaan dana anggaran sesuai dengan anggaran SKPD				
21	Setiap melaksanakan kegiatan dipertanggungjawabkan melalui Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)				

Terima kasih atas kesediaan dan partisipasinya dalam mengisi kuesioner.

## Lampiran 8. Data Penelitian

Tabel 22. Demografi Responden

No	SKPD	No Resp	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Lama Bekerja
1	Dinas Pertanian	1	Bendahara	30	Wanita	D3	Non Akuntansi	1 - 5'
		2	Pencatat Pembukuan	47	Wanita	SMA	Akuntansi	> 10
		3	PPK	50	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		4	Pembuat Dokumen	32	Wanita	S1	Akuntansi	1 - 5'
2	Dinas Kesehatan	5	PPK	46	Wanita	S2	Non Akuntansi	> 10
		6	Pencatat Pembukuan	48	Pria	S1	Non Akuntansi	> 10
		7	Bendahara	56	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
		8	Bendahara	45	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		9	Pembuat Dokumen	39	Pria	D3	Non Akuntansi	6 - 10'
3	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	10	Pembuat Dokumen	42	Pria	SMA	Non Akuntansi	1 - 5'
		11	Bendahara	43	Wanita	SMA	Non Akuntansi	6 - 10'
		12	PPK	48	Pria	S2	Non Akuntansi	1 - 5'
		13	Pencatat Pembukuan	35	Wanita	D3	Non Akuntansi	1 - 5'
		14	Bendahara	46	Pria	S1	Non Akuntansi	> 10
4	Dinas Peindustrian Perdagangan dan UMKM	15	Pencatat Pembukuan	30	Pria	S1	Non Akuntansi	1 - 5'
		16	Bendahara	38	Wanita	D3	Non Akuntansi	1 - 5'
		17	Pembuat Dokumen	37	Wanita	S2	Akuntansi	6 - 10'
		18	PPK	50	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
5	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	19	Pencatat Pembukuan	29	Wanita	S1	Akuntansi	1 - 5'
		20	Pencatat Pembukuan	45	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		21	Bendahara	30	Pria	SMA	Non Akuntansi	6 - 10'
6	Dinas Kependudukan dan Catatan sipil	22	Pencatat Pembukuan	38	Wanita	D3	Non Akuntansi	> 10
		23	PPK	42	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10

No	SKPD	No Resp	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Lama Bekerja
		24	Bendahara	55	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
7	DPPKAD	25	Pencatat Pembukuan	35	Pria	S1	Non Akuntansi	6 - 10'
		26	Pembuat Dokumen	51	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		27	Bendahara	46	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		28	Pencatat Pembukuan	28	Wanita	D3	Akuntansi	1 - 5'
		29	PPK	52	Wanita	S1	Non Akuntansi	1 - 5'
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30	Pencatat Pembukuan	44	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
		31	Bendahara	47	Pria	S1	Non Akuntansi	> 10
		32	Pembuat Dokumen	36	Wanita	D3	Akuntansi	1 - 5'
		33	PPK	43	Wanita	S2	Non Akuntansi	> 10
9	Dinas Sosial	34	Pencatat Pembukuan	39	Wanita	D3	Non Akuntansi	1 - 5'
		35	PPK	54	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		36	Bendahara	46	Wanita	S1	Akuntansi	> 10
		37	Pembuat Dokumen	48	Wanita	SMA	Akuntansi	> 10
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	38	Pembuat Dokumen	32	Wanita	SMA	Akuntansi	6 - 10'
		39	Pencatat Pembukuan	51	Wanita	SMA	Akuntansi	> 10
		40	Bendahara	38	Pria	S1	Non Akuntansi	> 10
		41	PPK	43	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
11	Kelurahan Kebonsari	42	PPK	50	Wanita	SMA	Akuntansi	> 10
		43	Bendahara	50	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
		44	Pembuat Dokumen	50	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
12	Kelurahan Temanggung 2	45	Bendahara	52	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
		46	Pembuat Dokumen	46	Wanita	SMA	Non Akuntansi	6 - 10'
		47	PPK	49	Pria	SMA	Non Akuntansi	1 - 5'
		48	Pencatat Pembukuan	48	Pria	SMA	Non Akuntansi	6 - 10'
13	Kelurahan Jampiroso	49	Bendahara	54	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10



No	SKPD	No Resp	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Lama Bekerja
		50	Pembuat Dokumen	57	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		51	Pencatat Pembukuan	55	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
14	Kelurahan Banyuurip	52	PPK	50	Wanita	SMA	Akuntansi	> 10
		53	Bendahara	56	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		54	Pencatat Pembukuan	50	Pria	D3	Non Akuntansi	1 - 5'
15	Kelurahan Kowangan	55	Pembuat Dokumen	51	Pria	S1	Non Akuntansi	> 10
		56	Bendahara	46	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		57	PPK	50	Pria	S1	Non Akuntansi	> 10
16	Kelurahan Madureso	58	Pencatat Pembukuan	28	Pria	SMA	Non Akuntansi	1 - 5'
		59	Pembuat Dokumen	47	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
		60	Bendahara	43	Wanita	SMA	Akuntansi	> 10
17	Kelurahan Temanggung 1	61	PPK	39	Wanita	SMA	Non Akuntansi	1 - 5'
		62	Bendahara	45	Wanita	D3	Non Akuntansi	> 10
		63	Pembuat Dokumen	35	Pria	SMA	Non Akuntansi	6 - 10'
18	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	64	Pencatat Pembukuan	39	Pria	SMA	Non Akuntansi	1 - 5'
		65	Pembuat Dokumen	54	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
		66	PPK	45	Wanita	S1	Non Akuntansi	1 - 5'
19	Badan Kepegawaian Daerah	67	Pencatat Pembukuan	27	Wanita	D3	Non Akuntansi	1 - 5'
		68	Bendahara	42	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		69	PPK	52	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		70	Pembuat Dokumen	41	Pria	S1	Non Akuntansi	> 10
20	Badan Pembangunan Daerah	71	Bendahara	47	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		72	Pencatat Pembukuan	42	Wanita	SMA	Non Akuntansi	6 - 10'
		73	PPK	56	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
21	Sekretariat Daerah	74	PPK	48	Pria	S2	Non Akuntansi	> 10
		75	Pencatat Pembukuan	39	Wanita	S1	Non Akuntansi	6 - 10'

No	SKPD	No Resp	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Lama Bekerja
22	Inspektorat	76	Bendahara	32	Pria	S2	Non Akuntansi	> 10
		77	Pembuat Dokumen	36	Wanita	D3	Non Akuntansi	> 10
		78	Pembuat Dokumen	40	Pria	S1	Non Akuntansi	> 10
		79	Pencatat Pembukuan	39	Wanita	S1	Non Akuntansi	1 - 5'
23	Sekretariat DPRD	80	PPK	51	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		81	Bendahara	54	Pria	S1	Non Akuntansi	> 10
		82	Pencatat Pembukuan	50	Pria	SMA	Non Akuntansi	6 - 10'
		83	Pembuat Dokumen	28	Pria	D3	Akuntansi	6 - 10'
5	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	84	PPK	45	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		85	Bendahara	38	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		86	Pembuat Dokumen	40	Wanita	D3	Non Akuntansi	6 - 10'
		87	Pencatat Pembukuan	43	Wanita	D3	Non Akuntansi	6 - 10'
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	88	PPK	54	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		89	Pencatat Pembukuan	31	Pria	SMA	Non Akuntansi	6 - 10'
		90	PPK	53	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		91	Bendahara	41	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
27	Kecamatan Gemawang	92	PPK	52	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		93	Pencatat Pembukuan	45	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		94	Bendahara	35	Pria	SMA	Akuntansi	1 - 5'
		95	Pembuat Dokumen	34	Pria	SMA	Non Akuntansi	1 - 5'
28	Kecamatan Parakan	96	Bendahara	32	Pria	SMA	Non Akuntansi	6 - 10'
		97	Pencatat Pembukuan	43	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		98	Pembuat Dokumen	32	Pria	S1	Non Akuntansi	6 - 10'
		99	PPK	50	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
29	Kecamatan Kandangan	100	PPK	50	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
		101	PPK	51	Pria	S2	Non Akuntansi	> 10

No	SKPD	No Resp	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Lama Bekerja
30	Kecamatan Candirototo	102	Pencatat Pembukuan	38	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
		103	Bendahara	54	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		104	Pencatat Pembukuan	30	Pria	D3	Non Akuntansi	1 - 5'
		105	Bendahara	31	Pria	SMA	Non Akuntansi	1 - 5'
		106	Pembuat Dokumen	47	Wanita	SMA	Akuntansi	> 10
		107	PPK	49	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		108	Bendahara	41	Pria	S2	Non Akuntansi	> 10
31	Kecamatan Jumo	109	Pembuat Dokumen	55	Pria	SMA	Akuntansi	> 10
		110	Pencatat Pembukuan	35	Pria	D3	Non Akuntansi	6 - 10'
		111	PPK	56	Pria	S1	Non Akuntansi	> 10
		112	Pencatat Pembukuan	31	Wanita	D3	Non Akuntansi	6 - 10'
32	Kecamatan Bulu	113	PPK	48	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		114	Bendahara	46	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
		115	Pembuat Dokumen	57	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
		116	Pencatat Pembukuan	43	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
33	Dinas Peternakan dan Perikanan	117	Bendahara	30	Wanita	D3	Non Akuntansi	1 - 5'
		118	Pembuat Dokumen	44	Pria	S1	Non Akuntansi	> 10
		119	PPK	48	Pria	S1	Non Akuntansi	> 10
		120	Pembuat Dokumen	48	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
34	Din. Pekerjaan Umum (DPU)	121	Bendahara	44	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		122	Pencatat Pembukuan	39	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
		123	Pembuat Dokumen	38	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		124	PPK	57	Pria	D3	Non Akuntansi	> 10
		125	Pencatat Pembukuan	41	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
35	BPBD	126	PPK	52	Wanita	S2	Non Akuntansi	> 10
		127	Bendahara	32	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10

No	SKPD	No Resp	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Lama Bekerja
36	Badan Penyuluhan	128	Pembuat Dokumen	42	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		129	Bendahara	49	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
		130	Pencatat Pembukuan	33	Pria	S1	Akuntansi	6 - 10'
		131	Pembuat Dokumen	56	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
		132	PPK	54	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
37	Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja	133	Pembuat Dokumen	45	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		134	Pencatat Pembukuan	32	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		135	PPK	35	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		136	Bendahara	32	Wanita	SMA	Non Akuntansi	> 10
38	Kec. Temanggung	137	Pembuat Dokumen	29	Wanita	D3	Non Akuntansi	6 - 10'
		138	Pencatat Pembukuan	28	Pria	D3	Non Akuntansi	6 - 10'
		139	Bendahara	43	Wanita	S2	Non Akuntansi	> 10
		140	Bendahara	32	Wanita	S2	Non Akuntansi	6 - 10'
		141	PPK	55	Pria	S2	Non Akuntansi	> 10
39	Kel. Kertosari	142	Pembuat Dokumen	57	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		143	Pencatat Pembukuan	47	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
		144	Bendahara	34	Pria	SMA	Non Akuntansi	6 - 10'
		145	PPK	40	Wanita	SMA	Non Akuntansi	1 - 5'
40	Kecamatan Pringsurat	146	Pencatat Pembukuan	30	Pria	D3	Non Akuntansi	1 - 5'
		147	Bendahara	31	Pria	SMA	Non Akuntansi	1 - 5'
		148	Pembuat Dokumen	47	Wanita	SMA	Akuntansi	> 10
		149	PPK	49	Wanita	S1	Non Akuntansi	> 10
41	Kecamatan Kedu	150	Bendahara	41	Pria	S2	Non Akuntansi	> 10
		151	Pembuat Dokumen	55	Pria	SMA	Akuntansi	> 10
		152	Pencatat Pembukuan	35	Pria	D3	Non Akuntansi	6 - 10'
		153	PPK	56	Pria	S1	Non Akuntansi	> 10

No	SKPD	No Resp	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Lama Bekerja
42	Kecamatan Ngadirejo	154	PPK	52	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		155	Pencatat Pembukuan	45	Pria	SMA	Non Akuntansi	> 10
		156	Bendahara	35	Pria	SMA	Akuntansi	1 - 5'
		157	Pembuat Dokumen	34	Pria	SMA	Non Akuntansi	1 - 5'

Tabel 23. Data Penelitian Variabel X<sub>1</sub>

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1.16	X1.17	X1.18	Total X1
1	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	58
2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	56
3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	55
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	55
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	56
7	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	55
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	53
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	53
10	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	55
11	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	57
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	55
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
14	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	60
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	55
16	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	53
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
19	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	59
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
21	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	2	3	3	3	53
22	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	57
23	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	63
24	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	62
25	3	4	2	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	57

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1.16	X1.17	X1.18	Total X1
26	3	3	2	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	2	3	3	3	3	57
27	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	56
28	3	3	2	4	3	4	4	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	4	58
29	4	3	1	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	61
30	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	56
31	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	57
32	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	63
33	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	55
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
35	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	60
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
37	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	53
38	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	63
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	55
41	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	55
42	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	63
43	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	57
44	4	4	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	56
45	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	52
46	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	52
47	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	55
48	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	55
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
50	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	59
51	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	58

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1.16	X1.17	X1.18	Total X1
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	55
53	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	51
54	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	56
55	3	3	3	4	3	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	55
56	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	61
57	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	55
58	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	56
59	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	53
60	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	53
61	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	57
62	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	57
63	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	68
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
65	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	55
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	55
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	53
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	53
69	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
70	4	3	3	4	3	4	4	4	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	53
71	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	59
72	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	52
73	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	53
74	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	69
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	69
77	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	57



No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1.16	X1.17	X1.18	Total X1
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	3	3	3	3	3	55
79	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	52
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
81	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	55
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	52
83	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	56
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	53
85	4	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	58
86	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	55
87	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	62
88	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	55
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	52
90	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	4	51
91	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	52
92	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	60
93	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	60
94	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	60
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
96	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	55
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
99	4	4	3	4	2	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	64
100	4	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	2	2	3	3	4	4	57
101	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
102	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	64
103	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	56

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1.16	X1.17	X1.18	Total X1
104	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	62
105	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	4	51
106	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	52
107	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
108	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	58
109	3	3	4	3	4	4	3	3	1	1	1	3	2	3	3	3	3	4	51
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	52
111	4	4	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	57
112	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	53
113	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	53
114	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	53
115	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	52
116	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	56
117	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	56
118	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	64
119	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
120	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	52
121	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	53
122	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	53
123	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	52
124	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
125	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	52
126	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	4	59
127	4	4	3	4	4	4	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	58
128	4	3	3	3	3	3	3	4	2	2	4	4	2	3	3	3	3	3	55
129	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	55

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1.16	X1.17	X1.18	Total X1
130	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	55
131	3	3	3	4	3	4	4	2	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	62
132	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	56
133	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	55
134	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	60
135	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	59
136	3	3	2	3	3	4	4	2	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	61
137	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	56
138	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	58
139	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	4	57
140	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	55
141	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	55
142	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
143	3	4	4	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	53
144	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
145	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	55
146	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	62
147	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	4	51
148	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	52
149	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
150	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	58
151	3	3	4	3	4	4	3	3	1	1	1	3	2	3	3	3	3	4	51
152	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	52
153	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
154	4	4	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	56
155	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1.16	X1.17	X1.18	Total X1
156	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	64
157	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54

Tabel 24. Data Penelitian Variabel X<sub>2</sub>

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2.15	X2.16	X2.17	X2.18	X2.19	X2.20	Total X2
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	59
3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	75
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
5	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	65
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	59
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	59
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	59
12	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	61
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
14	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	63
15	4	2	4	4	4	2	2	3	2	3	4	3	3	2	3	2	3	3	3	2	58
16	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	55
17	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	57
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	1	55
19	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	59
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
21	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	56
22	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	65
23	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	65
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	70
25	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	62

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2.15	X2.16	X2.17	X2.18	X2.19	X2.20	Total X2
26	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	62
27	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	67
28	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
29	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	2	3	72
30	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	67
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	3	3	3	72
32	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	68
33	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	76
34	2	2	2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	64
35	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	59
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
37	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	56
38	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	57
39	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	57
40	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	2	3	3	4	4	3	70
41	4	3	4	4	4	4	2	2	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	69
42	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2	4	3	2	68
43	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3	3	3	4	3	2	4	3	2	65
44	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	2	4	3	2	71
45	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	56
46	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	56
47	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	51
48	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	52
49	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	56
50	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	63

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2.15	X2.16	X2.17	X2.18	X2.19	X2.20	Total X2
52	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	2	4	4	2	2	2	2	3	3	62
53	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	55
54	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	2	4	4	3	2	2	4	2	4	68
55	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	60
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
57	4	4	4	3	3	3	3	4	4	2	3	3	3	2	4	4	4	2	4	2	65
58	4	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	2	4	3	2	2	2	3	3	2	58
59	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	57
60	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	55
61	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	68
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	68
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	68
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
66	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	67
67	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	54
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	59
69	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	56
70	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	4	4	4	4	3	2	2	58
71	3	4	4	3	4	4	3	4	2	3	2	4	3	2	4	3	4	2	4	1	63
72	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	56
73	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	57
74	4	4	4	4	4	3	2	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	70
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
76	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	70
77	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	59

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2.15	X2.16	X2.17	X2.18	X2.19	X2.20	Total X2
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	57
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	4	4	3	3	3	3	3	69
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
85	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	4	3	3	62
86	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	69
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	57
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	54
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
90	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	56
91	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	57
92	4	4	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	64
93	4	4	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	64
94	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	63
95	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	58
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
99	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	60
100	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	52
101	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	58
102	3	3	2	3	3	4	4	3	2	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	55
103	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	54



No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2.15	X2.16	X2.17	X2.18	X2.19	X2.20	Total X2
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	58
105	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	55
106	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	54
107	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	57
108	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	2	3	3	2	70
109	3	3	3	3	3	3	3	4	3	1	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	59
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	52
111	4	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	59
112	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	52
113	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	52
114	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	51
115	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	50
116	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	2	3	69
117	4	3	4	3	4	4	4	3	3	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	69
118	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	66
119	3	3	3	2	2	3	4	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	53
120	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	53
121	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	53
122	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	53
123	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	2	2	53
124	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	55
125	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	53
126	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	4	4	59
127	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	2	2	61
128	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	56
129	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	72

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2.15	X2.16	X2.17	X2.18	X2.19	X2.20	Total X2
130	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	70
131	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	61
132	4	3	3	4	4	4	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	71
133	4	3	4	4	4	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	59
134	4	3	3	3	3	4	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	59
135	4	3	3	3	3	4	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	59
136	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	66
137	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	58
138	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
139	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	64
140	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	69
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	68
142	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
143	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	59
144	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
145	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	70
146	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	58
147	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	55
148	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	54
149	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	57
150	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	70
151	3	3	3	3	3	3	3	4	3	1	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	59
152	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	52
153	4	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	59
154	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	69
155	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	2	3	4	4	69

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	X2.14	X2.15	X2.16	X2.17	X2.18	X2.19	X2.20	Total X2
156	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	66
157	3	3	3	3	4	4	4	2	3	3	4	2	2	3	4	2	3	3	3	3	61



No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	Total X3
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	34
44	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34
45	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	4	32
46	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	4	32
47	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	4	30
48	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	4	30
49	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
50	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	33
51	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
52	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
53	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
54	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	37
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
56	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	36
57	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	35
58	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	31
59	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	34
60	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
61	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	37
62	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	38
63	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	38
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
66	3	3	2	3	3	3	4	4	4	4	4	37
67	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	30
68	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	31
69	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	31
70	2	2	2	2	4	3	3	4	4	4	3	33
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
72	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	28
73	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
74	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	35
75	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
76	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	34
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
78	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
79	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
80	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	31
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
82	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
83	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	35
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
85	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	30



No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	Total X3
129	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	35
130	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	36
131	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	34
132	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	36
133	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	31
134	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	32
135	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	32
136	2	3	3	2	4	2	3	4	3	3	4	33
137	2	2	3	3	3	2	4	3	4	4	3	33
138	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
139	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	37
140	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	36
141	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	36
142	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
143	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32
144	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
145	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	36
146	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
147	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	29
148	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	33
149	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	29
150	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	35
151	2	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	29
152	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	2	36
153	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	33
154	3	4	4	2	4	4	3	3	3	3	3	36
155	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	37
156	3	3	4	3	4	2	3	4	3	3	1	33
157	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	30

Tabel 26. Data Penelitian Variabel X<sub>4</sub>

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10	X4.11	X4.12	X4.13	X4.14	X4.15	X4.16	Total X <sub>4</sub>
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50
6	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	52
7	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
12	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	52
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
14	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	59
15	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	55
16	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	54
17	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	56
18	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
19	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	52
20	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50
21	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	51
22	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	53
23	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	55
24	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	54
25	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	2	50



No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10	X4.11	X4.12	X4.13	X4.14	X4.15	X4.16	Total X4
26	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	2	50
27	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	55
28	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	58
29	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	2	4	3	3	3	51
30	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	52
31	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	51
32	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	56
33	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	51
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
35	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	53
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	45
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49
42	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49
43	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	50
44	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	50
45	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	3	3	54
46	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	56
47	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	56
48	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	51
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
50	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	54
51	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	53

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10	X4.11	X4.12	X4.13	X4.14	X4.15	X4.16	Total X4
52	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	4	4	4	3	4	3	49
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
54	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	49
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	47
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	47
58	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	53
59	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49
60	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47
61	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	49
62	3	2	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	52
63	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	3	3	3	3	54
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
66	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	47
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	47
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	47
70	4	3	3	2	4	4	2	4	4	3	2	3	3	3	3	2	49
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
74	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	50
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	47

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10	X4.11	X4.12	X4.13	X4.14	X4.15	X4.16	Total X4
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
81	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	52
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
83	2	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	54
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	49
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	52
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	50
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	50
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	49
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	49
92	3	2	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	52
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	52
94	3	2	3	2	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	53
95	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	50
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	54
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
101	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
102	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	55
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	51

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10	X4.11	X4.12	X4.13	X4.14	X4.15	X4.16	Total X4
104	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	2	4	50
105	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
106	4	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	50
107	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49
108	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	51
109	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	50
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
111	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	53
112	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47
113	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	49
114	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
115	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47
116	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	51
117	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	51
118	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	53
119	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	47
120	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
121	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
122	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
123	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
124	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
125	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
126	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	53
127	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	51
128	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
129	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	50

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10	X4.11	X4.12	X4.13	X4.14	X4.15	X4.16	Total X4
130	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49
131	4	4	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	51
132	4	4	4	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	49
133	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49
134	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49
135	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49
136	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	53
137	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
138	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
139	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	53
140	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	54
141	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	54
142	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
143	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	53
144	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
145	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	50
146	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	2	4	48
147	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
148	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	53
149	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49
150	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	54
151	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	50
152	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48
153	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	53
154	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	51
155	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	51

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10	X4.11	X4.12	X4.13	X4.14	X4.15	X4.16	Total X4
156	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	50
157	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	47

Tabel 27. Data Penelitian Variabel Y

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13	Y.14	Y.15	Y.16	Y.17	Y.18	Y.19	Y.20	Y.21	Total Y
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	62
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	62
3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	65
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	62
5	2	4	1	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	65
6	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	68
7	4	5	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	63
8	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	65
9	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	62
10	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	64
11	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	61
12	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	65
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	61
14	3	4	2	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	67
15	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	67
16	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	70
17	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	3	3	3	2	2	4	3	4	4	4	4	73
18	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	70
19	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	2	3	3	2	4	3	3	4	70
20	2	3	1	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	1	1	3	4	4	3	4	4	65
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
22	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	2	1	2	3	3	3	3	3	3	67
23	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	65
24	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	3	3	3	3	1	3	4	4	4	4	4	73
25	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	67

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13	Y.14	Y.15	Y.16	Y.17	Y.18	Y.19	Y.20	Y.21	Total Y
26	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	65
27	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	2	2	2	3	4	3	3	3	3	67
28	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	74
29	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	65
30	2	4	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	66
31	3	4	2	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	65
32	3	4	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	68
33	2	4	2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	65
34	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
35	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	61
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
40	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	64
41	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	64
42	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	64
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	4	4	63
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	4	4	63
45	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	2	1	4	4	4	4	4	4	74
46	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	2	1	4	4	4	4	4	4	74
47	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	2	2	1	4	3	3	3	3	3	61
48	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	2	2	1	4	3	3	3	3	3	61
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
50	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	65
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	62



No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13	Y.14	Y.15	Y.16	Y.17	Y.18	Y.19	Y.20	Y.21	Total Y
52	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	66
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2	3	4	4	4	4	63
54	3	4	3	4	4	4	4	3	4	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	65
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	64
56	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	60
57	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	67
58	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	4	67
59	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	3	3	3	3	3	3	56
60	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	1	2	1	3	3	3	3	3	3	56
61	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	1	1	4	4	4	2	4	4	68
62	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	1	1	4	4	4	2	4	4	68
63	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	1	1	4	4	4	2	4	4	68
64	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	65
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	4	3	3	61
66	3	4	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	64
67	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	62
68	2	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	72
69	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	63
70	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	63
71	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	63
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
73	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	63
74	2	4	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	59
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
76	3	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	64
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13	Y.14	Y.15	Y.16	Y.17	Y.18	Y.19	Y.20	Y.21	Total Y
78	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	65
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	60
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
81	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	71
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	61
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	61
85	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	2	1	4	4	4	3	3	3	69
86	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	65
87	2	4	2	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	2	1	4	3	4	3	3	4	68
88	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	2	1	4	3	4	3	3	4	69
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	62
90	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	60
91	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	60
92	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	1	1	4	3	4	3	3	4	69
93	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	1	1	4	3	4	3	3	4	69
94	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	69
95	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	61
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
98	2	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	66
99	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	67
100	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	61
101	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	65
102	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	2	2	3	4	3	3	4	4	70
103	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	4	4	70

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13	Y.14	Y.15	Y.16	Y.17	Y.18	Y.19	Y.20	Y.21	Total Y
104	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	66
105	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
106	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	1	1	4	4	3	3	4	4	66
107	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	62
108	3	3	2	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	66
109	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	3	3	4	71
110	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	71
111	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	3	3	4	72
112	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	59
113	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	59
114	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	60
115	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	58
116	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	63
117	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	63
118	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	75
119	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	63
120	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	61
121	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	61
122	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	61
123	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	61
124	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	60
125	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	60
126	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	1	3	4	4	4	4	3	4	72
127	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	62
128	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	61
129	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	64

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13	Y.14	Y.15	Y.16	Y.17	Y.18	Y.19	Y.20	Y.21	Total Y
130	3	4	3	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
131	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	62
132	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	63
133	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	66
134	4	4	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	64
135	4	4	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	64
136	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	1	1	4	3	3	3	3	3	64
137	3	3	3	4	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	68
138	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	69
139	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	64
140	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	64
141	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	64
142	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	59
143	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	61
144	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	59
145	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	66
146	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	66
147	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
148	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	1	1	4	4	3	3	4	4	66
149	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	62
150	3	3	2	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	66
151	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	3	3	4	71
152	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	71
153	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	3	3	4	72
154	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
155	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13	Y.14	Y.15	Y.16	Y.17	Y.18	Y.19	Y.20	Y.21	Total Y
156	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	75
157	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63

## Lampiran 9. Hasil Uji Prasyarat Analisis

### 1. Hasil *Output* SPSS Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		157
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.09792150
	Absolute	.067
Most Extreme Differences	Positive	.067
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.839
Asymp. Sig. (2-tailed)		.482

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### 2. Hasil *Output* SPSS Uji Linearitas Data

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X1		(Combined)	444.559	13	34.197	2.589	.003
	Between Groups	Linearity	212.468	1	212.468	16.083	.000
		Deviation from Linearity	232.091	12	19.341	1.464	.144
	Within Groups		1889.148	143	13.211		
	Total		2333.707	156			

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X2		(Combined)	462.609	24	19.275	1.360	.140
	Between Groups	Linearity	51.174	1	51.174	3.610	.060
		Deviation from Linearity	411.435	23	17.888	1.262	.206
	Within Groups		1871.098	132	14.175		
	Total		2333.707	156			

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X3	(Combined)		194.920	11	17.720	1.201	.291
	Between Groups	Linearity	48.083	1	48.083	3.260	.073
		Deviation from Linearity	146.837	10	14.684	.995	.450
	Within Groups		2138.787	145	14.750		
	Total		2333.707	156			

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X4	(Combined)		764.524	11	69.502	6.422	.000
	Between Groups	Linearity	628.128	1	628.128	58.042	.000
		Deviation from Linearity	136.396	10	13.640	1.260	.258
	Within Groups		1569.183	145	10.822		
	Total		2333.707	156			

### 3. Hasil *Output* SPSS Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	21.258	6.149		3.457	.001		
1 X1	.169	.094	.142	1.793	.075	.751	1.332
X2	.005	.064	.008	.080	.936	.529	1.892
X3	.065	.150	.040	.431	.667	.546	1.832
X4	.728	.114	.480	6.395	.000	.836	1.196

a. Dependent Variable: Y

### 4. Hasil *Output* SPSS Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3.705	4.028		-.920	.359
1 X1	.044	.057	.071	.769	.443
X2	-.037	.039	-.104	-.935	.351
X3	.070	.091	.084	.777	.438
X4	.070	.064	.092	1.109	.269

a. Dependent Variable: RES2

## Lampiran 10. Data Statistik Deskriptif

Tabel 28. Statistik Deskriptif

Statistics					
	Total X1	Total X2	Total X3	Total X4	Total Y
N					
Valid	157	157	157	157	157
Missing	0	0	0	0	0
Mean	55.84	60.60	33.19	50.09	64.69
Median	55.00	60.00	33.00	49.00	64.00
Mode	55	60	33	48	63
Std. Deviation	3.247	5.678	2.394	2.550	3.868
Variance	10.545	32.242	5.732	6.505	14.960
Range	13	27	11	13	19
Minimum	51	49	28	45	56
Maximum	64	76	39	58	75
Sum	8767	9514	5211	7864	10156

Tabel 29. Statistik Deskriptif Variabel  $X_1$

Total X1				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
51	6	3.8	3.8	3.8
52	15	9.6	9.6	13.4
53	18	11.5	11.5	24.8
54	23	14.6	14.6	39.5
55	28	17.8	17.8	57.3
56	14	8.9	8.9	66.2
57	13	8.3	8.3	74.5
Valid 58	8	5.1	5.1	79.6
59	7	4.5	4.5	84.1
60	7	4.5	4.5	88.5
61	5	3.2	3.2	91.7
62	5	3.2	3.2	94.9
63	4	2.5	2.5	97.5
64	4	2.5	2.5	100.0
Total	157	100.0	100.0	



Tabel 30. Statistik Deskriptif Variabel X<sub>2</sub>  
Total X2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
49	1	.6	.6	.6
50	1	.6	.6	1.3
51	2	1.3	1.3	2.5
52	6	3.8	3.8	6.4
53	6	3.8	3.8	10.2
54	5	3.2	3.2	13.4
55	8	5.1	5.1	18.5
56	9	5.7	5.7	24.2
57	10	6.4	6.4	30.6
58	8	5.1	5.1	35.7
59	17	10.8	10.8	46.5
60	27	17.2	17.2	63.7
61	4	2.5	2.5	66.2
62	4	2.5	2.5	68.8
63	4	2.5	2.5	71.3
64	4	2.5	2.5	73.9
65	5	3.2	3.2	77.1
66	4	2.5	2.5	79.6
67	3	1.9	1.9	81.5
68	7	4.5	4.5	86.0
69	8	5.1	5.1	91.1
70	8	5.1	5.1	96.2
71	2	1.3	1.3	97.5
72	3	1.9	1.9	99.4
76	1	.6	.6	100.0
Total	157	100.0	100.0	

Tabel 31. Statistik Deskriptif Variabel X<sub>3</sub>  
Total X3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
28	2	1.3	1.3	1.3
29	7	4.5	4.5	5.7
30	10	6.4	6.4	12.1
31	17	10.8	10.8	22.9
32	25	15.9	15.9	38.9
33	39	24.8	24.8	63.7
34	15	9.6	9.6	73.2
35	13	8.3	8.3	81.5
36	10	6.4	6.4	87.9
37	11	7.0	7.0	94.9
38	6	3.8	3.8	98.7
39	2	1.3	1.3	100.0
Total	157	100.0	100.0	

Tabel 32. Statistik Deskriptif Variabel X<sub>4</sub>

Total X <sub>4</sub>				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
45	1	.6	.6	.6
47	12	7.6	7.6	8.3
48	48	30.6	30.6	38.9
49	19	12.1	12.1	51.0
50	19	12.1	12.1	63.1
51	15	9.6	9.6	72.6
Valid 52	11	7.0	7.0	79.6
53	13	8.3	8.3	87.9
54	10	6.4	6.4	94.3
55	4	2.5	2.5	96.8
56	3	1.9	1.9	98.7
58	2	1.3	1.3	100.0
Total	157	100.0	100.0	

Tabel 33. Statistik Deskriptif Variabel Y

Total Y				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
56	2	1.3	1.3	1.3
58	1	.6	.6	1.9
59	5	3.2	3.2	5.1
60	7	4.5	4.5	9.6
61	17	10.8	10.8	20.4
62	11	7.0	7.0	27.4
63	31	19.7	19.7	47.1
64	14	8.9	8.9	56.1
65	16	10.2	10.2	66.2
Valid 66	11	7.0	7.0	73.2
67	8	5.1	5.1	78.3
68	7	4.5	4.5	82.8
69	6	3.8	3.8	86.6
70	5	3.2	3.2	89.8
71	5	3.2	3.2	93.0
72	4	2.5	2.5	95.5
73	2	1.3	1.3	96.8
74	3	1.9	1.9	98.7
75	2	1.3	1.3	100.0
Total	157	100.0	100.0	

## Lampiran 11. Hasil Regresi

### 1. Hasil *Output* SPSS 20 Regresi Hipotesis Pertama

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.302 <sup>a</sup>	.091	.085	3.699

a. Predictors: (Constant), X1

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	212.468	1	212.468	15.525	.000 <sup>b</sup>
Residual	2121.239	155	13.685		
Total	2333.707	156			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	44.619	5.102		8.746	.000
	X1	.359	.091	.302	3.940	.000

a. Dependent Variable: Y

### 2. Hasil *Output* SPSS 20 Regresi Hipotesis Kedua

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.148 <sup>a</sup>	.022	.016	3.837

a. Predictors: (Constant), X2

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	51.174	1	51.174	3.475	.064 <sup>b</sup>
Residual	2282.533	155	14.726		
Total	2333.707	156			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	58.575	3.293		17.787	.000
	X2	.101	.054	.148	1.864	.064

a. Dependent Variable: Y

3. Hasil *Output* SPSS 20 Regresi Hipotesis Ketiga**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.144 <sup>a</sup>	.021	.014	3.840

a. Predictors: (Constant), X3

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	48.083	1	48.083	3.261	.073 <sup>b</sup>
	Residual	2285.624	155	14.746		
	Total	2333.707	156			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	56.992	4.273		13.337	.000
	X3	.232	.128	.144	1.806	.073

a. Dependent Variable: Y

4. Hasil *Output* SPSS 20 Regresi Hipotesis Keempat**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.519 <sup>a</sup>	.269	.264	3.317

a. Predictors: (Constant), X4

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	628.128	1	628.128	57.083	.000 <sup>b</sup>
Residual	1705.579	155	11.004		
Total	2333.707	156			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25.280	5.223		4.840	.000
X4	.787	.104	.519	7.555	.000

a. Dependent Variable: Y

5. Hasil *Output* SPSS 20 Regresi Hipotesis Kelima**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.534 <sup>a</sup>	.285	.266	3.314

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	664.850	4	166.212	15.139	.000 <sup>b</sup>
Residual	1668.857	152	10.979		
Total	2333.707	156			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

**Coefficients**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	21.258	6.149		3.457	.001
X1	.169	.094	.142	1.793	.075
X2	.050	.064	.008	.080	.936
X3	.065	.150	.040	.431	.667
X4	.728	.114	.480	6.395	.000

a. Dependent Variable: Y

**LAMPIRAN 12**  
**TABEL STATISTIKA**

**DISTRIBUSI NILAI  $r_{\text{tabel}}$  SIGNIFIKANSI 5% dan 1%**

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
171	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
172	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
173	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
174	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
175	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
176	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
177	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
178	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
179	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
180	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72



Titik Persentase Distribusi t (df = 121 – 160)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129	0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130	0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132	0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139	0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151	0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

**LAMPIRAN 13**  
**SURAT IJIN PENELITIAN**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Januari 2016

Nomor : 074/178/Kesbangpol/ 2016  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
di  
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 110/UN34.18/LT/2015  
Tanggal : 19 Januari 2015  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **“PENGARUH KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung)”**, kepada:

Nama : DIAN DHARMANINGTYAS  
NIM : 12812141043  
No. HP/Identitas : 082227558962 / No. KTP. 3323035903930002  
Prodi/Jurusan : Akuntansi  
Fakultas, Universitas : Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah  
Waktu Penelitian : 27 Januari s.d 30 Maret 2016

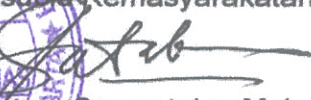
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY  
KABID. POLDA GRI DAN KEMASYARAKATAN  
Ub. Kasubid Kemasyarakatan  
  
Drs. Petrus Suwantoko, Msi.  
NIP. 19660724 199302 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/0228/04.5/2016

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;  
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/178/Kesbangpol/2016 tanggal 22 Januari 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : DIAN DHARMANINGTYAS
2. Alamat : JALAN TERUSAN SUMBING NO 38 RT 009 RW 001, KEL. TEMANGGUNG 2, KEC. TEMANGGUNG, KAB. TEMANGGUNG, PROV. JAWA TENGAH
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PENGARUH KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG)
- b. Tempat / Lokasi : Satuan Kerja Perangkat Daerah, TEMANGGUNG
- c. Bidang Penelitian : Akuntansi
- d. Waktu Penelitian : 02-02-2016 s.d. 30-03-2016
- e. Penanggung Jawab : Drs. Ngadirin Setiawan, S.E, M.S
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Negeri Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 02 Februari 2016

Pt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama



ASHI WIDHIASTUTI



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131

Semarang, 02 Februari 2016

Nomor : 070/728/2016  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Bupati Temanggung  
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol  
Kab Temanggung

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/0228/04.5/2016 Tanggal 02 Februari 2016 atas nama DIAN DHARMANINGTYAS dengan judul proposal PENGARUH KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama



Dra. ASIH WIDHIASTUTI, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620920 198803 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Sdr. DIAN DHARMANINGTYAS.





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Alamat : Jl. Setia Budi No 1 Telp. (0293) 491048 Fax 491313 Kode Pos 56212  
TEMANGGUNG

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 070 / 031/ 2016

- I. DASAR : 1.Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia No 64 Tahun 2011 Tanggla 20 Desember 2011, tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- 2.Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070 /67 / 2013 tanggal 11 Nopember 2013.
- II. MEMBACA : Surat dari Badan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070 / 0228 / 04.5 / 2016, tanggal 2 Februari 2016, perihal Permohonan Ijin Penelitian/ Survai/Magang, Mencari Data Awal/Praktek Kerja.
- III. Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN atas Kegiatan Survei / Penelitian / Riset / Magang / Pengambilan Data dan Praktek Kerja yang akan dilaksanakan oleh :
- a. Nama : Dian Dharmaningtyas
- b. Kebangsaan : Indonesia
- c. Alamat : Jl Terusan Sumbing Rt 09/RW 01 Kel. Temanggung2  
Kecamatan Temanggung,Kab Temanggung.
- d. Pekerjaan : Mahasiswi.
- d. Penanggung Jawab : Drs Ngadirin Setiawan,S.E,M.S..
- e. Judul Penelitian : Pengarug Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan (*Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung* ).
- g. Lokasi : SKPD se Kab.Temanggung.
- h.Lembaga : UNY.

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Pelaksanaan Kegiatan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
3. Apabila kegiatan tersebut mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan

4. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
  5. Surat Rekomendasi Survei / Riset / Penelitian /Izin Praktek ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
    - a. Pemegang Surat Rekomendasi Survei / Riset / Penelitian ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.
    - b. Obyek Penelitian Menolak untuk menerima peneliti.
  6. Setelah melakukan Survei, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Temanggung.
- IV. Surat Rekomendasi Survei / Riset / Penelitian ini berlaku dari :  
Tanggal 3 s/d 29 Februari 2016.
- V. Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Temanggung, 3 Februari 2016

A.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kasi Ketahanan Seni Budaya, Agama  
Kemasyarakatan dan Ekonomi



Tembusan : dikirim kepada Yth :

1. Bupati Temanggung ( Sbg. Laporan ) ;
  2. Kepala BAPPEDA Kab. Temanggung;
  3. Yang bersangkutan ;
  4. Arsip;
-



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Alamat : Jl. Setia Budi No 1 Telp. (0293) 491048 Fax 491313 Kode Pos 56212  
**TEMANGGUNG**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800 / 183 / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini,

**N a m a** : SUMALHADI  
**N I P** : 19630221 198103 1 002  
**Jabatan** : Kasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan  
Ekonomi  
**Dinas / Instansi** : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi, atas nama :

**N a m a** : DIAN DHARMANINGTYAS  
**N I M** : 12812141043  
**Universitas** : Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melakukan dan melaksanakan Penelitian dengan Judul ***Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan ( Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung )*** pada beberapa SKPD di Kabupaten Temanggung dalam rangka memenuhi persyaratan Tugas Akhir Kuliah.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 19 April 2016

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama,  
Kemasyarakatan dan Ekonomi







PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Januari 2016

Nomor : 074/178/Kesbangpol/ 2016  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
di  
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 110/UN34.18/LT/2015  
Tanggal : 19 Januari 2015  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **“PENGARUH KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung)”**, kepada:

Nama : DIAN DHARMANINGTYAS  
NIM : 12812141043  
No. HP/Identitas : 082227558962 / No. KTP. 3323035903930002  
Prodi/Jurusan : Akuntansi  
Fakultas, Universitas : Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah  
Waktu Penelitian : 27 Januari s.d 30 Maret 2016

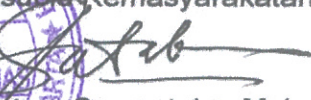
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY  
KABID. POLDA GRI DAN KEMASYARAKATAN  
Ub. Kasubid Kemasyarakatan  
  
Drs. Petrus Suwantoko, Msi.  
NIP. 19660724 199302 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/0228/04.5/2016

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/178/Kesbangpol/2016 tanggal 22 Januari 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : DIAN DHARMANINGTYAS
2. Alamat : JALAN TERUSAN SUMBING NO 38 RT 009 RW 001, KEL. TEMANGGUNG 2, KEC. TEMANGGUNG, KAB. TEMANGGUNG, PROV. JAWA TENGAH
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PENGARUH KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG)
- b. Tempat / Lokasi : Satuan Kerja Perangkat Daerah, TEMANGGUNG
- c. Bidang Penelitian : Akuntansi
- d. Waktu Penelitian : 02-02-2016 s.d. 30-03-2016
- e. Penanggung Jawab : Drs. Ngadirin Setiawan, S.E, M.S
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Negeri Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 02 Februari 2016

Pit. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama



ASHI WIDHIASTUTI



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131

Semarang, 02 Februari 2016

Nomor : 070/728/2016  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Bupati Temanggung  
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol  
Kab Temanggung

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/0228/04.5/2016 Tanggal 02 Februari 2016 atas nama DIAN DHARMANINGTYAS dengan judul proposal PENGARUH KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama



Dra. ASIH WIDHIASTUTI, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620920 198803 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Sdr. DIAN DHARMANINGTYAS.





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Alamat : Jl. Setia Budi No 1 Telp. (0293) 491048 Fax 491313 Kode Pos 56212  
TEMANGGUNG

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 070 / 031/ 2016

- I. DASAR : 1.Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia No 64 Tahun 2011 Tanggla 20 Desember 2011, tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- 2.Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070 /67 / 2013 tanggal 11 Nopember 2013.
- II. MEMBACA : Surat dari Badan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070 / 0228 / 04.5 / 2016, tanggal 2 Februari 2016, perihal Permohonan Ijin Penelitian/ Survai/Magang, Mencari Data Awal/Praktek Kerja.
- III. Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN atas Kegiatan Survei / Penelitian / Riset / Magang / Pengambilan Data dan Praktek Kerja yang akan dilaksanakan oleh :
- a. Nama : Dian Dharmaningtyas
- b. Kebangsaan : Indonesia
- c. Alamat : Jl Terusan Sumbing Rt 09/RW 01 Kel. Temanggung2  
Kecamatan Temanggung,Kab Temanggung.
- d. Pekerjaan : Mahasiswi.
- d. Penanggung Jawab : Drs Ngadirin Setiawan,S.E,M.S..
- e. Judul Penelitian : Pengarug Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan (*Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung* ).
- g. Lokasi : SKPD se Kab.Temanggung.
- h.Lembaga : UNY.

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Pelaksanaan Kegiatan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
3. Apabila kegiatan tersebut mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan

4. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
  5. Surat Rekomendasi Survei / Riset / Penelitian /Izin Praktek ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
    - a. Pemegang Surat Rekomendasi Survei / Riset / Penelitian ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.
    - b. Obyek Penelitian Menolak untuk menerima peneliti.
  6. Setelah melakukan Survei, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Temanggung.
- IV. Surat Rekomendasi Survei / Riset / Penelitian ini berlaku dari :  
Tanggal 3 s/d 29 Februari 2016.
- V. Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Temanggung, 3 Februari 2016

A.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kasi Ketahanan Seni Budaya, Agama  
Kemasyarakatan dan Ekonomi



Tembusan : dikirim kepada Yth :

1. Bupati Temanggung ( Sbg. Laporan ) ;
  2. Kepala BAPPEDA Kab. Temanggung;
  3. Yang bersangkutan ;
  4. Arsip;
-



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Alamat : Jl. Setia Budi No 1 Telp. (0293) 491048 Fax 491313 Kode Pos 56212  
**TEMANGGUNG**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800 / 183 / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini,

**N a m a** : SUMALHADI  
**N I P** : 19630221 198103 1 002  
**Jabatan** : Kasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan  
Ekonomi  
**Dinas / Instansi** : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi, atas nama :

**N a m a** : DIAN DHARMANINGTYAS  
**N I M** : 12812141043  
**Universitas** : Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melakukan dan melaksanakan Penelitian dengan Judul ***Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan ( Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung )*** pada beberapa SKPD di Kabupaten Temanggung dalam rangka memenuhi persyaratan Tugas Akhir Kuliah.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 19 April 2016

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama,  
Kemasyarakatan dan Ekonomi

